

RENCANA KERJA (RENJA) PERUBAHAN 2024

DINAS KETAHANAN PANGAN
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
TAHUN ANGGARAN 2024



PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

DINAS KETAHANAN PANGAN

Jalan Willem A.S. Nomor 9 Palangka Raya 7311



GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH

KEPUTUSAN GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH

NOMOR 188.44/325/2024

TENTANG

PERUBAHAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH TAHUN 2024

GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH,

- Menimbang : a. bahwa dengan berlakunya Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 37 Tahun 2024 tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2024, maka perlu ditetapkan Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2024;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6746);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6746);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
5. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
8. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2023 tentang Provinsi Kalimantan Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6870);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5888) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi Proses Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6056);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 2);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
13. Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Pulau Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 10);
14. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);
15. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2020 Nomor 1781);

20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1419);
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 81 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2022 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 590);
22. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 4 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2010 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 34);
23. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 5 Tahun 2015 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2015-2035 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2015 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 81);
24. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2016 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2016 Nomor 85) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2018 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2016 Nomor 90);
25. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2021 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 102);
26. Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 37 Tahun 2024 tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2024 (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 37);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan:

- KESATU : Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2024, sebagaimana tercantum pada Lampiran sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Perubahan Rencana Kerja sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU terdiri dari:
- a. Inspektorat Provinsi Kalimantan Tengah;
 - b. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Provinsi Kalimantan Tengah;
 - c. Badan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Kalimantan Tengah;
 - d. Badan Pendapatan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah;
 - e. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Kalimantan Tengah;
 - f. Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Kalimantan Tengah;
 - g. Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Kalimantan Tengah;
 - h. Badan Penanggulangan Bencana dan Pemadam Kebakaran Provinsi Kalimantan Tengah;
 - i. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Kalimantan Tengah;
 - j. Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Provinsi Kalimantan Tengah;
 - k. Dinas Perhubungan Provinsi Kalimantan Tengah;
 - l. Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik Provinsi Kalimantan Tengah;
 - m. Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Tengah;
 - n. Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Tengah;
 - o. Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan Provinsi Kalimantan Tengah;
 - p. Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Tengah;
 - q. Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Kalimantan Tengah;
 - r. Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Kalimantan Tengah;
 - s. Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Kalimantan Tengah;
 - t. Dinas Perdagangan dan Perindustrian Provinsi Kalimantan Tengah;
 - u. Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Kalimantan Tengah;
 - v. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Kalimantan Tengah;
 - w. Dinas Pendidikan Provinsi Kalimantan Tengah;
 - x. Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Tengah;
 - y. Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Tengah;
 - z. Dinas Pemuda dan Olah Raga Provinsi Kalimantan Tengah;
 - aa. Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Kalimantan Tengah;
 - bb. Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Kalimantan Tengah;

- cc. Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Kalimantan Tengah;
- dd. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Kalimantan Tengah;
- ee. Dinas Perpustakaan dan Arsip Provinsi Kalimantan Tengah;
- ff. Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Provinsi Kalimantan Tengah;
- gg. Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah;
- hh. Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kalimantan Tengah;
- ii. Rumah Sakit Umum Daerah dr. Doris Sylvanus;
- jj. Rumah Sakit Jiwa Kalawa Atei;
- kk. Rumah Sakit Umum Daerah Hanau;
- ll. Biro Perekonomian Provinsi Kalimantan Tengah;
- mm. Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah Provinsi Kalimantan Tengah;
- nn. Biro Kesejahteraan Rakyat Provinsi Kalimantan Tengah;
- oo. Biro Hukum Provinsi Kalimantan Tengah;
- pp. Biro Organisasi Provinsi Kalimantan Tengah;
- qq. Biro Umum Provinsi Kalimantan Tengah;
- rr. Biro Pengadaan Barang dan Jasa Provinsi Kalimantan Tengah;
- ss. Biro Administrasi Pembangunan Provinsi Kalimantan Tengah;
- tt. Biro Administrasi Pimpinan Provinsi Kalimantan Tengah; dan
- uu. Badan Penghubung Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah.

KETIGA : Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah (P-Renja PD) Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2024 yang telah ditetapkan, menjadi pedoman Perangkat Daerah dalam menyusun RKA Perubahan Perangkat Daerah.

KEEMPAT : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Palangka Raya
pada tanggal 09 Agustus 2024

GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH,



Tembusan:

1. Menteri Dalam Negeri:
 - u.p. Direktur Jenderal Bina Pembangunan Daerah Kementerian Dalam Negeri;
2. Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Tengah:
 - u.p. a. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat;
 - b. Asisten Administrasi Perekonomian dan Pembangunan;
 - c. Asisten Administrasi Umum; dan
 - d. Kepala Biro Hukum;
3. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Provinsi Kalimantan Tengah;
4. Inspektur Provinsi Kalimantan Tengah; dan
5. Masing-masing Kepala Perangkat Daerah untuk diketahui.

KATA PENGANTAR

Puji syukur dipanjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa atas berkat dan rahmat-Nya telah tersusun Rencana Kerja (Renja) Perubahan Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Kalimantan Tengah Tahun Anggaran 2024. Rencana Kerja (Renja) Perubahan SOPD Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Kalimantan Tengah telah disesuaikan dengan Tugas Pokok dan Fungsi Dinas. Dalam Rencana Kerja ini memuat arah dan kebijakan pembangunan ketahanan pangan, pencapaian kinerja Dinas, serta Rencana Kegiatan dan indikator kinerja tahun berjalan.

Demikian Rencana Kerja (Renja) Perubahan Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2024 ini dibuat dan disusun, dengan maksud dapat menjadi pedoman atau acuan dalam melaksanakan pembangunan ketahanan pangan. Semoga Tuhan Yang Maha Esa selalu menuntun kita dalam semua upaya mewujudkan kemandirian dan kedaulatan pangan serta peningkatan sumber daya manusia di Kalimantan Tengah.

Palangka Raya, Agustus 2024


Pt. KEPALA DINAS
AKHMAD ELPIANSYAH, SST., MT
Pembina Tingkat I
NIP. 19661201 198811 1 002

DAFTAR ISI

	Hal
KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
BAB I. PENDAHULUAN	
1.1. Latar Belakang.....	1
1.2. Landasan Hukum	3
1.3. Maksud dan Tujuan.....	4
1.4. Sistematik Penulisan	5
BAB II. HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU	
2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah	6
2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah.....	23
2.3. Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	32
2.4. Review Terhadap Rancangan Awal RKPD.....	42
2.5. Penelahaan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat.....	50
BAB III. TUJUAN DAN SASARAN PEMBANGUNAN KETAHANAN PANGAN	
3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional	51
3.2. Tujuan dan Sasaran	55
3.3. Program dan Kegiatan	57
BAB IV. RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH	
4.1. Program dan Kegiatan	62
BAB V. PENUTUP	
Penutup.....	72

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional adalah satu kesatuan tata cara perencanaan pembangunan untuk menghasilkan rencana-rencana pembangunan dalam jangka panjang, menengah dan tahunan yang dilaksanakan oleh unsur penyelenggara negara dan masyarakat di tingkat pusat dan daerah dengan tahapan-tahapan penyusunan rencana, penetapan rencana, pengendalian pelaksanaan rencana dan evaluasi pelaksanaan rencana. Penerapan sistem penganggaran terpadu berbasis kinerja, membawa konsekuensi akan pentingnya pengaturan sistem dan mekanisme perencanaan pembangunan yang mengakomodasi semangat reformasi birokrasi yang lebih demokratis, desentralistik, sinergis, komprehensif dan berkelanjutan.

Perencanaan pembangunan daerah merupakan suatu proses perencanaan pembangunan yang dimaksudkan untuk melakukan perubahan menuju arah perkembangan yang lebih baik bagi suatu komunitas masyarakat, pemerintah dan lingkungannya dalam wilayah/daerah tertentu dengan memanfaatkan atau mendayagunakan berbagai sumberdaya yang ada dan harus memiliki orientasi yang bersifat menyeluruh, lengkap tetapi tetap berpegang pada azas prioritas.

Pada RPJMN Tahap - 4 (2020-2024), Terdapat 4 (Empat) pilar dari RPJMN ke IV Tahun 2020-2024 yang merupakan amanat RPJPN 2005- 2026 untuk mencapai tujuan utama dari rencana pembangunan nasional periode terakhir. Keempat pilar tersebut yaitu :

- 1) Kelembagaan politik dan hukum yang mantap;
- 2) Kesejahteraan masyarakat yang terus meningkat;
- 3) Struktur ekonomi yang semakin maju dan kokoh;
- 4) Terwujudnya keanekaragaman hayati yang terjaga dan diterjemahkan ke dalam 7 agenda pembangunan yang didalamnya terdapat Program Prioritas, Kegiatan Prioritas, dan Proyek Prioritas antara lain :
 - a) Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas;
 - b) Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan;
 - c) Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing;
 - d) Membangun Kebudayaan dan Karakter Bangsa;
 - e) Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar ;

- f) Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana dan Perubahan Iklim;
- g) Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik.

Pada RPJMN Tahap - 3 (2015-2019), sektor pertanian masih menjadi sektor penting dalam pembangunan ekonomi nasional. Peran strategis sektor pertanian tersebut digambarkan dalam kontribusi sektor pertanian dalam penyedia bahan pangan dan bahan baku industri, penyumbang PDB, penghasil devisa negara, penyerap tenaga kerja, sumber utama pendapatan rumah tangga pedesaan, penyedia bahan pakan dan bioenergi serta berperan dalam upaya penurunan emisi gas rumah kaca. Upaya mencapai target sukses pembangunan pertanian pada RPJMN Tahap-2 (2010-2014) yang meliputi :

- (1) peningkatan swasembada berkelanjutan padi dan jagung dan swasembada kedelai, gula dan daging sapi,
- (2) peningkatan diversifikasi pangan,
- (3) peningkatan nilai tambah, daya saing dan ekspor, dan
- (4) peningkatan kesejahteraan petani melalui 7 gema revitalisasi yang meliputi (a) revitalisasi lahan, (b) revitalisasi perbenihan dan perbibitan, (c) revitalisasi infrastruktur pertanian, (d) revitalisasi SDM petani, (e) revitalisasi permodalan petani, (f) revitalisasi kelembagaan petani, dan (9) revitalisasi teknologi dan industri hilir.

Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, RPJM daerah merupakan penjabaran visi, misi dan program kepala daerah yang penyusunannya berpedoman kepada RPJP Daerah dengan memperhatikan RPJM Nasional. Rancangan Awal RPJMD Provinsi Kalimantan Tengah tahun 2021-2026 yang telah tersusun tersebut, perlu ditindak lanjuti segera dengan penyusunan Rancangan Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renstra SKPD) masing-masing SKPD tingkat provinsi sesuai dengan tugas pokok dan fungsi SKPD bersangkutan yang menjadi pedoman di dalam penyusunan Rencana Kerja Tahun 2024 Dinas Ketahanan Pangan Tahun 2024.

Pembangunan ketahanan pangan pada hakekatnya adalah rangkaian upaya untuk memfasilitasi, melayani dan mendorong berkembangnya usaha-usaha dalam masyarakat dalam pemenuhan pangan keluarga, masyarakat. Pembangunan Ketahanan Pangan di Provinsi Kalimantan Tengah dimana kegiatan-kegiatan yang akan dilaksanakan tetap mengacu kepada Program Nasional dan Program Daerah. Pada tahun anggaran 2021 Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Kalimantan Tengah melaksanakan Program yang bersumber dana dari APBN dan APBD.

Kondisi stabilitas ketahanan pangan masyarakat dihasilkan dari 3 sub sistem pangan yaitu : Terpenuhinya Pangan dalam jumlah dan jenis yang cukup untuk seluruh penduduk,

distribusi pangan yang dapat menjangkau kepada masyarakat dan penerapan konsumsi pangan yang beragam, bergizi dan berimbang yang memenuhi kaidah kesehatan.

Kelembagaan petani ialah lembaga yang ditumbuh kembangkan dari, oleh dan untuk petani guna memperkuat dan memperjuangkan kepentingan petani, Pembinaan pada kelompok tani perlu dilakukan secara berkesinambungan, diarahkan pada perubahan pola pikir petani dalam menerapkan sistem agribisnis.

Dalam rangka mencapai efektivitas dan efisiensi pengelolaan anggaran kinerja ketahanan pangan dan menselaraskan antara rancangan program dengan kegiatan diperlukan suatu acuan Rencana Kerja (RENJA). Untuk mendorong agar pelaksanaan Pembangunan Pertanian dan Ketahanan Pangan berorientasi pada tata pemerintahan yang baik (Good Governance) dan pelayanan yang baik (Good Service) dalam kerangka menciptakan nilai kesejahteraan sosial dan ekonomi bagi masyarakat di daerah, maka penyusunan Rancangan Awal Rencana Kerja (Renja) Tahun 2024 Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Kalimantan Tengah ini merupakan upaya efektif Perencanaan Pembangunan Ketahanan Pangan yang lebih terfokus pada penanganan isu strategis yang mengemuka yang dapat dipertanggungjawabkan dalam bentuk Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP).

Rencana Kerja Tahun 2024 Dinas Ketahanan Pangan selanjutnya berfungsi sebagai dokumen rencana Kerja Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan bidang Ketahanan Pangan Tahun 2024.

1.2. Landasan Hukum

Landasan hukum rencana kerja sebagai berikut :

- 1) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4421), Renstra SKPD adalah dokumen perencanaan SKPD untuk periode lima tahun. Renstra SKPD memuat visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program dan kegiatan pembangunan yang disusun sesuai dengan tugas dan fungsi SKPD serta berpedoman kepada RPJM Daerah dan bersifat indikatif. Rencana kerja ialah merupakan perencanaan SKPD untuk periode satu tahun anggaran;
- 2) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844);
- 3) Undang-Undang nomor 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen

- 4) Undang-undang nomor 18 tahun 2012 tentang Pangan;
- 5) Peraturan Pemerintah nomor 68 tahun 2002 tentang Ketahanan Pangan
- 6) Peraturan Pemerintah nomor 28 tahun 2004 tentang Keamanan, Mutu dan Gizi Pangan; Peraturan Pemerintah nomor 3 tahun 2007 pada pasal 2 dan pasal 3 menyatakan bahwa Pemerintah Daerah Provinsi, dan Kabuapten/kota wajib membuat laporan mempertanggung jawabkan urusan Ketahanan Pangan;
- 7) Peraturan Pemerintah Nomor 60 tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP);
- 8) Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2010 – 2014;
- 9) Peraturan Presiden nomor 83 tahun 2006 tentang Dewan Ketahanan Pangan;
- 10) Peraturan Presiden nomor 22 tahun 2009 tentang kebijakan percepatan penganekaragaman Konsumsi Pangan berbasis sumberdaya lokal;
- 11) Peraturan Presiden nomor tahun 2015 tentang pembangunan jangka menengah;
- 12) Peraturan Bersama Menteri Dalam Negeri, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional dan Menteri Keuangan, Nomor 28 Tahun 2010, Nomor 0199/M PPN/04/2010, Nomor PMK 95/PMK 07/2010 tentang Penyelarasan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2010-2014;
- 13) Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah,
- 14) Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 38 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Kalimantan Tengah.
- 15) Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 37 Tahun 2022 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Perangkat Daerah.

1.3. Maksud dan Tujuan

Tujuan dan maksud penyusunan Renja Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Kalimantan Tengah ini adalah :

- (1) Merumuskan arah Rencana Kerja Pembangunan Ketahanan Pangan di Kalimantan Tengah sesuai Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) dan Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Provinsi Kalimantan Tengah.

- (2) Merupakan rujukan arah perencanaan pembangunan Ketahanan Pangan dalam 1 (Satu) Tahun ke depan;
- (3) Merupakan rujukan pemantauan dan pengendalian pelaksanaan kegiatan pembangunan Ketahanan Pangan selama 1 (Satu) Tahun kedepan.

1.4. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan Rencana Kerja Dinas Ketahanan Pangan Tahun 2024 adalah sebagai berikut :

BAB	I	PENDAHULUAN
		1.1. Latar Belakang
		1.2. Landasan Hukum
		1.3. Maksud dan Tujuan
		1.4. Sistematika Penulisan
BAB	II	HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU
		2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD Tahun Lalu dan Capaian Renstra SKPD
		2.2. Analisis Kinerja Pelayanan SKPD
		2.3. Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi SKPD
		2.4. Review Terhadap Rancangan Awal SKPD
		2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat
BAB	III	TUJUAN DAN SASARAN PEMBANGUNAN KETAHANAN PANGAN
		3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional
		3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah
		3.3. Program dan Kegiatan
BAB	IV	RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH
BAB	V	PENUTUP

BAB II

HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah

Jumlah anggaran yang dikelola Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Kalimantan Tengah pada Tahun Anggaran 2022 berdasarkan Dokumen Perubahan Pelaksanaan Anggaran (DPPA-SKPD) Tahun 2022 Rp. 23.525.261.353,00 dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 22.469.136.563,64 atau 95,51 %. Anggaran belanja Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Kalimantan Tengah tahun 2022 terdiri anggaran Belanja Tidak Langsung dan Belanja Langsung Realisasinya sebagai berikut :

a. Belanja Tidak Langsung

Belanja Tidak Langsung ditetapkan sebesar Rp. 6.622.332.103,- realisasi sebesar Rp. 5.887.043.088,- atau 88,90 % sehingga kurang dari anggaran sebesar Rp. 735.289.015,-.

b. Belanja Langsung

Anggaran Belanja Langsung yang terbagi kedalam 5 (Lima) Program, 13 (Tiga Belas) kegiatan 42 (Empat Puluh Dua) Sub Kegiatan, ditetapkan sebesar Rp. 16.902.926.250 realisasinya Rp. 16.582.093.475,64 atau 98,10 %, sehingga kurang dari anggaran sebesar Rp. 320.832.774,36.

c. Anggaran Dekonsentrasi APBN

Jumlah anggaran Pusat dari Badan Pangan Nasional APBN Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Masyarakat yang dikelola Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Kalimantan Tengah pada Tahun Anggaran 2022 berdasarkan Dokumen Petunjuk Operasional Kegiatan (POK) Tahun 2023 Rp. 792.000.000,00 dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 564.429.485,00 atau 67,48 %.

Pelaksanaan program dan kegiatan tahun 2022 terlihat dengan hasil Pengukuran kinerja pada Renstra Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Kalimantan Tengah sebagai berikut:

Tabel 2.1. Tabel Evaluasi Capaian Sasaran Sasaran Strategis, Indikator Kinerja

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	KInerja Tahun 2020		KInerja Tahun 2021		KInerja Tahun 2022	
				Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1.	Terwujudnya Pemantapan Ketersediaan Pangan dan Distribusi dan Akses Pangan	a. Jumlah cadangan pangan pokok pemerintah provinsi	Ton	78,3	7,8	80,8	11,318	50,5	55,57
		b. Koefisien varian harga beras/fluktuasi harga beras	%	≤ 5	0,4	≤ 5	1,18	≤ 5	1,79
		c. Analisis Neraca Bahan Makanan (NBM) - Angka Ketersediaan Energi (AKE) - Angka Ketersediaan Protein (AKP)	Kkal / Kapita / Hari Gram/ Kapita/ Hari					2.575 63	3.071 102,53
2.	Terwujudnya Diversifikasi Pangan	a. Analisis Skor PPH Provinsi Kalimantan Tengah	Skor	93,1	84,9	94,1	83,8	88,3	87,2
		b. Jumlah Kelompok Penganekaragaman Konsumsi (P2KP) / Diversifikasi Konsumsi Pangan	Kelompok	30	30	35	83	20	31
3.	Terwujudnya keamanan pangan segar	a. Persentase jumlah sampel pangan segar yang aman dengan jumlah sampel yang diambil	%	89	88	90	88	90	90
		b. Jumlah pelaku usaha pangan segar asal tumbuhan	Pelaku	245	245	245	248	250	250
4.	Penanganan Daerah Rawan Pangan	a. Analisis Kewaspadaan Pangan dan Gizi (SKPG)	Dokumen	1	1	1	1	≤20	1.47
		b. Analisis Food Security and Vulneraby Atlas (FSVA)	Dokumen	1	1	1	1	≤20	1.47

Tabel 2.2
Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan
Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2023
Provinsi Kalimantan Tengah

Nama Perangkat Daerah : Dinas Ketahanan Pangan

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah 2021-2026) Tahun 2024		Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2023		Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan Tahun lalu 2023					Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2024)		Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
			K		K		K		K		K		K		10 = (5+7+9)
1	2	3	4		5		6		7		8 = (7/6)	9=7/6			
2.03	KETAHANAN PANGAN														
2.03 . 2.03.1 . 01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase Jumlah Pagu Dana Belanja Pemeliharaan dengan pagu dana SKPD tahun berjalan													
2.03 . 2.03.1 . 01 . 01	Penyediaan jasa surat menyurat	Jumlah surat-menyurat kantor tahun berjalan	1080	Surat	1080	Surat	1000	Surat	3.229	Surat	807,25	1000	Surat		
2.03 . 2.03.1 . 01 . 02	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	jumlah rekening yang dibayar tahun berjalan	6	Rekening	6	Rekening	6	Rekening	16	Rekening	4	6	Rekening		
2.03 . 2.03.1 . 01 . 03	Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor	jumlah jasa perbaikan peralatan dan perlengkapan kantor	5	Unit jasa	5	Unit jasa	5	Unit jasa	14	Unit jasa	3,5	5	Unit jasa		
2.03 . 2.03.1 . 01 . 05	Penyediaan jasa jaminan barang milik daerah	Jumlah gedung milik kantor yg terjamin	3	Gedung	3	Gedung	3	Gedung	10	Gedung	2,5	3	Gedung		
2.03 . 2.03.1 . 01 . 06	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	Jumlah unit pembayaran pajak kendaraan Dinas R2 dan R4 yg terbayar	30	jasa kendaraan R2, R4	30	jasa kendaraan R2, R4	30	jasa kendaraan R2, R4	90	jasa kendaraan R2, R4	22,5	30	jasa kendaraan R2, R4		
2.03 . 2.03.1 . 01 . 07	Penyediaan jasa administrasi keuangan	Jumlah tenaga jasa admisnitrasi keuangan tahun berjalan	16	orang pengelola keuangan kantor	16	orang pengelola keuangan kantor	16	orang pengelola keuangan kantor	41	orang pengelola keuangan kantor	10,25	16	orang pengelola keuangan kantor		
2.03 . 2.03.1 . 01 . 08	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Jumlah tenaga Jasa Kebersihan dan keamanan Kantor tahun berjalan	12	Orang jasa kontrak	12	Orang jasa kontrak	12	Orang jasa kontrak	36	Orang jasa kontrak	9	12	Orang jasa kontrak		
2.03 . 2.03.1 . 01 . 09	Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja	Jumlah perbaikan peralatan kerja kantor tahun berjalan	5	unit peralatan	5	unit peralatan	5	unit peralatan	12	unit peralatan	3	5	unit peralatan		
2.03 . 2.03.1 . 01 . 10	Penyediaan alat tulis kantor	Jumlah unit Alat Tulis Kantor tahun berjalan	30	unit ATK	30	unit ATK	30	unit ATK	90	unit ATK	22,5	30	unit ATK		
2.03 . 2.03.1 . 01 . 11	Penyediaan jasa barang cetakan dan penggandaan	Jumlah unit Cetak dan Penggandaan keperluan kantor tahun berjalan	10	Unit cetak	10	Unit cetak	10	Unit cetak	30	Unit cetak	7,5	10	Unit cetak		

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah 2021-2026) Tahun 2024		Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2023		Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan Tahun lalu 2023					Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2024)		Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
			K		K		K		K		Tingkat Realisasi (%)	K		10 = (5+7+9)	11=10/4
1	2	3	4		5		6		7		8 = (7/6)	9=7/6			
2.03 . 2.03.1 . 01 . 12	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	jumlah unit Komponen listrik penerangan	6	unit komponen penerangan/listrik	6	unit komponen penerangan/listrik	6	unit komponen penerangan/listrik	15	unit komponen penerangan/listrik	3,75	6	unit komponen penerangan/listrik		
2.03 . 2.03.1 . 01 . 14	penyedia peralatan rumah tangga		0	unit peralatan rumah tangga	0	unit peralatan rumah tangga		unit peralatan rumah tangga	0	unit peralatan rumah tangga	0	807,25	unit peralatan rumah tangga		
2.03 . 2.03.1 . 01 . 15	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	jumlah unit langganan harian surat kabar dan Jumlah buku tahun berjalan	4	langganan surat kabar harian	4	langganan surat kabar harian	4	langganan surat kabar harian	9	langganan surat kabar harian	2,25	4	langganan surat kabar harian		
2.03 . 2.03.1 . 01 . 18	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Jumlah Koordinasi, Sinkronisasi, Pelatihan, pd Luar daerah tahun berjalan	24	kali perjalanan menghadiri/mengikuti/konsultasi/koordinasi ke dinasan	24	kali perjalanan menghadiri/mengikuti/konsultasi/koordinasi ke dinasan	24	kali perjalanan menghadiri/mengikuti/konsultasi ke dinasan	64	kali perjalanan menghadiri/mengikuti/konsultasi/koordinasi ke dinasan	16	3,5	kali perjalanan menghadiri/mengikuti/konsultasi/koordinasi ke dinasan		
2.03 . 2.03.1 . 01 . 19	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah	Jumlah Koordinasi, Sinkronisasi, Pelatihan, dll, pd dalam daerah tahun berjalan	34	kali perjalanan pembinaan/koordinasi/monev/sinkronisasi	34	kali perjalanan pembinaan/koordinasi/monev/sinkronisasi	34	kali perjalanan pembinaan/koordinasi/monev/sinkronisasi	134	kali perjalanan pembinaan/koordinasi/monev/sinkronisasi	33,5	2,5	kali perjalanan pembinaan/koordinasi/monev/sinkronisasi		
2.03 . 2.03.1 . 01 . 35	Rujukan Berobat PNS	Jumlah PNS yg menerima bantuan biaya kesehatan untuk berobat	0	orang PNS	0	orang PNS	0	orang PNS	0	orang PNS	0	22,5	orang PNS		
												10,25			
2.03 . 2.03.1 . 02	Program peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase Jumlah Pagu Dana Belanja Modal dengan pagu dana SKPD tahun berjalan										9			
1.21 . 1.21.5.2.02.05	Pengadaan kendaraan dinas / operasional	Jumlah kendaraan dinas/operasional	0	unit R2 dan R4	0	unit R2 dan R4	2	unit R2 dan R4	5	unit R2 dan R4	1,25	3	unit R2 dan R4		
1.21 . 1.21.5.2.02.07	Pengadaan perlengkapan gedung kantor	Jumlah perlengkapan gedung kantor tahun berjalan	0	unit perlengkapan	0	unit perlengkapan	4	unit perlengkapan	13	unit perlengkapan	3,25	22,5	unit perlengkapan		
1.21 . 1.21.5.2.02.09	Pengadaan peralatan gedung kantor	Jumlah peralatan gedung kantor tahun berjalan	0	unit peralatan	0	unit peralatan	6	unit peralatan	22	unit peralatan	5,5	7,5	unit peralatan		
1.21 . 1.21.5.2.02.10	Pengadaan Meubelair	Jumlah Pengadaan Meubelair tahun berjalan		unit meubelair		unit meubelair		unit meubelair	0	unit meubelair	0,00	3,75	unit meubelair		
1.21 . 1.21.5.2.02.13	Pembangunan pagar dan tempat parkir	Jumlah pembangunan tempat Parkir, pagar tahun berjalan	0	unit tempat parkir/pagar	0	unit tempat parkir/pagar		unit tempat parkir/pagar	0	unit tempat parkir/pagar	0	0	unit tempat parkir/pa		

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah 2021-2026) Tahun 2024		Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2023		Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan Tahun lalu 2023					Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2024)		Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
			K		K		K		K		Tingkat Realisasi (%)	K		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4		5		6		7		8 = (7/6)	9=7/6		10 = (5+7+9)	11=10/4
1.21 . 1.21.5.2.02.21	Pemeliharaan rutin/berkala rumah dinas	Jumlah pemeliharaan Rumah Dinas	0	unit rumah dinas	0	unit rumah dinas	0	unit rumah dinas	0	unit rumah dinas	0	2,25	unit rumah dinas		
1.21 . 1.21.5.2.02.22	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	jumlah pemeliharaan gedung Kantor	0	buah gedung	0	buah gedung	1	buah gedung	3	buah gedung	0,75	16	buah gedung		
1.21 . 1.21.5.2.02.23	Pemeliharaan rutin/berkala mobil jabatan	Jumlah pemeliharaan mobil jabatan	1	buah R4	1	buah R4	1	buah R4	17	buah R4	4,25	33,5	buah R4		
1.21 . 1.21.5.2.02.24	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	jumlah pemeliharaan kendaraan dinas/operasional R2,R4	8	buah R4,R2	8	buah R4,R2	8	buah R4,R2	19	buah R4,R2	4,75	0	buah R4,R2		
1.21 . 1.21.5.2.02.26	Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor	jumlah Pemeliharaan perlengkapan kerja gedung kantor	5	unit perlengkapan	5	unit perlengkapan	5	unit perlengkapan	11	unit perlengkapan	2,75		unit perlengkapan		
1.21 . 1.21.5.2.02.28	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	Jumlah pemeliharaan peralatan kerja gedung kantor		unit peralatan		unit peralatan		unit peralatan	0	unit peralatan	0		unit peralatan		
1.21 . 1.21.01.01 . 02.31	Pemeliharaan rutin/berkala Pagar, Hal. Dan Tempat Parkir	Jumlah pemeliharaan Pagar, Halaman dan tempat parkir		unit pagar/ halaman/parkir		unit pagar/ halaman/parkir		unit pagar/ halaman/parkir	0	unit pagar/ halaman/parkir	0	1,25	unit pagar/ halaman/parkir		
												3,25			
2.03 . 2.03.1 . 03	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Persentase Jumlah Aparatur PNS dengan Jumlah Pakaian Dinas yg dibagi										5,5			
2.03 . 2.03.1 . 03 . 02	Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya	Jumlah Pakaian Dinas beserta kelengkapannya tahun berjalan	0	stel pakaian	0	stel pakaian	0	stel pakaian	0	stel pakaian	0	0,00	stel pakaian		
2.03 . 2.03.1 . 03 . 03	Pengadaan pakaian kerja lapangan	Jumlah Pakaian Kerja lapangan		stel pakaian		stel pakaian		stel pakaian		stel pakaian		0	stel pakaian		
2.03 . 2.03.1 . 03 . 05	Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu	Jumlah Pakaian Khusus Batik Khas daerah utk PNS		stel pakaian		stel pakaian		stel pakaian		stel pakaian		0	stel pakaian		
2.03 . 2.03.1 . 03 . 06	Pengadaan pakaian olahraga	Jumlah pakaian olahraga	0	stel pakaian	0	stel pakaian	0	stel pakaian	0	stel pakaian	0	0,75	stel pakaian		
												4,25			
2.03 . 2.03.1 . 05	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Persentase Jumlah Aparatur yang mengikuti pelatihan dengan jumlah Aparatur SKPD										4,75			
2.03 . 2.03.1 . 05 . 01	Pendidikan dan pelatihan formal	Jumlah PNS yg Mengikuti pendidikan dan Pelatihan Formal	2	PNS yang mengikuti pelatihan/ pendidikan	2	PNS yang mengikuti pelatihan/ pendidikan	13	PNS yang mengikuti pelatihan/ pendidikan	5	PNS yang mengikuti pelatihan/ pendidikan	1,25	2,75	PNS yang mengikuti pelatihan/ pendidikan		

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah 2021-2026) Tahun 2024		Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2023		Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan Tahun lalu 2023					Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2024)		Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
			K		K		Target Renja Perangkat Daerah tahun (2023)		Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun (2024)		Tingkat Realisasi (%)	9=7/6		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4		5		6		7		8 = (7/6)	9=7/6		10 = (5+7+9)	11=10/4
2.03 . 2.03.1 . 05 . 22	Studi Lapangan Dalam Negeri	Jumlah PNS dan Gapoktan Mengikuti Studi Lapangan	0	Orang	0	Orang		Orang	0	Orang	0	0	Orang		
												0			
2.03 . 2.03.1 . 06	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Persentase jumlah Realisasi Anggaran dengan jumlah pagu anggaran belanja SKPD													
2.03 . 2.03.1 . 06 . 01	Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Jumlah realisasi Indikator Kinerja SKPD yang mencapai sasaran	2	Dokumen	2	Dokumen	2	Dokumen	6	Dokumen	1,5		Dokumen		
2.03 . 2.03.1 . 06 . 02	Penyusunan laporan keuangan semesteran	Jumlah Realisasi Keuangan semester I SKPD	1	Dokumen	1	Dokumen	1	Dokumen	3	Dokumen	0,75	0	Dokumen		
2.03 . 2.03.1 . 06 . 04	Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun	Jumlah Realisasi Keuangan SKPD	1	Dokumen Keuangan Akhir Tahun	1	Dokumen Keuangan Akhir Tahun	1	Dokumen Keuangan Akhir Tahun	3	Dokumen Keuangan Akhir Tahun	0,75		Dokumen Keuangan Akhir Tahun		
2.03 . 2.03.1 . 08	Program Peningkatan Pengembangan Pengelolaan Aset/Barang Daerah	Persentase jumlah Unit Aset yg di pakai dengan jumlah unit aset yg tersedia di SKPD										0			
2.03 . 2.03.1 . 08 . 01	Pengelolaan Inventaris Barang Daerah	Jumlah Inventaris Barang Milik Daerah	1	Dokumen dan Laporan	1	Dokumen dan Laporan	1	Dokumen dan Laporan	3	Dokumen dan Laporan	0,75		Dokumen dan Laporan		
1.21 . 1.21.01.01 . 21	Program Agribisnis Pertanian dan Keamanan Pangan	Persentase Jumlah sampel pangan yg terindikasi dengan jumlah sampel pangan yg diambil										1,25			
2.03 . 2.03.1 . 15 . 01	Pengembangan mutu dan keamanan produk pangan dan segar dan olahan	Jumlah sampel Mutu keamanan pangan segar dan olahan yang diteliti	25	unit sampel pangan	25	unit sampel pangan	25	unit sampel pangan	75	unit sampel pangan	18,75	0	unit sampel pangan		
2.03 . 2.03.1 . 15 . 02	Fasilitasi otoritas kompeten keamanan pangan daerah (OKKPD) dan pengawasan penanganan keamanan pangan segar	Jumlah yg masuk prima tiga Pengawasan Keamanan Pangan segar	0	Jumlah Petani/Kelompok Tani yg masuk prima tiga	0	Jumlah Petani/Kelompok Tani yg masuk prima tiga	5	Jumlah Petani/Kelompok Tani yg masuk prima tiga	0	Jumlah Petani/Kelompok Tani yg masuk prima tiga	0		Jumlah Petani/Kelompok Tani yg masuk prima tiga		
1.21 . 1.21.01.01 . 21.03	Pemberdayaan Pengembangan Kelompok Produk Pangan Lokal/Industri Pangan Lokal	Jumlah Pemberdayaan pengembangan kelompok produk pangan lokal/industri pangan lokal													
2.03 . 2.03.1 . 15 . 04	Sosialisasi keamanan pangan pada anak SD/MI	Jumlah peserta Sosialisasi Keamanan bagi anak SD/MI	0	Peserta	0	Peserta	100	Peserta	300	Peserta	75	1,5	Peserta		

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah 2021-2026) Tahun 2024		Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2023		Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan Tahun lalu 2023					Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2024)		Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
			K		K		Target Renja Perangkat Daerah tahun (2023)		Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun (2024)		Tingkat Realisasi (%)	9=7/6		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4		5		6		7		8 = (7/6)	9=7/6		10 = (5+7+9)	11=10/4
1.21 . 1.21.01.01 . 21.05	Sosialisasi Keamanan Pangan Bagi Produsen/Konsumen Pangan	Jumlah peserta sosialisasi keamanan pangan bagi produsen/konsumen pangan										0,75			
2.03 . 2.03.1 . 15 . 35	Pengemb. Sarana dan Prasarana Lab. Keamanan Pangan Segar	Jumlah sarana dan prasarana laboratorium	5	unit	5	unit	5	unit	15	unit	3,75	0,75	unit		
2.03 . 2.03.1 . 15 . 36	Pelatihan/Workshop Pengambilan Sampel dan Analisis Keamanan Pangan Segar	Jumlah Pelatihan/Workshop Pengambilan Sampel dan Analisis Keamanan Pangan Segar	0	Peserta	0	Peserta	45	Peserta	120	Peserta	30,00		Peserta		
2.03 . 2.03.1 . 15 . 37	Promosi dan Publikasi Keamanan Pangan Segar	Jumlah Promosi dan Publikasi Keamanan Pangan Segar	0	unit	0	unit	3	unit	14	unit	3,5		unit		
												0,75			
2.03 . 2.03.1 . 16	Program Kerawanan dan Kewaspadaan Pangan	Persentase Jumlah desa ditangani sesuai yg berlaku dengn desa terindikasi rawan/Kerentanan Pangan													
2.03 . 2.03.1 . 16 . 05	Pengembangan Protien Pangan hewani lokasi Demapan	Jumlah pengembangan protein hewani di desa mandiri pangan	2	Unit Demapan	2	Unit Demapan	35	Unit Demapan	39	Unit Demapan	9,75		Unit Demapan		
2.03 . 2.03.1 . 16 . 18	Pembinaan dan Pengembangan Desa Mandiri Pangan	Jumlah pengembangan desa mandiri pangan	1	Unit Demapan	1	Unit Demapan	1	Unit Demapan	3	Unit Demapan	0,75	18,75	Unit Demapan		
2.03 . 2.03.1 . 16 . 19	Analisis dan Penyusunan Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan (FSVA)	Jumlah laporan analisis dan peta ketahanan dan kerentanan pangan (FSVA)	1	Laporan Dokumen FSVA	1	Laporan Dokumen FSVA	1	Laporan Dokumen FSVA	3	Laporan Dokumen FSVA	0,75	0	Laporan Dokumen FSVA		
2.03 . 2.03.1 . 16 . 20	Analisis dan Penyusunan Peta Situasi Pangan dan Gizi	Jumlah laporan analisis dan peta situasi pangan dan gizi (SKPG)	1	Laporan Dokumen SKPG	1	Laporan Dokumen SKPG	1	Laporan Dokumen SKPG	3	Laporan Dokumen SKPG	0,75		Laporan Dokumen SKPG		
1.21 . 1.21.01.01 . 22.21	Intervensi PDRP	Jumlah bansos Intervensi PDRP yang tersalur							0			75			
2.03 . 2.03.1 . 16 . 22	Identifikasi, Investigasi dan Pemantauan Daerah Rawan Pangan	Jumlah laporan identifikasi investigasi dan pemantauan daerah rawan pangan	1	Laporan Kegiatan	1	Laporan Kegiatan	1	Laporan Kegiatan	3	Laporan Kegiatan	0,75		Laporan Kegiatan		
2.03 . 2.03.1 . 16 . 23	Pembinaan Demapan Tahun 2006-2012	Jumlah pembinaan desa mandiri pangan tahun 2006-2012	20	Demapan	20	Demapan	20	Demapan	60	Demapan	15	3,75	Demapan		
												30,00			
2.03 . 2.03.1 . 17	Program Good Governance	Persentase Jumlah Kegiatan pada SKPD dengan jumlah kegiatan pada DPA-SKPD tahun berjalan										3,5			
2.03 . 2.03.1 . 17 . 01	Kelembagaan DKP Provinsi	Jumlah Rapat Koordinasi Pangan tahun berjalan	0	rapat DKP	0	rapat DKP	6	rapat DKP	18	rapat DKP	4,5		rapat DKP		

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah 2021-2026) Tahun 2024		Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2023		Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan Tahun lalu 2023					Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2024)		Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
			K		K		K		K		Tingkat Realisasi (%)	K		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4		5		6		7		8 = (7/6)	9=7/6		10 = (5+7+9)	11=10/4
2.03 . 2.03.1 . 17 . 03	Penyusunan Program dan Kegiatan	Jumlah penyusunan dokumen perencanaan dan penyelenggaraan Musrenbangtan Tingkat Provinsi	2	dokumen perencanaan	2	dokumen perencanaan	2	dokumen perencanaan	6	dokumen perencanaan	1,5		dokumen perencanaan		
2.03 . 2.03.1 . 17 . 05	Penyusunan data base ketahanan pangan	Jumlah laporan dan database tahun berjalan	1	dokumen data	1	dokumen data	1	dokumen data	3	dokumen data	0,75	9,75	dokumen data		
2.03 . 2.03.1 . 17 . 06	Evaluasi dan monitoring	Jumlah laporan evaluasi badan tahun berjalan	0	dokumen pelapran	0	dokumen pelapran	1	dokumen pelapran	3	dokumen pelapran	0,75	0,75	dokumen pelapran		
2.03 . 2.03.1 . 17 . 08	Fasilitasi Satlak SPI dan SPM Ketahanan Pangan	Jumlah Laporan SPI dan SPM Ketahanan Pangan	2	dokumen pelaporan	2	dokumen pelaporan	2	dokumen pelaporan	6	dokumen pelaporan	1,5	0,75	dokumen pelaporan		
2.03 . 2.03.1 . 17 . 17	Rapat Kerja Teknis Ketahanan Pangan dan Penyuluhan	Jumlah peserta rapat teknis yang hadir	35	peserta	35	peserta	35	peserta	210	peserta	52,5	0,75	peserta		
2.03 . 2.03.1 . 17 . 18	Musyawarah perencanaan pembangunan pertanian	Jumlah peserta yang hadir Musrenbangtan	00	Dokumen laporan musrenbangtan	00	Dokumen laporan musrenbangtan	70	Dokumen laporan musrenbangtan	3	Dokumen laporan musrenbangtan	0,75		Dokumen laporan musrenbangtan		
												0,75			
1.21 . 1.21.01.01 . 18	Program Pengembangan dan Pemberdayaan Lumbung Pangan Masyarakat	Persentase Jumlah Lumbung Pangan dengan Jumlah Desa yang ada										15			
1.21 . 1.21.01.01 . 18.01	Pengembangan Fisik Lumbung Pangan Desa	Jumlah fisik lumbung pangan desa yang terbangun													
1.21 . 1.21.01.01 . 18.02	Pemberdayaan Lumbung Pangan Desa	Jumlah pengisian lumbung pangan desa yang terbangun													
2.03 . 2.03.1 . 18 . 03	Pembinaan dan Kemandirian Lumbung Pangan	Jumlah kelompok lumbung yang mandiri di kab/kota	12	kelompok lumbung pangan mandiri	12	kelompok lumbung pangan mandiri	12	kelompok lumbung pangan mandiri	32	kelompok lumbung pangan mandiri	8	4,5	kelompok lumbung pangan mandiri		
1.21 . 1.21.01.01 . 18.04	Sosialisasi dan Pelatihan Manajerial Pengelolaan Lumbung Pangan	Jumlah anggota/pengurus lumbung pangan yang mengikuti sosialisasi/pelatihan pengelola lumbung pangan										1,5			
2.03 . 2.03.1 . 18 . 05	Pengembangan lembaga distribusi pangan masyarakat	Jumlah pembinaan kelompok lembaga distribusi pangan (LDPM)	9	Kelompok LDPM	9	Kelompok LDPM	9	Kelompok LDPM	45	Kelompok LDPM	11,25	0,75	Kelompok LDPM		
2.03 . 2.03.1 . 18 . 06	Pengembangan Cadangan Pangan Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah	Jumlah cadangan pangan provinsi dan pembinaan cadangan pangan pemerintah provinsi	0	Kg Cadangan Pangan Pemerintah	0	Kg Cadangan Pangan Pemerintah	2.500	Kg Cadangan Pangan Pemerintah	20.050	Kg Cadangan Pangan Pemerintah	5.012,50	0,75	Kg Cadangan Pangan Pemerintah		
2.03 . 2.03.1 . 22 . 01	Pengembangan Usaha Pangan Masyarakat (PUPM) dan Toko Tani Indonesia (TTI)	Jumlah Usaha Masyarakat (PUPM) dan (TTI)	5	Gapoktan	5	Gapoktan	5	Gapoktan	15	Gapoktan	3,75	1,5	Gapoktan		

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah 2021-2026) Tahun 2024		Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2023		Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan Tahun lalu 2023					Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2024)		Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
			K		K		K		K		K		K		10 = (5+7+9)
1	2	3	4		5		6		7		8 = (7/6)	9=7/6			
												52,5			
1.21 . 1.21.01.01 . 19	Program Ketahanan Pangan dan Gizi Keluarga	Persentase Jumlah Rumah Tangga dengan jumlah Kelompok wanita tani yg pemanfaatan pekarangan										0,75			
1.21 . 1.21.01.01 .19.01	Pemanfaatan Lahan Pekarangan Untuk Ketahanan Pangan dan Gizi Keluarga	jumlah Kelompok Wanita Pemanfaat lahan pekarangan	2	Unit Percontohan Berbasis P2KP	2	Unit Percontohan Berbasis P2KP	2	Unit Percontohan Berbasis P2KP	10	Unit Percontohan Berbasis P2KP	2,5		Unit Percontohan Berbasis P2KP		
1.21 . 1.21.01.01 . 19.02	Sosialisasi Diversifikasi Pangan bagi Ibu-ibu Kelompok Tani dan PKK	Jumlah peserta sosialisasi diversifikasi pangan (ibu-ibu kelompk tani/PKK)	35	Orang Peserta	35	Orang Peserta	35	Orang Peserta	79	Orang Peserta	19,75		Orang Peserta		
2.03 . 2.03.1 . 20	Program Peningkatan Ketahanan Pangan Kalteng Sejahtera	Persentase pertumbuhan produksi pangan daerah													
2.03 . 2.03.1 . 20 . 08	Ekspose dan Promosi Pembangunan Ketahanan Pangan Daerah	Jumlah Ekspose dan Promosi	0	Jumlah Ekspose dan Promosi	0	Jumlah Ekspose dan Promosi	4	Jumlah Ekspose dan Promosi	18	Jumlah Ekspose dan Promosi	4,5	8	Jumlah Ekspose dan Promosi		
2.03 . 2.03.1 . 21	Program Peningkatan Ketahanan Pangan (pertanian/perkebunan)	Persentase Jumlah Ketersediaan Pangan Pokok (padi) dengan jumlah penduduk										11,25			
2.03 . 2.03.1 . 21 . 49	Penyiapan dan Penetapan Sasaran Produksi Pangan Daerah (TPH, perkebunan, peternakan dan perikanan)	Jumlah dokumen Penetapan Sasaran Produksi Pangan daerah (TPH,Bun,Nak, lkan)	1	Laporan	1	Laporan	1	laporan	3	Laporan	0,75	5.012,50	laporan		
2.03 . 2.03.1 . 21 . 53	Pemahaman dan Analisis Tren Harga Pangan Pokok	Jumlah dokumen laporan pemntauan analisis tren harga pangan pokok	1	laporan	1	laporan	1	laporan	3	laporan	0,75	3,75	laporan		
2.01 . 1.21.01.01 . 16.55	Gerakan Tanam, Tebar dan Pelihara untuk Ketahanan Pangan dan Gizi Keluarga	Jumlah Kelompok Wanita Gerakan Tanam, Tebar dan Pelihara Untuk Ketahanan Pangan dan Gizi Keluarga		laporan		laporan		laporan		laporan			laporan		
2.03 . 2.03.1 . 21 . 56	Lomba Cipta Menu 3 B Tingkat Provinsi/ Nasional	Jumlah pemenang lomba Cipta Menu 3B Tingkat Provinis/Nasional	0	Pemenang	0	Pemenang	9	Pemenang	27	Pemenang	6,75		Pemenang		
2.03 . 2.03.1 . 21 . 57	Promosi Percepatan Diversifikasi Pangan Masyarakat/ P2KP	Jumlah Kegiatan Promosi Diversifikasi Pangan Masyarakat/P2KP	0	Unit Promosi	0	Unit Promosi	1	Unit Promosi	3	Unit Promosi	0,75	2,5	Unit Promosi		
2.03 . 2.03.1 . 21 . 58	Analisis Pola Pangan Harapan	jumlah Dokumen Laporan Terlaksananya Analisis Pola Pangan Harapan	1	laporan analisis PPH	1	laporan analisis PPH	1	laporan analisis PPH	3	laporan analisis PPH	0,75	19,75	laporan analisis PPH		

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah 2021-2026) Tahun 2024		Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2023		Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan Tahun lalu 2023					Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2024)		Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
			K		K		Target Renja Perangkat Daerah tahun (2023)		Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun (2024)		Tingkat Realisasi (%)	9=7/6		10 = (5+7+9)	11=10/4
1	2	3	4		5		6		7		8 = (7/6)	9=7/6		10 = (5+7+9)	11=10/4
2.03 . 2.03.1 . 21 . 60	Pemantauan dan Analisis Akses Pangan	Jumlah Dokumen pemantuan Analisis Akses Pangan	1	Laporan	1	Laporan	1	Laporan	4	Laporan	1		Laporan		
2.03 . 2.03.1 . 21 . 61	Analisis Neraca Bahan Makanan (NBM) dan PPH Ketersediaan	jumlah Dokumen Laporan Analisis Neraca Bahan Makanan (NBM) dan PPH Ketersediaan	1	Laporan Analisis	1	Laporan Analisis	1	Laporan Analisis	3	Laporan Analisis	0,75		Laporan Analisis		
2.03 . 2.03.1 . 21 . 62	Pembinaan dan Pemantauan Distribusi Pangan	jumlah daerah Pembinaan dan Pemantuan distribusi pangan	1	Laporan	1	Laporan	1	Laporan	0	Laporan	0	4,5	Laporan		
2.03 . 2.03.1 . 21 . 63	Analisis Ketersediaan Pangan Pokok	jumlah Dokumen laporan Analisis Ketersediaan Pangan Pokok	1	Laporan Analisis	1	Laporan Analisis	1	Laporan Analisis	3	Laporan Analisis	0,75		Laporan Analisis		
2.01 . 1.21.01.01 . 16.66	Pelatihan Analisis Pola Konsumsi Pangan	Jumlah Pelatihan Analisis Pola Konsumsi Pangan		Pelatihan		Pelatihan		Pelatihan	0	Pelatihan	0		Pelatihan		

Rencana Program, Kegiatan dan Pendanaan Perangkat Daerah Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Kalimantan Tengah

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan											Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi	
						2022		2023		2024		2025		2026		Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra			
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target			Rp
Meningkatnya Kapasitas Ketahanan Daerah Serta Antisipasi Penanganan Terhadap Bencana Kerawanan Pangan dan Pandemi				Kontribusi Penguatan Cadangan pangan daerah (Persentase)	5,05 %	50,5 %		60,5 %		70,5 %		80,5 %		90,5 %		90,5 %			
	Terwujudnya Pemantapan Ketersediaan Pangan, Distribusi dan Akses Pangan			Ketersediaan pangan utama (surplus beras dalam ton)	337665 Ton	32000 Ton		34167 Ton		36334 Ton		38500 Ton		40668 Ton		40668 Ton			
		2.09.02	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA EKONOMI UNTUK KEDAULATAN DAN KEMANDIRIAN PANGAN	Ketersediaan pangan utama (surplus beras dalam ton)	337665 Ton	32000 Ton	15,000,000	34167 Ton	15,300,000	36334 Ton	15,607,500	38500 Ton	17,475,000	40668 Ton	18,225,000	40668 Ton	0		
		2.09.02.1.01	Penyediaan Infrastruktur dan Seluruh Pendukung Kemandirian Pangan pada berbagai Sektor sesuai Kewenangan Daerah Provinsi	Jumlah sasaran luas tanam, luas panen, produktivitas dan produksi tanaman pangan, hortikultura, produksi perternakan, luas areal dan produksi perkebunan dan produksi perikanan provinsi kalimantan tengah	337665 Ton	32000 Ton	15,000,000	34167 Ton	15,300,000	36334 Ton	15,607,500	38500 Ton	17,475,000	40668 Ton	18,225,000	40668 Ton	0	Dinas Ketahanan Pangan	

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi		
						2022		2023		2024		2025		2026				Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra	
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			Target	Rp
	Terwujudnya Diversifikasi Pangan			Analisis skor PPH Provinsi Kalimantan Tengah	83,8 %	88,3 %		90,4 %		91 %		91 %		92 %		92 %			
		2.09.03	PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT	Kontribusi Penguatan Cadangan Pangan Daerah (%)	5,05 %	50,5 %	874,845,000	60,5 %	892,341,900	70,5 %	910,276,223	80,5 %	1,019,194,425	90,5 %	1,062,936,675	90,5 %	0		
				Skor Pola Pangan Harapan (PPH) Konsumsi (%)	83,8 %	88,3 %	225,000,000	90,4 %	229,500,000	91 %	234,112,500	91 %	262,125,000	92 %	273,375,000	92 %	0		
		2.09.03.1.01	Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan kebutuhan Daerah Provinsi dalam rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan	Jumlah laporan analisis Neraca Bahan Makanan (NBM) dan PPH ketersediaan	1 Dokumen	1 Dokumen	25,000,000	1 Dokumen	26,000,000	1 Dokumen	27,000,000	1 Dokumen	45,000,000	1 Dokumen	48,000,000	5 Dokumen	0	Dinas Ketahanan Pangan	
		2.09.03.1.01	Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan kebutuhan Daerah Provinsi dalam rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan	Jumlah Kelompok Lembaga distribusi pangan	4 Kelompok	7 Kelompok	30,000,000	11 Kelompok	31,000,000	11 Kelompok	32,000,000	11 Kelompok	45,000,000	11 Kelompok	52,000,000	11 Kelompok	0	Dinas Ketahanan Pangan	

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi		
						2022		2023		2024		2025		2026				Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra	
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			Target	Rp
		2.09.03.1.01	Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan kebutuhan Daerah Provinsi dalam rangka Stabilitas Pasokan dan Harga Pangan	Jumlah kelompok ibu menyusui dan Ibu hamil yang mengikuti kegiatan dan jumlah kelompok wanita pangan lokal	0 Kelompok	3 Kelompok	85,000,000	3 Kelompok	87,000,000	3 Kelompok	88,000,000	3 Kelompok	95,000,000	3 Kelompok	98,000,000	15 Kelompok	0	Dinas Ketahanan Pangan	
		2.09.03.1.01	Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan kebutuhan Daerah Provinsi dalam rangka Stabilitas Pasokan dan Harga Pangan	Jumlah laporan pemantauan Analisis Akses Pangan dan laporan pemantauan distribusi pangan	2 Laporan	2 Laporan	45,000,000	2 Laporan	47,000,000	2 Laporan	48,000,000	2 Laporan	55,000,000	2 Laporan	58,000,000	10 Laporan	0	Dinas Ketahanan Pangan	
		2.09.03.1.01	Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan kebutuhan Daerah Provinsi dalam rangka Stabilitas Pasokan dan Harga Pangan	jumlah Dokumen Laporan pemantauan Analisis Tren Harga Pangan Pokok	1 Dokumen	1 Dokumen	70,000,000	1 Dokumen	72,000,000	1 Dokumen	73,000,000	1 Dokumen	80,000,000	1 Dokumen	85,000,000	5 Dokumen	0	Dinas Ketahanan Pangan	
		2.09.03.1.02	Pengelolaan dan Keseimbangan Cadangan Pangan Provinsi	Jumlah Kelompok Lumbung yang mandiri	10 Kelompok	10 Kelompok	15,000,000	12 Kelompok	17,000,000	12 Kelompok	18,000,000	12 Kelompok	25,000,000	12 Kelompok	30,000,000	58 Kelompok	0	Dinas Ketahanan Pangan	

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan											Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi	
						2022		2023		2024		2025		2026		Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra			
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target			Rp
		2.09.03.1.02	Pengelolaan dan Keseimbangan Cadangan Pangan Provinsi	Dokumen sasaran produksi	1 Dokumen	1 Dokumen 15,000,000	1 Dokumen 17,000,000	1 Dokumen 18,000,000	1 Dokumen 25,000,000	1 Dokumen 30,000,000	5 Dokumen 0		Dinas Ketahanan Pangan						
		2.09.03.1.02	Pengelolaan dan Keseimbangan Cadangan Pangan Provinsi	Pengembangan cadangan pangan pemerintah provinsi	783 Kg	783 Kg 589,845,000	783 Kg 595,341,900	783 Kg 606,276,223	783 Kg 649,194,425	783 Kg 661,936,675	783 Kg 0		Dinas Ketahanan Pangan						
		2.09.03.1.04	Promosi Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi melalui Media Provinsi	Jumlah kegiatan Ekspose dan Promosi Pembangunan Ketahanan Pangan	1 Kegiatan	1 Kegiatan 80,000,000	1 Kegiatan 81,500,000	1 Kegiatan 83,112,500	1 Kegiatan 92,125,000	1 Kegiatan 95,375,000	5 Kegiatan 0		Dinas Ketahanan Pangan						
		2.09.03.1.04	Promosi Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi melalui Media Provinsi	Jumlah Peserta kegiatan sosialisasi diversifikasi pangan	30 Peserta	0 Peserta 125,000,000	3 Peserta 126,500,000	3 Peserta 128,000,000	3 Peserta 140,000,000	3 Peserta 145,000,000	12 Peserta 0		Dinas Ketahanan Pangan						
		2.09.03.1.04	Promosi Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi melalui Media Provinsi	jumlah Dokumen Laporan Terlaksananya Analisis Pola Pangan Harapan	1 Dokumen	1 Dokumen 20,000,000	1 Dokumen 21,500,000	1 Dokumen 23,000,000	1 Dokumen 30,000,000	1 Dokumen 33,000,000	5 Dokumen 0		Dinas Ketahanan Pangan						
	Terwujudnya Keamanan Pangan Segar			Persentase jumlah sampel pangan segar yang aman dengan jumlah sampel yang diambil	88,5 %	90 %	90,5 %	91 %	91,5 %	92 %	92 %								

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi		
						2022		2023		2024		2025		2026				Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra	
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			Target	Rp
		2.09.05	PROGRAM PENGAWASAN KEAMANA N PANGAN	Persentase sampel pangan segar yang aman dengan jumlah sampel yang diambil (%)	88 %	90 %	90,000,000	90,5 %	91,800,000	91 %	93,645,000	91,5 %	104,850,000	92 %	109,350,000	92 %	0		
		2.09.05.1.01	Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Distribusi Lintas Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah Peserta Pelatihan Petugas Pengambil Contoh	30 Peserta	30 Peserta	20,000,000	35 Peserta	20,400,000	35 Peserta	20,845,000	35 Peserta	23,200,000	35 Peserta	24,150,000	200 Peserta	0	Dinas Ketahanan Pangan	
		2.09.05.1.01	Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Distribusi Lintas Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah sertifikasi prima keamanan pangan segar	4 Sertifikasi	4 Sertifikasi	20,000,000	4 Sertifikasi	20,400,000	4 Sertifikasi	20,800,000	4 Sertifikasi	23,200,000	4 Sertifikasi	24,100,000	20 Sertifikasi	0	Dinas Ketahanan Pangan	
		2.09.05.1.01	Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Distribusi Lintas Daerah Kabupaten/ Kota	jumlah registrasi pemberdayaan kelompok pangan lokal	2 Kelompok	2 Kelompok	20,000,000	2 Kelompok	20,400,000	2 Kelompok	20,800,000	2 Kelompok	23,200,000	2 Kelompok	24,100,000	2 Kelompok	0	Dinas Ketahanan Pangan	
		2.09.05.1.01	Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Distribusi Lintas Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah sampel mutu keamanan pangan segar dan olahan yang diteliti	20 Jumlah Sampel	20 Jumlah Sampel	15,000,000	25 Jumlah Sampel	15,300,000	25 Jumlah Sampel	15,600,000	25 Jumlah Sampel	17,750,000	25 Jumlah Sampel	18,500,000	120 Jumlah Sampel	0	Dinas Ketahanan Pangan	
		2.09.05.1.01	Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Distribusi Lintas Daerah Kabupaten/ Kota	jumlah sarana penunjang laboratorium	2 Unit	2 Unit	15,000,000	2 Unit	15,300,000	2 Unit	15,600,000	2 Unit	17,500,000	2 Unit	18,500,000	2 Unit	0	Dinas Ketahanan Pangan	

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Output) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi		
						2022		2023		2024		2025		2026				Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra	
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			Target	Rp
	Terwujudnya Penanganan Daerah Rawan Pangan			Penanganan daerah rawan pangan (%)	28,57 %	2 %		2 %		2 %		2 %		2 %					
		2.09.04	PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN	Penanganan daerah rawan pangan (%)	28,57 %	2 %	50,000,000	2 %	51,000,000	2 %	52,025,000	2 %	58,250,000	2 %	60,750,000	2 %	0		
		2.09.04.1.01	Penyusunan Peta Kerentanan dan Ketahanan Pangan kewenangan Provinsi	Jumlah laporan analisis dan peta (FSVA) dan situasi pangan dan gizi (SKPG)	2 Dokumen	2 Dokumen	35,000,000	2 Dokumen	35,500,000	2 Dokumen	36,025,000	2 Dokumen	39,250,000	2 Dokumen	40,750,000	10 Dokumen	0	Dinas Ketahanan Pangan	
		2.09.04.1.01	Penyusunan Peta Kerentanan dan Ketahanan Pangan kewenangan Provinsi	Jumlah Laporan identifikasi, investigasi, dan Pemantauan daerah Rawan Pangan	1 Laporan	1 Laporan	15,000,000	1 Laporan	15,500,000	1 Laporan	16,000,000	1 Laporan	19,000,000	1 Laporan	20,000,000	5 Laporan	0	Dinas Ketahanan Pangan	
Meningkatnya tatakelola pemerintah yang akuntabel				Nilai SAKIP	B Predikat	B Predikat		BB Predikat		BB Predikat		A Predikat		A Predikat		A Predikat			
Meningkatnya tatakelola pemerintah yang akuntabel				Nilai SAKIP	B Predikat	B Predikat		BB Predikat		BB Predikat		A Predikat		A Predikat		A Predikat			
		X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Presentase Keterlaksanaan	100 %	100 %	8,087,690,000	100 %	8,249,443,800	100 %	8,415,241,445	100 %	9,422,158,850	100 %	9,826,543,350	100 %	0		
		X.XX.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen, Perencanaan, Pengendalian dan evaluasi kegiatan	12 Dokumen	12 Dokumen	235,000,000	12 Dokumen	265,000,000	12 Dokumen	295,000,000	12 Dokumen	415,000,000	12 Dokumen	465,000,000	60 Dokumen	0	Dinas Ketahanan Pangan	
		X.XX.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	ASN penerima gaji dan tunjangan	52 Orang	52 Orang	6,307,810,000	52 Orang	6,341,993,800	52 Orang	6,376,691,445	52 Orang	6,684,858,850	52 Orang	6,764,543,350	52 Orang	0	Dinas Ketahanan Pangan	

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Output) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan											Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi	
						2022		2023		2024		2025		2026		Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra			
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target			Rp
		X.XX.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah laporan realisasi keuangan SKPD	1 Dokumen Laporan	1 Dokumen Laporan	15,000,000	1 Dokumen Laporan	18,000,000	1 Dokumen Laporan	22,000,000	1 Dokumen Laporan	30,000,000	1 Dokumen Laporan	40,000,000	5 Dokumen Laporan	0	Dinas Ketahanan Pangan	
		X.XX.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah laporan realisasi keuangan per semester SKPD	1 Dokumen Laporan	1 Dokumen Laporan	15,000,000	1 Dokumen Laporan	18,000,000	1 Dokumen Laporan	22,000,000	1 Dokumen Laporan	30,000,000	1 Dokumen Laporan	40,000,000	5 Dokumen Laporan	0	Dinas Ketahanan Pangan	
		X.XX.01.1.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah laporan aset barang daerah	1 Dokumen Laporan	1 Dokumen Laporan	26,000,000	1 Dokumen Laporan	28,000,000	1 Dokumen Laporan	30,000,000	1 Dokumen Laporan	50,000,000	1 Dokumen Laporan	60,000,000	5 Dokumen Laporan	0	Dinas Ketahanan Pangan	
		X.XX.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah PNS yang mengikuti pendidikan dan pelatihan formal	1 Orang	1 Orang	16,000,000	2 Orang	20,000,000	2 Orang	25,000,000	3 Orang	40,000,000	4 Orang	50,000,000	17 Orang	0	Dinas Ketahanan Pangan	
		X.XX.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase kinerja internal yang terlayani dengan baik	100 %	100 %	375,000,000	100 %	408,000,000	100 %	442,000,000	100 %	590,000,000	100 %	685,000,000	100 %	0	Dinas Ketahanan Pangan	
		X.XX.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah pengadaan/pemeliharaan perlengkapan kerja gedung kantor	5 Unit	5 Unit	26,000,000	5 Unit	30,000,000	5 Unit	35,000,000	5 Unit	200,000,000	5 Unit	220,000,000	25 Unit	0	Dinas Ketahanan Pangan	
		X.XX.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase kinerja internal yang terlayani dengan baik	100 %	100 %	905,880,000	100 %	925,450,000	100 %	947,550,000	100 %	1,042,300,000	100 %	1,112,000,000	100 %	0	Dinas Ketahanan Pangan	
		X.XX.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah pemeliharaan mesin Roda 4 dan Roda 2 dan mesin lainnya	48 Unit Kendaraan R4	48 Unit Kendaraan R2 & R4	166,000,000	48 Unit Kendaraan R2 & R4	195,000,000	48 Unit Kendaraan R2 & R4	220,000,000	48 Unit Kendaraan R2 & R4	340,000,000	48 Unit Kendaraan R2 & R4	390,000,000	240 Unit Kendaraan R2 & R4	0	Dinas Ketahanan Pangan	

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Guna mengetahui pencapaian akuntabilitas kinerja pelaksanaan program dan kegiatan Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Kalimantan Tengah sumber dana APBD Provinsi sebagai berikut:

Tabel 2.2. Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Dinas Ketahanan Pangan

No.	Indikator	SPM/ Standar Nasional	IKK	Target Renstra Perangkat Daerah				Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
				2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Jumlah cadangan pangan pokok pemerintah Provinsi	200 ton		47,5 ton	50,5 ton	60,5 ton	70,5 ton	11,3 ton	55,57 ton	80,8 ton	80,8 ton	CPP Prov. Berdasarakan SPM
	Jumlah cadangan pangan pokok pemerintah Provinsi		260 ton	47,5 ton	50,5 ton	60,5 ton	70,5 ton	11,3 ton	55,57 ton	80,8 ton	80,8 ton	CPP Prov.
2	Koefisien varian harga beras /fluktuasi harga beras		≤ 5%	≤ 5%	≤ 5%	≤ 5%	≤ 5%	≤ 1,18%	≤ 1,79%	≤ 5%	≤ 5%	Gejolak Harga Beras di Kaliteng rata-rata Stabil
3	Analisis Neraca Bahan Makanan (NBM)											
	Angka Ketersediaan Energi (AKE)		3.000	2.400	2.575	2.625	2.675	-	3.071	2.575	2.575	Kkal/ Kapita/ Hari
	Angka Ketersediaan Protein (AKP)		63	63	63	63	63	-	102,53	63	63	Gram/ Kapita/ Hari
4	Skor PPH provinsi Kalimantan Tengah		83,8	88,5	88,3	90,4	91	82,8	87,2	90,4	91	Dok PPH
5	Jumlah Kelompok Penganekaragaman Konsumsi (P2KP)/ Diversifikasi Konsumsi Pangan		30 kel	83 kel	20 kel	22 kel	24 kel	83 kel	30 kel	22 kel	24 kel	Adanya Daerah Stunting/ Kategori 1, 2, 3, 4, 5
6	Persentase jumlah sampel pangan segar yang aman dengan jumlah sampel yang diambil		88%	88,5%	90%	90,5%	91%	96,15%	90%	90,5%	91%	Aman masyarakat mengkonsumsi Pangan
7	Jumlah pelaku usaha pangan asal tumbuhan		245 pelaku	245 pelaku	250 pelaku	260 pelaku	265 pelaku	245 pelaku	250 pelaku	245 pelaku	265 pelaku	Pelaku Usaha PSAT
8	Analisis Kewaspadaan Pangan dan Gizi (SKPG)		≤ 20%	≤ 20%	≤ 20%	≤ 20%	≤ 20%	-	1,47	≤ 20%	≤ 20%	Dok SKPG
9	Analisis Food Security and Vulnerability Atlas (FSVA)		≤ 20%	≤ 20%	≤ 20%	≤ 20%	≤ 20%	-	1,47	≤ 20%	≤ 20%	Dok FSVA

Capaian Kinerja Ketahanan Pangan

Sasaran 1 : Mewujudkan Pemantapan Ketersediaan Pangan, Distribusi dan Akses Pangan

a. Cadangan Pangan Pokok Pemerintah Provinsi

Ketersediaan pangan menjelaskan tentang jumlah bahan pangan yang tersedia di suatu wilayah. Ketersediaan pangan dapat diwujudkan melalui produksi dalam negeri/daerah, pemasukan dari luar negeri/daerah serta cadangan yang dimiliki negeri/daerah yang bersangkutan. Untuk menjaga tingkat ketersediaan pangan di masyarakat maka harus diperhatikan angka kecukupan gizi dan pola pangan harapan, pola panen bulanan komoditas pertanian serta penyediaan pangan menjelang hari besar keagamaan. Untuk itu diperlukan suatu sistem pemantauan ketersediaan pangan secara menyeluruh dan berkelanjutan. Melalui kegiatan *Analisis Ketersediaan Pangan Pokok* maka dapat diketahui surplus/defisit kondisi pangan di wilayah provinsi Kalimantan Tengah pada suatu waktu, sehingga dapat dijadikan acuan dalam perencanaan dan pengambilan kebijakan yang menyangkut ketahanan pangan sehingga menghasilkan suatu informasi yang berguna bagi banyak pihak.

Ketersediaan bahan pangan digunakan untuk mengetahui kebutuhan dan ketersediaan bahan pangan selama setahun, dengan memberikan perhatian khusus untuk kebutuhan dan ketersediaan pada bulan-bulan menjelang HBKN sebagai bahan koordinasi dalam penyusunan kebijakan penyediaan pangan di Kalimantan Tengah.

Tabel 10
Target dan Realisasi Kinerja Cadangan Pangan Pokok Pemerintah Provinsi

Sasaran 1: Mewujudkan Pemantapan Ketersediaan Pangan dan Distribusi dan Akses Pangan							
No	Indikator Kinerja Utama	2021		2022		Capaian s/d 2022 terhadap 2021 (Ton)	Ket. (Menaik/Menurun)
		Target (Ton)	Realisasi (Ton)	Target (Ton)	Realisasi (Ton)		
1	Jumlah cadangan pangan pokok pemerintah Provinsi	80,8	11,31	50,5	55,57	110	Menaik

Jumlah cadangan pangan pokok pemerintah Provinsi pada Tahun 2022 dengan realisasi sebesar 55,57 Ton atau naik sebesar 44,26 Ton dibandingkan dengan realisasi Tahun 2021 sebesar 11,31 Ton.

Jumlah cadangan pangan pokok pemerintah Provinsi pada Tahun 2022 dengan realisasi sebesar 55,57 Ton dibandingkan dengan realisasi Tahun 2021 hanya sebesar 11,31 Ton. Peningkatan signifikan ini terjadi karena adanya perubahan pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran dengan penambahan jumlah pagu anggaran pada Dinas Ketahanan Pangan sebagai kebijakan untuk mengatasi inflasi yang berimbas kepada masyarakat akibat peningkatan harga bahan pangan di Provinsi Kalimantan Tengah.

Permasalahan Cadangan Pangan Pemerintah Provinsi adalah masih belum mencukupi dalam pengadaan cadangan pangan beras untuk memenuhi stock cadangan pangan Pemerintah Provinsi. Cadangan Pangan Pemerintah Provinsi berkurang karena adanya penyaluran cadangan pangan ke beberapa daerah yang terdampak inflasi di wilayah Kalimantan Tengah pada Tahun 2022, pembelian Cadangan Pangan Pemerintah Provinsi perlu dilakukan kembali untuk keseimbangan stok yang tersedia karena bila stok sedikit dari pada pengeluaran cadangan pangan dapat berdampak pada berkurangnya ketahanan pangan pemerintah provinsi dan defisit stok pangan khususnya beras.

Alternatif pemecahan masalah dengan menambah jumlah anggaran pembelian cadangan beras melalui pengadaan cadangan beras sehingga bisa mencukupi permintaan dari kabupaten/kota apabila terjadi inflasi ataupun terjadinya bencana dan dapat mengembalikan keseimbangan jumlah Cadangan Pangan Pemerintah Provinsi.

b. Koefisien Varian Harga Beras/Fluktuasi Harga Beras

Antara Distribusi, harga dan akses pangan sangat berkaitan satu dengan lainnya. Kemampuan akses pangan yang cukup oleh setiap penduduk adalah salah satu prasyarat mutlak bagi terwujudnya ketahanan pangan di tingkat rumah tangga. Ketidakmampuan mengakses pangan merupakan salah satu penyebab utama terjadinya kerawanan pangan. Masalah ini disebabkan oleh ketidakmampuan rumah tangga untuk :

- (a) memperoleh lapangan pekerjaan (mata pencaharian di sektor formal maupun informal dalam cakupan produksi rumah tangga,
- (b) hambatan ekonomi, yaitu *keterbatasan daya beli*,
- (c) ketidakmampuan memperoleh pangan dari sumber lain seperti bantuan pangan karena kesenjangan sosial.

Sistem distribusi produk pangan dari produsen sampai ke konsumen umumnya terdiri dari berbagai tingkatan (rantai) mulai dari pedagang pengumpul, pedagang pasar sampai tingkat pengecer dan masyarakat konsumen. Dalam rangka meningkatkan stabilitas harga maka perlu kiranya dilakukan pemantauan dan analisis harga pangan pokok di tingkat konsumen dengan tujuan stabilisasi harga pangan di Kalimantan Tengah dapat dikendalikan dan sebagai bahan analisis kebijakan pemerintah yang terkait dengan harga pangan pokok masyarakat.

Kondisi ketersediaan pangan berkaitan dengan faktor harga dan pasokan pangan itu sendiri. Harga dan pasokan pangan merupakan indikator-indikator strategis yang saling terkait, yang biasa digunakan untuk mengetahui status distribusi pangan. Terjadinya gejolak harga pangan menunjukkan gejala terganggunya distribusi pangan.

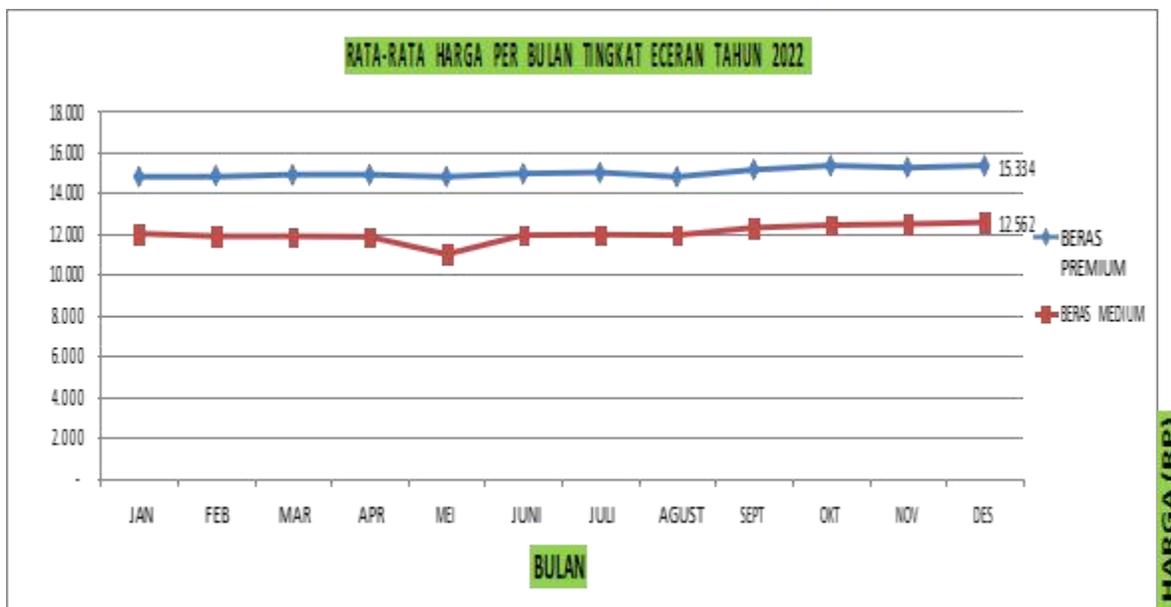
**Tabel 11
Target dan Realisasi Kinerja Koefisien Varian Harga Beras**

Sasaran 1: Mewujudkan Pemantapan Ketersediaan Pangan dan Distribusi dan Akses Pangan							
No	Indikator Kinerja Utama	2021		2022		Capaian s/d 2022 terhadap 2021 (%)	Ket. (Menaik/ Menurun)
		Target (%)	Realisasi (%)	Target (%)	Realisasi (%)		
1	Koefisien varian harga beras / fluktuasi harga beras	≤ 5	1,18	≤ 5	1,79	0,78	Menaik

Kenaikan harga beras secara umum disebabkan permintaan yang meningkat pada saat menjelang dan pelaksanaan ibadah puasa serta hari raya keagamaan. Hasil analisis Coefisien Varian terhadap harga beras untuk Tahun 2022 sebesar 1,79 % yaitu dan Tahun 2021 yaitu sebesar 1,18 % terjadi peningkatan harga pada Tahun 2022, namun Koefisien Varian Harga masih masuk dalam standard yang telah ditetapkan oleh Pemerintah untuk komoditi beras yaitu $\leq 5\%$, kondisi Koefisien Varian Harga pada Tahun 2022 di Kalimantan Tengah menunjukkan bahwa harga masih relatif stabil untuk komoditi beras.

Koefisien Keragaman (CV) adalah simpangan baku dibagi dengan rata-rata. Digunakan untuk menunjukkan fluktuasi harga dalam satu periode. Semakin besar koefisien keragaman, maka data semakin fluktuatif. Penyebab fluktuatif harga disebabkan oleh ketersediaan beras medium baik yang diproduksi oleh daerah sendiri maupun yang didatangkan dari provinsi lain cukup untuk memenuhi kebutuhan masyarakat sepanjang tahun. Disamping itu, sebagian masyarakat di Kalimantan Tengah ada menyukai jenis beras lokal yang diproduksi daerah sendiri.

Grafik III.1
Rata-Rata Harga Per Bulan Tingkat Eceran Tahun 2022



Permasalahan dalam stabilisasi harga pangan pokok adalah:

- Pada Tahun 2022 Koefisien Keragaman (CV) lebih besar dari Tahun 2021 hal ini pengaruh dari kenaikan harga bahan pangan menyebabkan kenaikan inflasi di Provinsi Kalimantan Tengah.
- Beberapa komoditi pangan hasil budidaya di wilayah Provinsi Kalimantan Tengah masih belum mampu untuk memenuhi kebutuhan pangan masyarakat yang disebabkan antara lain adalah karena berbagai keterbatasan penerapan hasil kajian/rekomendasi teknis budidaya spesifikasi lokasi dengan aplikasi lapangan untuk petani pelaku usaha budidaya, teknis

bertani, permodalan, fenomena perubahan iklim, dukungan dan komitmen pihak terkait untuk membangun ketahanan pangan wilayah sampai dengan tingkat rumah tangga.

- Harga pangan strategis menjelang Hari Besar Keagamaan Nasional khususnya menjelang puasa, Hari Raya Idul Fitri dan Hari Raya Natal di kota Palangka Raya pada beberapa komoditas mengalami kenaikan namun masih dalam batas yang wajar, seperti kenaikan bawang merah, cabe merah dan daging sapi. Hal ini dipengaruhi oleh meningkatnya permintaan untuk konsumsi masyarakat saat menjelang puasa, Hari Raya Idul Fitri dan Hari Raya Natal.
- Tahun 2022 komoditas yang mengalami kenaikan menyebabkan tingginya inflasi di Provinsi Kalimantan Tengah akibat pasokan menurun yaitu : beras, minyak goreng, cabai merah keriting, cabai rawit merah, daging sapi, daging ayam ras, telur ayam ras, bawang merah dan bawang putih bonggol mengalami kenaikan yang signifikan menjelang Hari Raya Idul Fitri, sedangkan gula dan tepung terigu kenaikan harga masih dalam batas normal.

Alternatif pemecahan masalah dalam untuk memenuhi kebutuhan pangan pokok terutama komoditi beras masyarakat dan beberapa bahan pangan strategis di Kalimantan Tengah adalah :

- Melakukan monitoring harga, sebaiknya pasokan masuknya barang juga perlu dimonitoring mengingat tingginya ketergantungan Kalimantan Tengah terhadap daerah lain.
- Mendorong kemandirian pangan Kalimantan Tengah melalui program-program kerja dinas/instansi teknis terutama untuk komoditas dengan volatilitas harga yang tinggi seperti cabe merah dan bawang merah.
- Ketersediaan dan pasokan harus dijaga oleh dinas teknis sehingga tidak terjadi kelangkaan yang dapat mempengaruhi perkembangan inflasi. Peningkatan produksi lokal akan membantu ketersediaan komoditas tersebut.
- Distribusi pangan dioptimalkan melalui pengembangan infrastruktur jalan, jembatan dan pelabuhan. Disamping itu, pengaturan-pengaturan tata niaga juga ditujukan untuk mengoptimalkan kecepatan distribusi barang. Dengan demikian *handicap* daerah terkait distribusi barang dapat dikurangi.
- Pemulihan perekonomian pasca masa pandemi Covid-19 perlu melakukan langkah-langkah antisipatif dengan menggalakkan kegiatan intervensi pasar melalui operasi pasar sehingga stabilitas harga dapat terjaga.

c. **Neraca Bahan Makanan (NBM)**

NBM menunjukkan ketersediaan bahan pangan untuk setiap komoditas dan olahannya yang lazim dikonsumsi penduduk berdasarkan sumber penyediaan dan penggunaannya. NBM menyajikan angka rata-rata bahan makanan per komoditas yang tersedia untuk dikonsumsi penduduk dalam kilogram per kapita per tahun (kg/kapita/tahun), serta dalam gram per kapita per hari (gram/kapita/hari). Selanjutnya untuk mengetahui nilai gizi bahan

makanan yang tersedia untuk dikonsumsi tersebut, maka angka ketersediaan bahan makanan per kapita per hari diterjemahkan ke dalam satuan energi, protein, dan lemak.

Neraca Bahan Makanan dibuat dalam analisis neraca bahan makanan dalam bentuk Dokumen Analisis Neraca Bahan Makanan yang di susun berdasarkan data-data konsumsi bahan makanan penduduk di Provinsi Kalimantan Tengah.

Tabel 12
Target dan Realisasi Kinerja Neraca Bahan Makanan (NBM)

Sasaran 1: Mewujudkan Pemantapan Ketersediaan Pangan dan Distribusi dan Akses Pangan							
No	Indikator Kinerja Utama	2021		2022		Capaian s/d 2022 terhadap 2021 (Dokumen)	Ket. (Menaik/ Menurun)
		Target (Dokumen)	Realisasi (Dokumen)	Target (Dokumen)	Realisasi (Dokumen)		
1	Analisis Neraca Bahan Makanan (NBM)	1	1	2.575	3.071	-	-

Permasalahan terbatasnya kemampuan petugas yang memadai dalam pengambilan data lapangan dan penyusun berupa jumlah pangan yang tersedia di pasar untuk dikonsumsi pada kurun waktu tertentu dalam bentuk energi per kg/kapita/hari, protein per gr/kapita/hari dan lemak per gr/kapita/hari.

Alternatif pemecahan masalah diperlukan peningkatan kapasitas petugas dalam pengambilan data lapangan dengan melaksanakan pelatihan dan workshop petugas pengambil data dan penyusun NBM sehingga informasi ketersediaan pangan ini akan semakin akurat.

Sasaran 2: Mewujudkan Diversifikasi Pangan

a. Skor Pola Pangan Harapan Provinsi Kalimantan Tengah

Kualitas konsumsi pangan penduduk ditingkat wilayah (makro) ini dicerminkan dengan skor Pola Pangan Harapan (PPH). Dalam konsep PPH akan diperoleh skor ideal sebesar 100, yang artinya kualitas konsumsi pangan penduduk disebut ideal apabila mempunyai skor PPH sebesar 100. Sedangkan di tingkat keluarga dan individu, asupan makanan sesuai prinsip konsumsi pangan Beragam, Bergizi Seimbang dan Aman (B2SA) untuk memenuhi kebutuhan zat gizi dapat diketahui dengan melakukan penilaian konsumsi pangan, melalui pendekatan penghitungan porsi.

Tabel 13

Target dan Realisasi Kinerja Skor PPH Provinsi Kalimantan Tengah

Sasaran 1: Mewujudkan Pemanjapan Ketersediaan Pangan dan Distribusi dan Akses Pangan							
No	Indikator Kinerja Utama	2021		2022		Capaian s/d 2022 terhadap 2021 (Skor)	Ket. (Menaik/ Menurun)
		Target (Skor)	Realisasi (Skor)	Target (Skor)	Realisasi (Skor)		
1	Skor PPH Provinsi Kalimantan Tengah	94,1	83,8	88,3	87,2	3,4	Menaik

Penetapan PPH bertujuan untuk menghasilkan suatu komposisi norma (standar) pangan untuk memenuhi kebutuhan gizi penduduk, yang mempertimbangkan keseimbangan gizi (*nutritional balance*) berdasarkan cita rasa (*palatability*), daya cerna (*digestability*), daya terima masyarakat (*acceptability*), kuantitas dan kemampuan daya beli (*affordability*). Sedangkan analisa situasi pangan bertujuan untuk mengkaji pola pangan secara regional dengan membandingkan antara ketersediaan (NBM) regional dan Pola Pangan Harapan (PPH) baik PPH Nasional maupun PPH regional.

Analisis Pola Pangan Harapan (PPH) Ketersediaan menggunakan data ketersediaan pangan yang diperoleh dari hasil analisis Neraca Bahan Makanan (NBM) yang telah disusun pada tahun yang sama. Data ketersediaan pangan yang telah dikumpulkan terlebih dahulu dikelompokkan sesuai dengan pengelompokan pada Pola Pangan Harapan (PPH).

Nilai Skor PPH pada Tahun 2022 sebesar 87,2 dan pada Tahun 2021 sebesar 83,8 dari angka tersebut diketahui bahwa Skor PPH naik pada Tahun 2022, yang mengindikasikan bahwa pada Provinsi Kalimantan Tengah memiliki kenaikan keberagaman untuk bahan konsumsi pangan Bergizi Seimbang dan Aman (B2SA) serta terindikasi penyertaan peningkatan kecukupan pangan masyarakat.

Grafik III.2 Perkembangan Skor Pola



PPH

Pentingnya pencapaian skor PPH tersebut juga diamanatkan oleh undang-undang (UU) Nomor 18 tahun 2012 tentang Pangan dan Peraturan Pemerintah No 17 Tahun 2015 tentang Ketahanan Pangan dan Gizi. Dalam pasal 60 UU No 18 tahun 2012 disebutkan bahwa Pemerintah dan Pemerintah Daerah berkewajiban mewujudkan penganekaragaman konsumsi pangan untuk memenuhi kebutuhan gizi masyarakat. Tercapainya penganekaragaman konsumsi pangan tersebut diukur melalui pencapaian nilai, komposisi, pola pangan dan gizi seimbang, dengan indikator yang ada saat ini adalah Pola Pangan Harapan (PPH).

Gambar III.1

Kegiatan Lomba Kreasi Pangan Lokal



Permasalahan yang menjadi kendala dalam penghitungan skor PPH adalah keterbatasan jenis makanan jadi dan makanan yang dikonsumsi diluar rumah yang terdapat dalam kuesioner susenas dan jika menggunakan metode "recall" seminggu berpotensi terjadinya under/over estimate data konsumsi pangan yang di ingat oleh responden. Maka dari itu diperlukan

harmonisasi perhitungan skor PPH konsumsi pangan melalui teknik justifikasi perubahan kuesioner dan trend data susenas. Permasalahan juga menjadi terjadi Pola pangan versi FAO-RAPA ini nampaknya belum cocok bila diterapkan langsung di Indonesia karena porsi energi dari hewani sangat tinggi yaitu 20 %. Demikian pula akibat pandemi covid 19 dan meningkatnya inflasi telah mengubah pola konsumsi beragam masyarakat dan beralih kepada konsumsi prioritas pada pangan pokok yaitu beras.

Alternatif Pemecahan masalah meningkatkan promosi dan edukasi kepada masyarakat untuk meningkatkan keberagaman konsumsi pangan dan mengurangi ketergantungan pada konsumsi prioritas pangan pokok. Alternatif untuk perhitungan dengan Versi FAO-RAPA adalah perlu dimodifikasi, disesuaikan dengan kondisi di Indonesia yang tidak memerlukan lemak setinggi ukuran tersebut, tetapi cukup apabila energi dari lemak sekitar 18 – 20 % dan energi dari protein sekitar 10 – 12 %, sedangkan sisanya sekitar 66 – 72 % disediakan oleh karbohidrat. Berkenaan dengan itu sumbangan energi dari pangan hewani cukup sekitar 15 %, tidak perlu sampai 20 % yang justru dapat menimbulkan kemungkinan meningkatnya masalah gizi lebih. Diharapkan data konsumsi pangan yang di survey oleh SUSENAS Skor PPH Provinsi Kalimantan Tengah pada Tahun 2023 mampu mencapai target Pola Pangan Harapan sebesar 100 sesuai standar Susunan Pola Pangan Harapan Nasional.

b. Jumlah Kelompok Penganekaragaman Konsumsi (P2KP) / Diversifikasi Konsumsi Pangan

Kegiatan diversifikasi ditujukan untuk meningkatkan produksi pangan pokok alternative/lokal selain beras, penurunan konsumsi beras dan peningkatan konsumsi pangan pokok alternative yang berimbang dan bergizi serta berbasis pada pangan lokal. Diversifikasi dilakukan dengan mempercepat implementasi teknologi pasca panen dan pengolahan pangan lokal yang telah diteliti ke dalam industry. Diversifikasi/Penganekaragaman konsumsi pangan akan memberi dorongan dan insentif pada penyediaan produk pangan yang lebih beragam dan aman untuk dikonsumsi, termasuk produk pangan yang berbasis sumberdaya lokal. Dari sisi aktivitas produksi, penganekaragaman konsumsi pangan akan mendorong pengembangan ragam sumber pangan, utamanya tanaman sumber karbohidrat, protein dan zat gizi mikro, serta ternak dan ikan sebagai sumber protein. Selain itu akan dapat menumbuhkan beragam usaha pengolahan pangan usaha rumah tangga, kecil, menengah dan usaha besar. Upaya penganekaragaman konsumsi pangan dapat pula dijadikan salah satu momentum bagi Pemerintah untuk menstimulasi pusat-pusat pertumbuhan ekonomi baru di pedesaan.

Tabel 14
Target dan Realisasi Kinerja Kelompok Penganekaragaman Konsumsi (P2KP)

Sasaran 2: Mewujudkan Diversifikasi Pangan							
No	Indikator Kinerja Utama	2021		2022		Capaian s/d 2022 terhadap 2021 (Kelompok)	Ket. (Menaik/ Menurun)
		Target (Kelompok)	Realisasi (Kelompok)	Target (Kelompok)	Realisasi (Kelompok)		
1	Jumlah Kelompok Penganekaragaman	35	83	20	31	53	Menurun

Konsumsi (P2KP) / Diversifikasi Konsumsi Pangan						
---	--	--	--	--	--	--

Kegiatan Promosi Penganekaragaman Konsumsi Pangan (P2KP) yang dilaksanakan pada Tahun 2022, mempromosikan produk pangan lokal segar maupun olahan khas Kalimantan Tengah. Melalui kegiatan ini pula dapat menginformasikan kepada masyarakat tentang beraneka ragam olahan menu masakan/kudapan berbahan pangan lokal dari 14 kabupaten/kota.

Gambar III.2 Promosi Menggunakan Leaflet



Pada Tahun 2022 pelaksanaan Kegiatan promosi melalui kelompok- kelompok P2KP yang berjumlah 31 Kelompok. Dibandingkan dengan Tahun 2021 terdapat penurunan jumlah kelompok sebanyak 52 kelompok, hal ini disebabkan oleh pandemi Covid 19 dan kondisi perekonomian masyarakat menurun sehingga banyak masyarakat tidak mampu melaksanakan secara mandiri usaha melalui usaha kelompok untuk meningkatkan pendapatannya,

namun target kelompok dalam Kegiatan Promosi Penganekaragaman Konsumsi melalui Kegiatan P2KP yang telah ditetapkan

sebanyak 20 Kelompok dapat tercapai dan melebihi target dengan jumlah kelompok 31 kelompok P2KP.

Kegiatan Penganekaragaman Konsumsi Pangan melalui kegiatan P2KP masih kurang optimal dalam pelaksanaan kegiatan oleh kelompok, maka peran tim teknis sangat dibutuhkan sebagai pembimbing untuk berjalannya kegiatan ini dengan baik. Pembinaan langsung ke lokasi oleh petugas kab/kota dan Provinsi masih kurang optimal, mengingat keterbatasan anggaran dan lokasi tersebar di beberapa lokasi dalam satu kabupaten/kota dan yang sebagian sulit dijangkau.

Permasalahan dalam Kegiatan Promosi Penganekaragaman Konsumsi P2KP, masih kurang pengawasan terhadap perkembangan penganekaragaman konsumsi pangan karena terkendala biaya pengawasan yang dihadapi oleh Kabupaten/Kota.

Alternatif pemecahan masalah dengan meningkatkan pengawasan peningkatan jumlah anggaran yang lebih sesuai dengan kebutuhan pengawasan oleh Kabupaten/kota terhadap semua kelompok yang ada di daerahnya agar kegiatan dapat terealisasi sesuai rencana dan tepat sasaran.

Sasaran 3 : Mewujudkan Keamanan Pangan Segar

a. Persentase Jumlah Sampel Pangan Segar yang Aman dengan Jumlah Sampel yang Diambil

Keamanan pangan adalah kondisi dan upaya yang diperlukan untuk mencegah pangan dari kemungkinan cemaran biologis, kimia dan benda lain yang dapat mengganggu, merugikan dan membahayakan kesehatan manusia.

Kerawanan pangan dapat meningkatkan risiko berbagai bentuk malnutrisi. Salah satu elemen penting yang membantu menjelaskan hal ini adalah makanan yang dimakan orang: khususnya, kualitas makanan. Kerawanan pangan dapat memengaruhi kualitas makanan dengan berbagai cara, berpotensi menyebabkan kekurangan gizi serta kelebihan berat badan dan obesitas.

Penyusunan diet sehat yang tepat berbeda-beda tergantung pada karakteristik individu, konteks budaya, ketersediaan makanan lokal, dan kebiasaan diet, tetapi prinsip dasar tentang diet sehat tetap sama. Ketidakmungkinan untuk menentukan makanan dan jumlah tertentu yang terdiri dari pola makan sehat untuk semua negara dan kurangnya data yang dapat dibandingkan lintas negara tentang asupan makanan individu, menimbulkan tantangan untuk penilaian global tentang konsumsi makanan dan kualitas makanan.

Untuk menjamin keamanan pangan disuatu Negara menurut FAO/WHO adalah sebagai berikut : Legislasi dibidang pangan, penanganan keamanan pangan, pelayanan pengumpulan Hasil panen adalah merupakan lokasi harus didekatkan dengan tempat pemanenan, agar tidak terjadi penyusutan atau penurunan kualitas akibat pengangkutan dari dan ketempat penampungan yang berlaku lama/jauh, antara lain adalah :

- 1) Sortasi dilakukan dengan tujuan untuk memisahkan komoditas yang dipanen dalam bentuk normal dan baik (tidak mengalami kerusakan fisik).
- 2) Pembersihan/pencucian digunakan standar baku mutu air (standar air minum) untuk mencuci.
- 3) Pengemasan adalah untuk melindungi/mencegah komoditi dari kerusakan mekanis, menciptakan daya tarik bagi konsumen dan memberikan nilai tambah produk serta memperpanjang daya simpan produk.

- 4) Pelabelan produk harus diberikan sesuai dengan kelas mutunya, nama produksi, nama produsen, tanggal produksi dan tanggal kadaluarsa serta berat bersih.

Tabel 15 . Target dan Realisasi Kinerja Sampel Pangan Segar

Sasaran 3: Mewujudkan Keamanan Pangan Segar							
No	Indikator Kinerja Utama	2021		2022		Capaian s/d 2022 terhadap 2021 (%)	Ket. (Menaik/ Menurun)
		Target (%)	Realisasi (%)	Target (%)	Realisasi (%)		
1	Persentase jumlah sampel pangan segar yang aman dengan jumlah sampel yang diambil	90	88	90	90	2	menaik

Kegiatan Otoritas Kompeten Keamanan Pangan Daerah (OKKPD) dan Pengawasan Keamanan Segar sebagai berikut :

- Penguatan Kelembagaan Pangan Segar Provinsi.
- Sertifikasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Lintas Kabupaten Kota.
- Registrasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Lintas Daerah Kabupaten Kota.
- Rekomendasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Lintas Daerah Kabupaten Kota.
- Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengujian Mutu dan Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan.

Sebagai kegiatan mencegah dan tindak lanjut berbagai penyimpangan dari kemungkinan adanya bahaya keamanan pangan yang dapat mengganggu, merugikan dan membahayakan kesehatan manusia dalam pangan segar dengan tujuan untuk menjamin keamanan pangan segar yang beredar di lingkungan masyarakat. Pangan yang beredar harus layak dan aman untuk dikonsumsi masyarakat sehingga masyarakat terhindar dari mengkonsumsi pangan yang terkontaminasi oleh cemaran biologis, kimia maupun cemaran fisik, sehingga dapat mendukung terjaminnya pengembangan pertumbuhan, kesehatan dan kecerdasan manusia. Semakin tinggi persentase jumlah sampel pangan segar yang aman dengan jumlah sampel yang diambil, maka tingkat keamanan pangan segar semakin baik. Pada Tahun 2022 jumlah sampel pangan segar yang aman dengan realisasi sebesar 90 % sedangkan pada Tahun 2021 sebesar 88 %.

Permasalahan akibat adanya Pandemi Covid 19 dan meningkatnya inflasi yang kegiatan pengambilan sampel pangan segar terkendala serta dengan terbatasnya alat rapid test cepat sehingga pengujian sampel pangan segar tidak dapat dilaksanakan secara cepat.

Alternatif pemecahan masalah dengan menganggarkan biaya sesuai dengan kebutuhan pengambilan sampel dan penyediaan alat rapid test sehingga yang telah ditargetkan dalam dokumen renstra dapat tercapai.

b. Pelaku Usaha Pangan Asal Tumbuhan

Terwujudnya pelaku usaha pangan asal tumbuhan diharapkan dapat menguatkan kelembagaan keamanan pangan segar, meningkatkan kapasitas dan kapabilitas sumber daya manusia, melakukan sosialisasi bagi petugas yang menangani keamanan pangan segar, meningkatkan pengetahuan masyarakat mengenai keamanan pangan segar, meningkatkan ketersediaan dan konsumsi pangan segar yang aman bagi masyarakat.

Tabel 16
Target dan Realisasi Kinerja Pelaku Usaha Pangan Asal Tumbuhan

Sasaran 3: Mewujudkan Keamanan Pangan Segar							
No	Indikator Kinerja Utama	2021		2022		Capaian s/d 2022 terhadap 2021 (Pelaku)	Ket. (Menaik/ Menurun)
		Target (Pelaku)	Realisasi (Pelaku)	Target (Pelaku)	Realisasi (Pelaku)		
1	Jumlah pelaku usaha pangan asal tumbuhan	245	248	250	250	2	Menaik

Jumlah Pelaku Usaha Pangan Segar Asal Tumbuhan (PSAT) baik Pelaku Usaha Perorangan atau Organisasi yang bergerak dibidang rantai pangan di Provinsi Kalimantan Tengah pada Tahun 2022 realisasi sejumlah 250 pelaku usaha, Tahun 2022 jumlah realisasi Pelaku Usaha Pangan Asal Tumbuhan mencapai target yang telah ditetapkan, untuk pelaku usaha asal tumbuhan jika dibandingkan dengan Tahun 2021 sebanyak 248 pelaku usaha maka terdapat penambahan 2 pelaku usaha baru asal tumbuhan. Kegiatan ini dilaksanakan melalui dukungan dana APBD Provinsi Kalimantan Tengah.

Permasalahan kurangnya keamanan terutama buah dan sayuran segar merupakan tanggung jawab bersama antara pemerintah dan masyarakat (produsen dan konsumen). Pemerintah bertanggung jawab menetapkan kebijakan dan menciptakan sistem pemantauan dan pengawasan yang terpadu. Produsen/petani kurang berperan dalam menghasilkan produk yang aman dan bermutu, sedangkan konsumen kurang selektif dalam memilih produk pangan yang aman untuk dikonsumsi. Penggunaan bahan kimia dalam budidaya sayur dan buah untuk pengendalian organisme pengganggu tanaman yang belum memenuhi ketentuan budidaya yang baik, akan melemahkan daya saing produk pertanian baik dalam perdagangan nasional dan internasional.

Alternatif pemecahan masalah untuk masalah di atas diperlukan sistem pengawasan yang berkesinambungan mulai dari hulu sampai hilir, dengan dukungan sumber daya yang memadai seperti petugas yang berkompeten dan terlatih.

Sasaran 4 : Terwujudnya Penanganan Daerah Rawan Pangan

a. Analisis Sistem Kewaspadaan Pangan dan Gizi (SKPG)

Sistem Kewaspadaan Pangan dan Gizi (SKPG) dimaksudkan sebagai rangkaian kegiatan pengamatan situasi pangan melalui penyediaan data/informasi untuk penanganan masalah gangguan pangan yang berpotensi muncul setiap saat. Perkembangan situasi pangan dapat cenderung menjadi tidak menentu dan sulit dipastikan, baik sebagai akibat pengaruh alam maupun oleh adanya gejala instabilitas seperti krisis ekonomi, sosial dan politik. Prinsip-prinsip yang selanjutnya digunakan sebagai penuntun dalam upaya pengembangan SKPG di Indonesia,

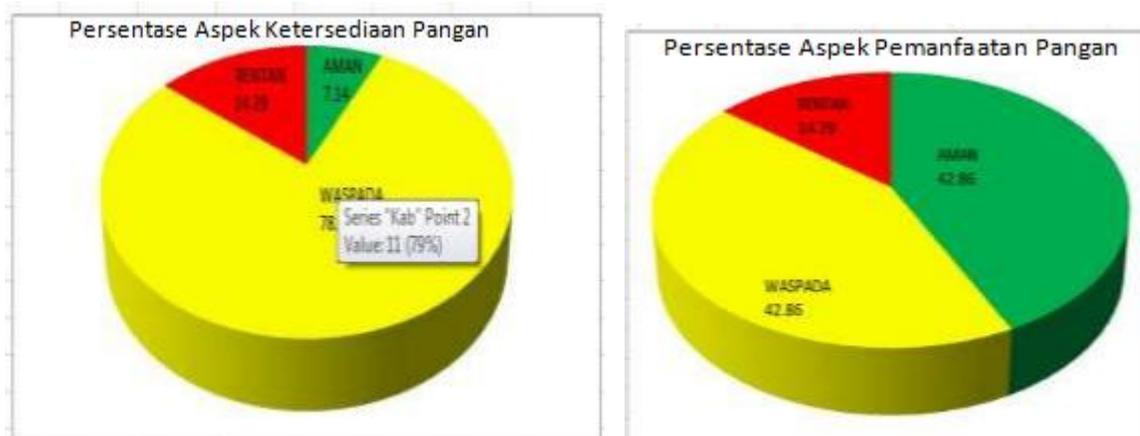
antara lain: (a) SKPG dikembangkan secara bertahap dengan memperhatikan tujuan-tujuan SKPG yang hendak dicapai, (b) pengembangan SKPG dipusatkan pada salah satu masalah gizi yang penting dan menjadi prioritas, (c) pengembangan SKPG semaksimal mungkin memanfaatkan apa yang sudah ada, baik data maupun organisasi.

Tabel 17
Target dan Realisasi Kinerja Kewaspadaan Pangan dan Gizi (SKPG)

Sasaran 4: Terwujudnya Penanganan Daerah Rawan Pangan							
No	Indikator Kinerja Utama	2021		2022		Capaian s/d 2022 terhadap 2021 (Dokumen)	Ket. (Menaik/ Menurun)
		Target (Dokumen)	Realisasi (Dokumen)	Target (Dokumen)	Realisasi (Dokumen)		
1	Analisis Kewaspadaan Pangan dan Gizi (SKPG)	1	1	≤ 20	1,47	1,47	-

Sistem Kewaspadaan Pangan dan Gizi (SKPG) sebagai merupakan sarana tersedianya informasi situasi pangan dan gizi Provinsi Kalimantan Tengah yang sangat penting sebagai bahan rekomendasi kebijakan ketahanan pangan dan gizi. Instrumen SKPG yang disusun diharapkan akan meningkatkan kewaspadaan pangan dan gizi dalam mendukung ketahanan pangan. Hasil SKPG dapat digunakan sebagai dasar pelaksanaan investigasi untuk menentukan tingkat kedalaman kejadian kerentanan pangan dan gizi di lapangan serta intervensi dalam rangka mewujudkan ketahanan pangan masyarakat.

Grafik III.3
Persentase dari segi Aspek Ketersediaan Pangan dan Aspek Pemanfaatan Pangan



Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Kalimantan Tengah Penyusunan Dokumen analisis Sistem Kewaspadaan Pangan dan Gizi (SKPG) telah dilaksanakan dengan optimal melalui analisis SKPG yang memusatkan pada salah satu masalah gizi yang penting dan menjadi prioritas.

Permasalahan Analisis SKPG sulitnya pengumpulan data sebagai bahan analisis data SKPG dan masih kurangnya investigasi yang mendalam untuk melihat keakuratan data SKPG dan melihat

sejauh mana kejadian rawan pangan dan gizi terjadi di suatu wilayah dan masih kurangnya intervensi sebagai bentuk tindakan untuk menangani kejadian rawan pangan dan gizi.

Alternatif pemecahan masalah di atas adalah dengan melaksanakan pelatihan SKPG untuk mengakomodir petugas di Kabupaten/kota. Dengan demikian akan tersedianya tenaga terlatih dalam melaksanakan pengumpulan data, peningkatan peran kabupaten/kota terkait dalam pelaksanaan investigasi yang mendalam untuk melihat keakuratan data SKPG dan melihat sejauh mana kejadian rawan pangan dan gizi terjadi di suatu wilayah dan hal terpenting adalah peran Dinas Ketahanan Pangan dalam melaksanakan intervensi sebagai bentuk tindakan untuk menangani kejadian rawan pangan dan gizi berdasarkan hasil analisis SKPG di wilayah Provinsi Kalimantan Tengah

b. Analisis Food Security and Vulnerability Atlss (FSVA)

Salah satu tugas Dinas ketahanan Pangan Provinsi Kalimantan Tengah adalah melaksanakan koordinasi, identifikasi dan menyusun Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan (*Food Security and Vulnerability Atlss-FSVA*) Provinsi Kalimantan Tengah yang terus dilakukan pemutakhiran setiap tahun.

Sejalan dengan pemekaran wilayah, ketersediaan data, dan perkembangan wilayah sebagai dampak dari pelaksanaan pembangunan, maka Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Kalimantan Tengah pada tahun 2022 telah melakukan pemutakhiran dari FSVA 2021. Pemutakhiran ini dilakukan agar potret ketahanan dan kerentanan pangan di tingkat wilayah dapat digambarkan secara lebih akurat. Pemutakhiran dilakukan melalui penyempurnaan indikator, data, serta metode komposit. Akurasi peta terus ditingkatkan agar permasalahan dan tantangan yang menyebabkan terjadinya masalah pangan, kemiskinan dan *stunting* dapat dilakukan intervensi program/kegiatan secara lebih tepat sasaran, efektif dan efisien.

Berdasarkan analisis komposit FSVA 2022 diketahui bahwa program pembangunan ketahanan pangan di Kalimantan Tengah secara umum menunjukkan keadaan yang tahan pangan. Namun, bukan berarti Provinsi Kalimantan Tengah bebas dari kerentanan pangan. Masih ada beberapa indikator yang tetap harus diwaspadai agar tidak terjadi kerentanan pangan. Diantaranya adalah produksi pangan pokok, sebaran tenaga kesehatan, angka kesakitan, angka putus sekolah pada wanita usia 15 tahun ke atas, dan angka *stunting* balita.

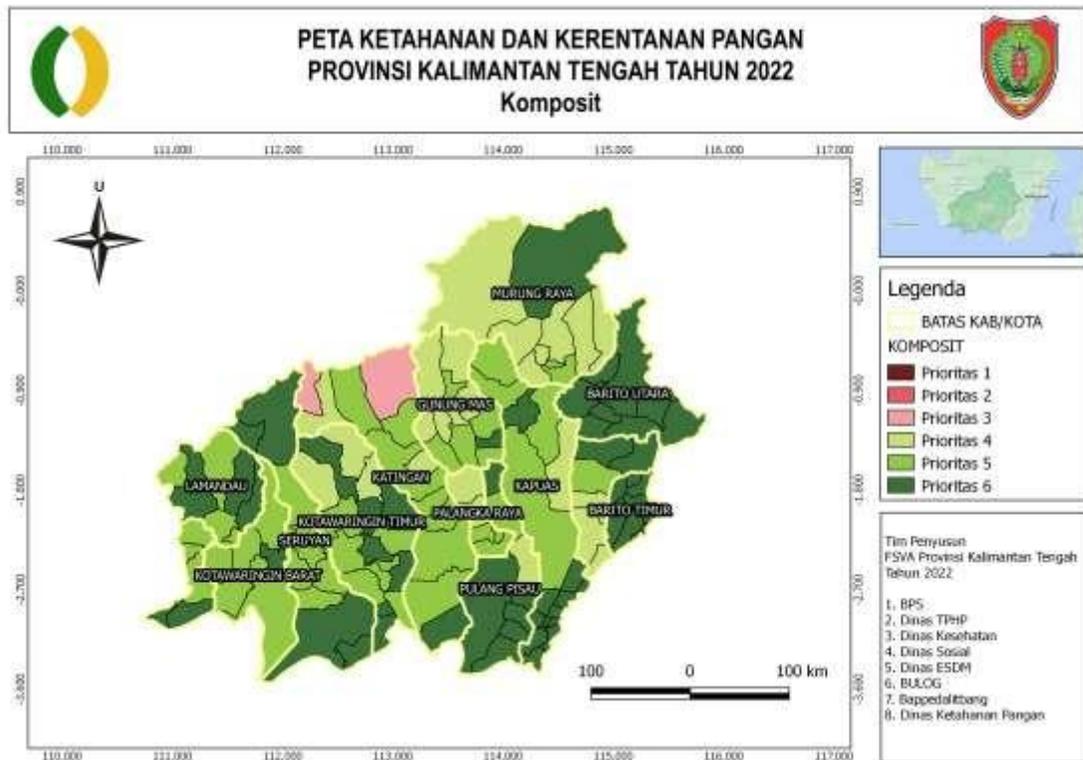
Sebaran kecamatan dengan persentase penduduk di bawah garis kemiskinan dikelompokkan dalam enam kelompok, yaitu sangat rentan, rentan, agak rentan, agak tahan, tahan, dan sangat tahan. Jumlah kecamatan yang masuk kelompok tahan sebanyak 129 kecamatan atau 95 persen. Sedangkan 7 kecamatan atau 5 persen masuk kelompok rentan, masing-masing adalah kecamatan Sungai Babuat di Kabupaten Murung Raya, kecamatan Mendawai dan Petak Malai di Kabupaten Katingan, serta kecamatan Pulau Hanaut, Seranau, Teluk Sampit dan Kota Besi di Kabupaten Kotawaringin Timur.

Tabel 18
Target dan Realisasi Kinerja Food Security and Vulnerability Atlss (FSVA)

Sasaran 4: Terwujudnya Penanganan Daerah Rawan Pangan							
No	Indikator Kinerja Utama	2021		2022		Capaian s/d 2022 terhadap 2022 (Dokumen)	Ket. (Menaik/ Menurun)
		Target (Dokumen)	Realisasi (Dokumen)	Target (Dokumen)	Realisasi (Dokumen)		

1	Analisis Food Security and Vulnerability Atlas (FSVA)	1	1	≤ 20	1,47	1,47	-
---	---	---	---	-----------	------	------	---

Gambar III.3 Komposit FSVA



Permasalahan utama yang ditemukan pada daerah yang terindikasi rentan rawan pangan, secara lebih khusus, kecamatan-kecamatan dalam kelompok rentan rawan pangan di wilayah Kabupaten Prioritas diindikasikan oleh:

- 1) tingginya rasio konsumsi per kapita terhadap produksi bersih per kapita,
- 2) tingginya rumah tangga tanpa akses air bersih,
- 3) tingginya rasio jumlah penduduk per tenaga kesehatan terhadap tingkat kepadatan penduduk,
- 4) tingginya angka kesakitan penduduk, dan
- 5) masih tingginya prevalensi stunting pada balita

Alternatif pemecahan masalah tersebut adalah disarankan untuk mencegah terjadinya kerawanan diperlukan program/kegiatan yang dapat :

- 1) menurunkan rasio konsumsi per kapita terhadap produksi bersih per kapita,
- 2) Meningkatkan akses air bersih,
- 3) Meningkatkan jumlah tenaga kesehatan pada daerah penduduk,
- 4) Meningkatkan angka sehat penduduk, dan
- 5) Menurunkan prevalensi stunting pada balita

Program-program peningkatan ketahanan pangan dapat diarahkan pada kegiatan :

- a. Peningkatan penyediaan pangan di daerah non sentra pangan dengan mengoptimalkan lahan marginal dan ruang terbuka untuk produksi sesuai potensi sumberdaya lokal.
- b. Sosialisasi dan penyuluhan tentang gizi dan pola asuh anak; penyediaan fasilitas layanan kesehatan dan peningkatan kualitas dan sanitasi untuk menurunkan prevalensi stunting dan peningkatan gizi masyarakat.

- c. Penyediaan lapangan kerja, padat karya, redistribusi lahan; pembangunan infrastruktur dasar (jalan, listrik, rumah sakit), dan pemberian bantuan sosial; serta pembangunan usaha produktif/UMKM/padat karya untuk menggerakkan ekonomi wilayah untuk menurunkan kemiskinan.
- d. Peningkatan akses air bersih melalui penyediaan fasilitas dan layanan air bersih; sosialisasi dan penyuluhan.
- e. Pemerataan penyediaan tenaga kesehatan.
- f. Peningkatan pengetahuan dan keterampilan perempuan.

4. PERBANDINGAN REALISASI KINERJA TAHUN INI DENGAN STANDAR NASIONAL

Skor Pola Pangan Harapan (PPH) Salah satu indikator yang digunakan untuk mengukur pencapaian kualitas konsumsi pangan adalah melalui pencapaian skor PPH. Pola konsumsi pangan yang ideal secara nasional digambarkan dengan skor PPH 100.

Untuk mencapai konsumsi energi dan PPH yang ideal perlu diimbangi dengan peningkatan konsumsi umbi-umbian dan sumber karbohidrat lainnya.

Hasil Realisasi Kinerja Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2022 untuk nilai Skor Pola Pangan Harapan adalah 87,2. Dibandingkan dengan Skor Ideal Nasional maka nilai Skor PPH Dinas Ketahanan Pangan Provinsi berada dibawah Skor PPH Ideal Nasional sebesar 12,8 point. Hasil skor PPH tersebut menunjukkan bahwa tingkat keberagaman kelompok pangan masih rendah dan untuk mencapai keberagaman yang ideal dan memenuhi angka kecukupan gizi (AKG) yang dianjurkan, maka yang perlu ditingkatkan lagi keberagaman pangan.

Meskipun tren konsumsi umbi-umbian mengalami peningkatan, namun konsumsi beras masih mendominasi kontribusi energi dari pangan sumber karbohidrat. Hal ini menyebabkan jumlah agregat kebutuhan konsumsi beras masyarakat masih tinggi. Kondisi ini menunjukkan konsumsi energi penduduk masih belum memenuhi kaidah gizi seimbang yang dianjurkan. Untuk itu, di masa mendatang pola konsumsi pangan masyarakat diarahkan pada pola konsumsi pangan Beragam, Bergizi, Seimbang dan Aman.

f. Analisis Anggaran Pusat (APBN) Satuan Kerja Badan Pangan Nasional yang di berikan ke DinasKetahanan Pangan Provinsi Kalimantan TengahTahun 2022.

Tabel 2.15. Target dan Realisasi

No	Nama Program	2022	2023			Ket.
		Jumlah Anggaran (Rp)	Jumlah Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	
1	Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Masyarakat	-	-	-	-	-
1	Program Ketersediaan, Akses dan Konsumsi Pangan Berkualitas	920.000.000	-	-	-	-

2.3. Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

Isu-isu strategis terkait dengan pembangunan ketahanan pangan

- a) Dampak perubahan Iklim Ekstrem terhadap Ketahanan Pangan;
- b) Alih fungsi lahan pangan untuk keperluan lain (misalnya: utk perkebunan);
- c) Koordinasi, Komitmen dan Sinergi anggota DKP dalam mewujudkan dan memantapkan ketahanan pangan secara berkelanjutan;
- d) Keterpaduan dan efisiensi sistem logistik pangan berdasarkan keunggulan komparatif daerah dan rantai suplai yang efisien;
- e) Akses, stabilitas harga dan keterjauan pangan bagi masyarakat di perdesaan
- f) Percepatan penganekaragaman pangan berbasis sumberdaya pangan lokal;
- g) Monitoring dan evaluasi sistem ketahanan pangan sebagai basis *early warning system*;
- h) Kajian-kajian akademik/ilmiah kebijakan ketahanan pangan;
- i) Penerapan dan pendampingan teknologi pertanian spesifik lokasi (budidaya, pengolahan dan pengelolaan lahan dan air);
- j) Keikutsertaan masyarakat dalam mewujudkan ketahanan pangan
- k) Peningkatan kesejahteraan Petani dengan peningkatan pelatihan petani dan aparatur

2.4. Review Terhadap Rancangan RKPD

Rancangan RKPD Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Kalimantan Tengah Tahun Anggaran 2024 sebagai berikut :

Tabel C.3.1.
Rancangan RKPD Tahun 2024
Provinsi Kalimantan Tengah

Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Kalimantan Tengah

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/ Kegiatan	Prioritas Daerah	Lokasi	Capaian Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Sub Kegiatan		Pagu Tahun 2023	Pagu Tahun 2024
				Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target		
	Urusan Pemerintahan Bidang Pangan		Provinsi	Kontribusi Penguatan Cadangan pangan daerah (Persentase)	70,50%	Kontribusi Penguatan Cadangan pangan daerah (Persentase)	70,50%	Kontribusi Penguatan Cadangan pangan daerah (Persentase)	70,50%	-	-
			Provinsi	Ketersediaan pangan utama (surplus beras dalam ton)	36334 Ton	Ketersediaan pangan utama (surplus beras dalam ton)	36334 Ton	Ketersediaan pangan utama (surplus beras dalam ton)	36334 Ton		
2.09.02	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA EKONOMI UNTUK KEDAULATAN DAN KEMANDIRIAN PANGAN		Provinsi	Ketersediaan pangan utama (surplus beras dalam ton)	36334 Ton	Ketersediaan pangan utama (surplus beras dalam ton)	36334 Ton	Ketersediaan pangan utama (surplus beras dalam ton)	36334 Ton	15,300,000	16,000,000

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/ Kegiatan	Prioritas Daerah	Lokasi	Capaian Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Sub Kegiatan		Pagu Tahun 2023	Pagu Tahun 2024
				Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target		
2.09.02.1.01	Penyediaan Infrastruktur dan Seluruh Pendukung Kemandirian Pangan pada berbagai Sektor sesuai Kewenangan Daerah Provinsi		Provinsi	Jumlah sasaran luas tanam, luas panen, produktivitas dan produksi tanaman pangan, holtikultura, produksi perternakan, luas areal dan produksi perkebunan dan produksi perikanan provinsi kalimantan tengah	36334 Ton	Jumlah sasaran luas tanam, luas panen, produktivitas dan produksi tanaman pangan, holtikultura, produksi perternakan, luas areal dan produksi perkebunan dan produksi perikanan provinsi kalimantan tengah	36334 Ton	Jumlah sasaran luas tanam, luas panen, produktivitas dan produksi tanaman pangan, holtikultura, produksi perternakan, luas areal dan produksi perkebunan dan produksi perikanan provinsi kalimantan tengah	36334 Ton	15,300,000	16,000,000
			Provinsi	Analisis skor PPH Provinsi Kalimantan Tengah	91%	Analisis skor PPH Provinsi Kalimantan Tengah	91%	Analisis skor PPH Provinsi Kalimantan Tengah	91%		
2.09.03	PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT		Provinsi	Kontribusi Penguatan Cadangan Pangan Daerah (%)	70,50%	Kontribusi Penguatan Cadangan Pangan Daerah (%)	70,50%	Kontribusi Penguatan Cadangan Pangan Daerah (%)	70,50%	2,921,841,900	2.594.388.500
			Provinsi	Skor Pola Pangan Harapan (PPH) Konsumsi (%)	91%	Skor Pola Pangan Harapan (PPH) Konsumsi (%)	91%	Skor Pola Pangan Harapan (PPH) Konsumsi (%)	91%	229,500,000	328.000.000

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/ Kegiatan	Prioritas Daerah	Lokasi	Capaian Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Sub Kegiatan		Pagu Tahun 2023	Pagu Tahun 2024
				Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target		
2.09.03.1.01	Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Provinsi dalam rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan		Provinsi	Jumlah laporan analisis Neraca Bahan Makanan (NBM) dan PPH ketersediaan	1 Dokumen	Jumlah laporan analisis Neraca Bahan Makanan (NBM) dan PPH ketersediaan	1 Dokumen	Jumlah laporan analisis Neraca Bahan Makanan (NBM) dan PPH ketersediaan	1 Dokumen	1,905,000,000	1.518.000.000
2.09.03.1.01.01	Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Provinsi dalam rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan		Provinsi	Jumlah Kelompok Lembaga distribusi pangan	11 Kelompok	Jumlah Kelompok Lembaga distribusi pangan	11 Kelompok	Jumlah Kelompok Lembaga distribusi pangan	11 Kelompok	25,000,000	27,000,000
2.09.03.1.01.02	Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Provinsi dalam rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan		Provinsi	Jumlah kelompok ibu menyusui dan Ibu hamil yang mengikuti kegiatan dan jumlah kelompok wanita pangan lokal	3 Kelompok	Jumlah kelompok ibu menyusui dan Ibu hamil yang mengikuti kegiatan dan jumlah kelompok wanita pangan lokal	3 Kelompok	Jumlah kelompok ibu menyusui dan Ibu hamil yang mengikuti kegiatan dan jumlah kelompok wanita pangan lokal	3 Kelompok	85,000,000	88,000,000

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/ Kegiatan	Prioritas Daerah	Lokasi	Capaian Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Sub Kegiatan		Pagu Tahun 2023	Pagu Tahun 2024
				Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target		
2.09.03.1.01.03	Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Provinsi dalam rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan		Provinsi	Jumlah laporan pemantauan Analisis Akses Pangan dan laporan pemantauan distribusi pangan	2 Laporan	Jumlah laporan pemantauan Analisis Akses Pangan dan laporan pemantauan distribusi pangan	2 Laporan	Jumlah laporan pemantauan Analisis Akses Pangan dan laporan pemantauan distribusi pangan	2 Laporan	45,000,000	48,000,000
2.09.03.1.01.04	Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Provinsi dalam rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan		Provinsi	jumlah Dokumen Laporan pemantaun Analisis Tren Harga Pangan Pokok	1 Dokumen	jumlah Dokumen Laporan pemantaun Analisis Tren Harga Pangan Pokok	1 Dokumen	jumlah Dokumen Laporan pemantaun Analisis Tren Harga Pangan Pokok	1 Dokumen	750,000,000	750,000,000
2.09.03.1.02.05	Pengelolaan dan Keseimbangan Cadangan Pangan Provinsi		Provinsi	Jumlah Kelompok Lumbung yang mandiri	12 Kelompok	Jumlah Kelompok Lumbung yang mandiri	12 Kelompok	Jumlah Kelompok Lumbung yang mandiri	12 Kelompok	1,000,000,000	1,000,000,000
2.09.03.1.02	Pengelolaan dan Keseimbangan Cadangan Pangan Provinsi		Provinsi	Dokumen sasaran produksi	1 Dokumen	Dokumen sasaran produksi	1 Dokumen	Dokumen sasaran produksi	1 Dokumen	15,000,000	16,000,000
2.09.03.1.02.01	Pengelolaan dan Keseimbangan Cadangan Pangan Provinsi		Provinsi	Pengembangan cadangan pangan pemerintah provinsi	783 Kg	Pengembangan cadangan pangan pemerintah provinsi	783 Kg	Pengembangan cadangan pangan pemerintah provinsi	783 Kg	760,341,900	573.000.000

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/ Kegiatan	Prioritas Daerah	Lokasi	Capaian Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Sub Kegiatan		Pagu Tahun 2023	Pagu Tahun 2024
				Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target		
2.09.03.1.04	Promosi Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi melalui Media Provinsi		Provinsi	Jumlah kegiatan Ekspose dan Promosi Pembangunan Ketahanan Pangan	1 Kegiatan	Jumlah kegiatan Ekspose dan Promosi Pembangunan Ketahanan Pangan	1 Kegiatan	Jumlah kegiatan Ekspose dan Promosi Pembangunan Ketahanan Pangan	1 Kegiatan	226,500,000	434,112,500
2.09.03.1.04	Promosi Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi melalui Media Provinsi		Provinsi	Jumlah Peserta kegiatan sosialisasi diversifikasi pangan	3 Peserta	Jumlah Peserta kegiatan sosialisasi diversifikasi pangan	3 Peserta	Jumlah Peserta kegiatan sosialisasi diversifikasi pangan	3 Peserta	80,000,000	80,000,000
2.09.03.1.04	Promosi Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi melalui Media Provinsi		Provinsi	jumlah Dokumen Laporan Terlaksananya Analisis Pola Pangan Harapan	1 Dokumen	jumlah Dokumen Laporan Terlaksananya Analisis Pola Pangan Harapan	1 Dokumen	jumlah Dokumen Laporan Terlaksananya Analisis Pola Pangan Harapan	1 Dokumen	125,000,000	328,000,000
			Provinsi	Persentase jumlah sampel pangan segar yang aman dengan jumlah sampel yang diambil	91%	Persentase jumlah sampel pangan segar yang aman dengan jumlah sampel yang diambil	91%	Persentase jumlah sampel pangan segar yang aman dengan jumlah sampel yang diambil	91%		
2.09.05	PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN		Provinsi	Persentase sampel pangan segar yang aman dengan jumlah sampel yang diambil (%)	91%	Persentase sampel pangan segar yang aman dengan jumlah sampel yang diambil (%)	91%	Persentase sampel pangan segar yang aman dengan jumlah sampel yang diambil (%)	91%	90,000,000	116.000.000

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/ Kegiatan	Prioritas Daerah	Lokasi	Capaian Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Sub Kegiatan		Pagu Tahun 2023	Pagu Tahun 2024
				Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target		
2.09.05.1.01	Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Distribusi Lintas Daerah Kabupaten/Kota		Provinsi	Jumlah Peserta Pelatihan Petugas Pengambil Contoh	35 Peserta	Jumlah Peserta Pelatihan Petugas Pengambil Contoh	35 Peserta	Jumlah Peserta Pelatihan Petugas Pengambil Contoh	35 Peserta	90,000,000	116.000.000
2.09.05.1.01	Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Distribusi Lintas Daerah Kabupaten/Kota		Provinsi	Jumlah sertifikasi prima keamanan pangan segar	4 Sertifikasi	Jumlah sertifikasi prima keamanan pangan segar	4 Sertifikasi	Jumlah sertifikasi prima keamanan pangan segar	4 Sertifikasi	20,000,000	20.845.000
2.09.05.1.01	Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Distribusi Lintas Daerah Kabupaten/Kota		Provinsi	jumlah registrasi pemberdayaan kelompok pangan lokal	2 Kelompok	jumlah registrasi pemberdayaan kelompok pangan lokal	2 Kelompok	jumlah registrasi pemberdayaan kelompok pangan lokal	2 Kelompok	20,000,000	20.800.000
2.09.05.1.01	Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Distribusi Lintas Daerah Kabupaten/Kota		Provinsi	Jumlah sampel mutu keamanan pangan segar dan olahan yang diteliti	25 Jumlah Sampel	Jumlah sampel mutu keamanan pangan segar dan olahan yang diteliti	25 Jumlah Sampel	Jumlah sampel mutu keamanan pangan segar dan olahan yang diteliti	25 Jumlah Sampel	20,000,000	20.800.000
2.09.05.1.01	Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Distribusi Lintas Daerah Kabupaten/Kota		Provinsi	jumlah sarana penunjang laboratorium	2 Unit	jumlah sarana penunjang laboratorium	2 Unit	jumlah sarana penunjang laboratorium	2 Unit	15,000,000	15.600.000
			Provinsi	Penanganan daerah rawan pangan (%)	2%	Penanganan daerah rawan pangan (%)	2%	Penanganan daerah rawan pangan (%)	2%		
2.09.04	PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN		Provinsi	Penanganan daerah rawan pangan (%)	2%	Penanganan daerah rawan pangan (%)	2%	Penanganan daerah rawan pangan (%)	2%	50,000,000	152.025.000

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/ Kegiatan	Prioritas Daerah	Lokasi	Capaian Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Sub Kegiatan		Pagu Tahun 2023	Pagu Tahun 2024
				Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target		
2.09.04.1.01	Penyusunan Peta Kerentanan dan Ketahanan Pangan kewenangan Provinsi		Provinsi	Jumlah laporan analisis dan peta (FSVA) dan situasi pangan dan gizi (SKPG)	2 Dokumen	Jumlah laporan analisis dan peta (FSVA) dan situasi pangan dan gizi (SKPG)	2 Dokumen	Jumlah laporan analisis dan peta (FSVA) dan situasi pangan dan gizi (SKPG)	2 Dokumen	35,500,000	116,000,000
2.09.04.1.01	Penyusunan Peta Kerentanan dan Ketahanan Pangan kewenangan Provinsi		Provinsi	Jumlah Laporan identifikasi, investigasi, dan Pemantauan daerah Rawan Pangan	1 Laporan	Jumlah Laporan identifikasi, investigasi, dan Pemantauan daerah Rawan Pangan	1 Laporan	Jumlah Laporan identifikasi, investigasi, dan Pemantauan daerah Rawan Pangan	1 Laporan	35,500,000	36,025,000
			Provinsi	Nilai SAKIP	BB Predikat	Nilai SAKIP	BB Predikat	Nilai SAKIP	BB Predikat		
			Provinsi	Nilai SAKIP	BB Predikat	Nilai SAKIP	BB Predikat	Nilai SAKIP	BB Predikat		
X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI		Provinsi	Presentase Keterlaksanaan	100%	Presentase Keterlaksanaan	100%	Presentase Keterlaksanaan	100%	8,193,648,501	8.554.081.445
X.XX.01.1.0 1	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Provinsi	Jumlah Dokumen,Perencanaan, pengendalian dan evaluasi kegiatan	12 Dokumen	Jumlah Dokumen,Perencanaan, pengendalian dan evaluasi kegiatan	12 Dokumen	Jumlah Dokumen,Perencanaan, pengendalian dan evaluasi kegiatan	12 Dokumen	173,001,101	250.000.000
X.XX.01.1.0 2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		Provinsi	ASN penerima gaji dan tunjangan	52 Orang	ASN penerima gaji dan tunjangan	52 Orang	ASN penerima gaji dan tunjangan	52 Orang	6,837,095,900	6.607.051.445
X.XX.01.1.0 2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		Provinsi	Jumlah laporan realisasi keuangan SKPD	1 Dokumen Laporan	Jumlah laporan realisasi keuangan SKPD	1 Dokumen Laporan	Jumlah laporan realisasi keuangan SKPD	1 Dokumen Laporan	12,910,400	22.000.000
X.XX.01.1.0 2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		Provinsi	Jumlah laporan realisasi keuangan per semester SKPD	1 Dokumen Laporan	Jumlah laporan realisasi keuangan per semester SKPD	1 Dokumen Laporan	Jumlah laporan realisasi keuangan per semester SKPD	1 Dokumen Laporan	6,000,000	22.000.000

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/ Kegiatan	Prioritas Daerah	Lokasi	Capaian Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Sub Kegiatan		Pagu Tahun 2023	Pagu Tahun 2024
				Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target		
X.XX.01.1.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah		Provinsi	Jumlah laporan aset barang daerah	1 Dokumen Laporan	Jumlah laporan aset barang daerah	1 Dokumen Laporan	Jumlah laporan aset barang daerah	1 Dokumen Laporan	28,000,000	30,000,000
X.XX.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		Provinsi	Jumlah PNS yang mengikuti pendidikan dan pelatihan formal	2 Orang	Jumlah PNS yang mengikuti pendidikan dan pelatihan formal	2 Orang	Jumlah PNS yang mengikuti pendidikan dan pelatihan formal	2 Orang	5,000,000	15,000,000
X.XX.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah		Provinsi	Persentase kinerja internal yang terlayani dengan baik	100%	Persentase kinerja internal yang terlayani dengan baik	100%	Persentase kinerja internal yang terlayani dengan baik	100%	241,471,500	442,000,000
X.XX.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		Provinsi	Jumlah pengadaan/ pemeliharaan perlengkapan kerja gedung kantor	5 Unit	Jumlah pengadaan/ pemeliharaan perlengkapan kerja gedung kantor	5 Unit	Jumlah pengadaan/ pemeliharaan perlengkapan kerja gedung kantor	5 Unit	92,120,000	352,000,000
X.XX.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Provinsi	Persentase kinerja internal yang terlayani dengan baik	100%	Persentase kinerja internal yang terlayani dengan baik	100%	Persentase kinerja internal yang terlayani dengan baik	100%	621,480,000	621,480,000
X.XX.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Provinsi	Jumlah pemeliharaan mesin Roda 4 dan Roda 2 dan mesin lainnya	48 Unit Kendaraan R2 & R4	Jumlah pemeliharaan mesin Roda 4 dan Roda 2 dan mesin lainnya	48 Unit Kendaraan R2 & R4	Jumlah pemeliharaan mesin Roda 4 dan Roda 2 dan mesin lainnya	48 Unit Kendaraan R2 & R4	195,480,000	250,000,000

2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Usulan program dan kegiatan masyarakat ke Dinas Ketahanan Pangan yang berbentuk proposal belum ada/tidak ada masuk ke kantor.

Tabel C.32
Usulan Program dan Kegiatan Dari Pemangku Kepentingan Tahun 2024
Provinsi Kalimantan Tengah

No.	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran /Volume	Catatan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	Pekarangan Pangan Lestari/ Penganeka ragam / Diversifikasi Pangan	Prov	Jumlah kelompok P2L/ P2KP	10 kelompok tiap Kab/Kota	Usul dari Dinas yg menangani ketahanan pangan di Kab/kota
2.	Lumbung Pangan Masyarakat	Prov.	Jumlah Kelompok Gapoktan	25 Kelompok tiap Kab/Kota	Usul dari Dinas yg menangani ketahanan pangan di Kab/kota

BAB III

TUJUAN DAN SASARAN PEMBANGUNAN KETAHANAN PANGAN

3.1. Telaah dan Kajian Kebijakan Nasional

a. Visi dan Misi Nasional

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional tahun 2005-2026 menetapkan bahwa visi pembangunan nasional adalah untuk mewujudkan INDONESIA YANG MANDIRI, MAJU, ADIL DAN MAKMUR.

- Mandiri : berarti mampu mewujudkan kehidupan sejajar dan sederajat dengan bangsa lain dengan mengandalkan pada kemampuan dan kekuatan sendiri.
- Maju : berarti tingkat kemakmuran yang tinggi disertai dengan sistem dan kelembagaan politik dan hukum yang mantap
- Adil : berarti tidak ada pembatasan/diskriminasi dalam bentuk apapun, baik antarindividu, gender, maupun wilayah
- Makmur : berarti seluruh kebutuhan hidup masyarakat Indonesia telah terpenuhi sehingga dapat memberikan makna dan arti penting bagi bangsa-bangsa lain

Visi tersebut diwujudkan melalui 8 (delapan) misi yaitu:

1. Mewujudkan masyarakat berakhlak mulia, bermoral, beretika, berbudaya, dan beradab berdasarkan falsafah Pancasila dengan memperkuat jati diri dan karakter bangsa melalui pendidikan yang bertujuan membentuk manusia yang bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, mematuhi aturan hukum, memelihara kerukunan internal dan antarumat beragama, melaksanakan interaksi antarbudaya, mengembangkan modal sosial, menerapkan nilai-nilai luhur budaya bangsa, dan memiliki kebanggaan sebagai bangsa Indonesia sebagai landasan spiritual, moral, dan etika pembangunan bangsa.
2. Mewujudkan bangsa yang berdaya saing dengan membangun sumber daya manusia berkualitas dan berdaya saing; meningkatkan penguasaan dan pemanfaatan iptek melalui penelitian, pengembangan, dan penerapan menuju inovasi secara berkelanjutan; membangun infrastruktur yang maju; mere-formasi bidang hukum dan aparatur negara; dan memperkuat perekonomian domestik berbasis keunggulan setiap wilayah, menuju keunggulan kompetitif dengan membangun keterkaitan sistem produksi, distribusi, dan pelayanan termasuk pelayanan jasa dalam negeri

3. Mewujudkan masyarakat demokratis berlandaskan hukum dengan memantapkan kelembagaan demokrasi yang lebih kokoh; memperkuat peran masyarakat sipil; memperkuat kualitas desentralisasi dan otonomi daerah; menjamin pengembangan media dan kebebasan media dalam mengkomunikasikan kepentingan masyarakat; dan membenahi struktur hukum, meningkatkan budaya hukum dan menegakkan hukum secara adil, konsekuen, tidak diskriminatif, dan memihak pada rakyat kecil
4. Mewujudkan Indonesia aman, damai, dan bersatu dengan membangun kekuatan Tentara Nasional Indonesia (TNI) yang melampaui kekuatan esensial minimum dan disegani di kawasan regional dan internasional; memantapkan kemampuan dan meningkatkan profesionalisme Polri untuk melindungi dan mengayomi masyarakat, mencegah tindak kejahatan, dan menuntaskan tindak kriminalitas; membangun kapabilitas lembaga intelijen dan kontra-intelijen negara dalam penciptaan keamanan nasional; serta meningkatkan kesiapan komponen cadangan dan komponen pendukung pertahanan dan kontribusi industri pertahanan nasional dalam sistem pertahanan semesta
5. Mewujudkan pemerataan pembangunan dan berkeadilan dengan meningkatkan pembangunan daerah; mengurangi kesenjangan sosial secara menyeluruh dengan meningkatkan keberpihakan kepada masyarakat, kelompok dan wilayah/daerah yang masih lemah; menanggulangi kemiskinan dan pengangguran secara drastis; menyediakan akses yang sama bagi masyarakat terhadap berbagai pelayanan sosial serta sarana dan prasarana ekonomi; serta menghilangkan diskriminasi dalam berbagai aspek termasuk gender.
6. Mewujudkan Indonesia asri dan lestari dengan memperbaiki pengelolaan pembangunan untuk menjaga keseimbangan antara pemanfaatan, keberlanjutan, keberadaan, dan kegunaan sumber daya alam dan lingkungan hidup dengan tetap menjaga fungsi, daya dukung, dan kenyamanan dalam kehidupan pada masa kini dan masa depan, melalui pemanfaatan ruang yang serasi antara penggunaan untuk permukiman, kegiatan sosial ekonomi, dan upaya konservasi.
7. Mewujudkan Indonesia menjadi negara kepulauan yang mandiri, maju, kuat, dan berbasiskan kepentingan nasional dengan menumbuhkan wawasan bahari bagi masyarakat dan pemerintah; meningkatkan kapasitas sumber daya manusia yang berwawasan kelautan; mengelola wilayah laut nasional untuk mempertahankan

kedaulatan dan meningkatkan kemakmuran; dan membangun ekonomi kelautan secara terpadu dengan mengoptimalkan pemanfaatan sumber kekayaan laut secara berkelanjutan

8. Mewujudkan Indonesia berperan penting dalam pergaulan dunia internasional dengan memantapkan diplomasi Indonesia dalam rangka memperjuangkan kepentingan nasional; melanjutkan komitmen Indonesia dalam pembentukan identitas dan pemantapan integrasi internasional dan regional; dan mendorong kerja sama internasional, regional dan bilateral antarmasyarakat, antarkelompok, serta antarlembaga di berbagai bidang.

b. Kebijakan Kegiatan Pembangunan Ketahanan Pangan Dari Dana Dekonsentrasi

Strategi yang ditempuh dalam pembangunan ketahanan pangan meliputi :

- 1) Melaksanakan koordinasi secara sinergis dalam penyusunan kebijakan ketersediaan, distribusi, konsumsi pangan, dan keamanan pangan segar;
- 2) Mendorong pengembangan cadangan pangan, sistem distribusi pangan, penganekaragaman konsumsi dan keamanan pangan segar;
- 3) Mendorong peranserta swasta, masyarakat sipil, dan kelembagaan masyarakat lainnya dalam ketersediaan, distribusi, konsumsi dan keamanan pangan segar;
- 4) Menyelenggarakan program aksi pemberdayaan masyarakat dalam memecahkan permasalahan ketahanan pangan masyarakat;
- 5) Mendorong sinkronisasi pembiayaan program aksi antara APBN, APBD dan dana masyarakat;
- 6) Memecahkan permasalahan strategis ketahanan pangan melalui mekanisme Dewan Ketahanan Pangan.

Program dan kegiatan Ketahanan Pangan dana dekonsentrasi sebagai berikut :

1. **Pengembangan Ketersediaan Pangan dan Penanganan Kerawanan Pangan (Prioritas Nasional dan Bidang)**
 - a. Pengembangan Desa Mandiri Pangan,.
 - b. Pengembangan Lumbung Pangan Masyarakat,.
 - c. Penanganan Daerah Rawan Pangan (PDRP), Kegiatan dipadukan dengan penerapan instrumen Sistem Kewaspadaan Pangan dan Gizi (SKPG), melalui tahap

pengumpulan data, analisis, pemetaan, peramalan dan intervensi melalui penyediaan dana bansos.

- d. Koordinasi Analisis dan Perumusan Kebijakan Ketersediaan dan Penanganan Rawan Pangan, untuk perumusan kebijakan dan program ketersediaan dan kerawanan pangan, antara lain : Negara Bahan Makanan (NBM), peta ketahanan pangan dan kerentanan pangan serta data kemiskinan dan rawan pangan.

2. Pengembangan Sistem Distribusi dan Stabilitas Harga Pangan (Prioritas Nasional dan Bidang)

- a. Penguatan Lembaga Distribusi Pangan Masyarakat/LDPM, adalah kegiatan pemberdayaan Gapoktan dalam rangka meningkatkan kemampuan unit usaha yang dikelolanya yaitu melalui pengembangan unit-unit usaha distribusi/pemasaran/pengolahan dan pengelolaan cadangan pangan serta pembangunan sarana penyimpanan sehingga dapat meningkatkan posisi tawar petani, meningkatkan nilai tambah produksi petani dan mendekatkan akses terhadap sumber pangan.
- b. Koordinasi Analisis dan Perumusan Kebijakan Distribusi, Harga dan Akses Pangan, adalah kegiatan dalam rangka penyediaan data dan informasi serta hasil analisis, melalui pemantauan secara berkala dan berkelanjutan untuk perumusan kebijakan dan program distribusi dan harga pangan, antara lain : panel harga di daerah sentra pangan, pemantauan distribusi dan harga pangan pada Hari Besar Keagamaan dan Nasional (HBKN)serta peta distribusi pangan pokok.

3. Pengembangan Penganekaragaman Konsumsi Pangan dan Peningkatan Keamanan Pangan Segar (Prioritas Nasional Bidang)

- a. Peningkatan Percepatan Penganekaragaman Konsumsi Pangan, yaitu mendorong gerakan Percepatan Penganekaragaman Konsumsi Pangan (P2KP).
- b. Peningkatan dan Pengembangan Promosi Percepatan Penganekaragaman Konsumsi Pangan, dengan membangun kesadaran seluruh komponen masyarakat secara terprogram dan berkelanjutan tentang pentingnya penganekaragaman konsumsi pangan berbasis sumber daya lokal dan penurunan konsumsi beras per kapita ditingkat rumah tangga, yang dilaksanakan melalui media elektronik, media cetak, media luar ruang dan pameran, bekerjasama dengan lintas sektor dan swasta.

- c. Peningkatan Penanganan Keamanan Pangan Segar Tingkat Produsen dan Konsumen, yaitu meningkatkan kemampuan kelembagaan dan aparat di daerah untuk pengawasan, pengendalian dan pembinaan penanganan keamanan pangan segar serta meningkatkan sosialisasi, promosi dan edukasi tentang keamanan pangan segar kepada konsumen dan produsen.
- d. Koordinasi Analisis dan Perumusan Kebijakan Konsumsi dan Keamanan Pangan adalah kegiatan dalam rangka penyediaan data dan informasi serta hasil analisis, secara berkala dan berkelanjutan untuk perumusan kebijakan dan program konsumsi dan keamanan pangan segar, antara lain Pola Pangan Harapan, Peta Pola Konsumsi Pangan Wilayah.

4. Dukungan Manajemen dan Teknis Lainnya pada Dinas Ketahanan Pangan (Kegiatan pendukung)

- a. Peningkatan dan pemantapan Manajemen melalui kegiatan perencanaan, keuangan, hukum, organisasi, kepegawaian serta evaluasi dan pelaporan program peningkatan diversifikasi dan ketahanan pangan
- b. Pemantapan dan Pengembangan koordinasi perumusan kebijakan ketahanan pangan melalui Dewan Ketahanan Pangan, untuk penanganan ketahanan pangan, meningkatkan kualitas rumusan kebijakan ketahanan pangan untuk dasar pengambilan kebijakan serta memantapan peran koordinasi Sekretariat Dewan Ketahanan Pangan.

3.2. Tujuan dan Sasaran

Rencana Kerja (RENJA) Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Kalimantan Tengah disusun dengan tujuan dan sasaran sebagaimana tabel berikut :

Tabel 3.1. Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Capain Tahun (n-1)	Capain Tahun (n)
1	Ketersediaan pangan utama (surplus beras dalam ton)	Terwujudnya Pemantapan Ketersediaan Pangan dan Distribusi dan Akses Pangan	a. Jumlah cadangan pangan pokok pemerintah provinsi (beras)	40.000	34.167
			b. Koefisien varian	1,79	≤ 5 %

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Capain Tahun (n-1)	Capain Tahun (n)
			harga beras/ fluktuasi harga beras		
2	Analisis Neraca Bahan Makanan (NBM)				
	a. Ketersediaan Energi (Kal/Kapita/hari)	Terwujudnya Ketersediaan Energi Pangan	Jumlah Ketersediaan Energi Pangan	3.071	2.625
	b. Ketersediaan Protein (Gram/Kapita/hari)	Terwujudnya Ketersediaan Protein	Jumlah Ketersediaan Protein	102,53	63
2	Penguatan Cadangan Pangan (%)	Terwujudnya cadangan pangan pemerintah pemrintah provinsi (beras)	Jumlah Cadangan Pangan Pemerintah Provinsi (Beras)	55,57	120
3	Skor PPH	Terwujudnya Diversifikasi Pangan	Analisis Skor PPH Provinsi Kalimantan Tengah	87,2	90,4
4	Pekarangna Pangan Lestari (P2L)	Terwujudnya Diversifikasi Pangan	Jumlah Kelompok Penganekaragaman Konsumsi (P2KP) / Diversifikasi Konsumsi Pangan	31	22
5	Penanganan Daerah Rawan Pangan (%)				
	a. Analisis Kewaspadaan Pangan dan Gizi (SKPG)	Terwujudnya Penanganan Daerah Rawan Pangan	Jumlah analisis SKPG	≤ 20	1,47
	b. Analisis Food Security and Vulnerability Atlas (FSVA)	Terwujudnya Penanganan Daerah Rawan Pangan	Jumlah analisis Food Security and Vulnerability Atlas (FSVA)	≤ 20	1,47
6	a. Persentase jumlah sampel pangan segar yang aman dengan jumlah sampel yang diambil	Terwujudnya keamanan pangan segar	jumlah sampel pangan segar yang aman dengan jumlah sampel yang diambil	90	90,5
	b. Jumlah pelaku usaha pangan segar asal tumbuhan	Terwujudnya keamanan pangan segar	Jumlah pelaku usaha pangan segar asal tumbuhan	250	260

3.3. Program dan Kegiatan

Tabel 4.1 Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2024
Provinsi Kalimantan Tengah

Nama Perangkat Daerah : Dinas Ketahanan Pangan

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/ Kegiatan	Prioritas Daerah	Lokasi	Capaian Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Sub Kegiatan		Pagu Tahun 2023	Pagu Tahun 2024
				Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target		
	Urusan Pemerintahan Bidang Pangan		Provinsi	Kontribusi Penguatan Cadangan pangan daerah (Persentase)	70,50%	Kontribusi Penguatan Cadangan pangan daerah (Persentase)	70,50%	Kontribusi Penguatan Cadangan pangan daerah (Persentase)	70,50%	-	-
			Provinsi	Ketersediaan pangan utama (surplus beras dalam ton)	36334 Ton	Ketersediaan pangan utama (surplus beras dalam ton)	36334 Ton	Ketersediaan pangan utama (surplus beras dalam ton)	36334 Ton		
2.09.02	PROGRAM PENGELOLA AN SUMBER DAYA EKONOMI UNTUK KEDAULATA N DAN KEMANDIRIA N PANGAN		Provinsi	Ketersediaan pangan utama (surplus beras dalam ton)	36334 Ton	Ketersediaan pangan utama (surplus beras dalam ton)	36334 Ton	Ketersediaan pangan utama (surplus beras dalam ton)	36334 Ton	15,300,000	16,000,000
2.09.02.1.01	Penyediaan Infrastruktur dan Seluruh Pendukung Kemandirian Pangan pada berbagai Sektor sesuai Kewenangan Daerah Provinsi		Provinsi	Jumlah sasaran luas tanam, luas panen, produktivitas dan produksi tanaman pangan, hortikultura, produksi perternakan, luas areal dan produksi perkebunan dan produksi perikanan provinsi kalimantan tengah	36334 Ton	Jumlah sasaran luas tanam, luas panen, produktivitas dan produksi tanaman pangan, hortikultura, produksi perternakan, luas areal dan produksi perkebunan dan produksi perikanan provinsi kalimantan tengah	36334 Ton	Jumlah sasaran luas tanam, luas panen, produktivitas dan produksi tanaman pangan, hortikultura, produksi perternakan, luas areal dan produksi perkebunan dan produksi perikanan provinsi kalimantan tengah	36334 Ton	15,300,000	16,000,000
			Provinsi	Analisis skor PPH Provinsi Kalimantan Tengah	91%	Analisis skor PPH Provinsi Kalimantan Tengah	91%	Analisis skor PPH Provinsi Kalimantan Tengah	91%		
2.09.03	PROGRAM PENINGKATA N DIVERSIFIKA SI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKA T		Provinsi	Kontribusi Penguatan Cadangan Pangan Daerah (%)	70,50%	Kontribusi Penguatan Cadangan Pangan Daerah (%)	70,50%	Kontribusi Penguatan Cadangan Pangan Daerah (%)	70,50%	2.921,841,90 0	2.594.388.500
			Provinsi	Skor Pola Pangan Harapan (PPH) Konsumsi (%)	91%	Skor Pola Pangan Harapan (PPH) Konsumsi (%)	91%	Skor Pola Pangan Harapan (PPH) Konsumsi (%)	91%	229,500,000	328.000.000

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/ Kegiatan	Prioritas Daerah	Lokasi	Capaian Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Sub Kegiatan		Pagu Tahun 2023	Pagu Tahun 2024
				Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target		
2.09.03.1.01	Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Provinsi dalam rangka Stabilitas Pasokan dan Harga Pangan		Provinsi	Jumlah laporan analisis Neraca Bahan Makanan (NBM) dan PPH ketersediaan	1 Dokumen	Jumlah laporan analisis Neraca Bahan Makanan (NBM) dan PPH ketersediaan	1 Dokumen	Jumlah laporan analisis Neraca Bahan Makanan (NBM) dan PPH ketersediaan	1 Dokumen	1,905,000,000	1.518.000.000
2.09.03.1.01.01	Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Provinsi dalam rangka Stabilitas Pasokan dan Harga Pangan		Provinsi	Jumlah Kelompok Lembaga distribusi pangan	11 Kelompok	Jumlah Kelompok Lembaga distribusi pangan	11 Kelompok	Jumlah Kelompok Lembaga distribusi pangan	11 Kelompok	25,000,000	27,000,000
2.09.03.1.01.02	Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Provinsi dalam rangka Stabilitas Pasokan dan Harga Pangan		Provinsi	Jumlah kelompok ibu menyusui dan Ibu hamil yang mengikuti kegiatan dan jumlah kelompok wanita pangan lokal	3 Kelompok	Jumlah kelompok ibu menyusui dan Ibu hamil yang mengikuti kegiatan dan jumlah kelompok wanita pangan lokal	3 Kelompok	Jumlah kelompok ibu menyusui dan Ibu hamil yang mengikuti kegiatan dan jumlah kelompok wanita pangan lokal	3 Kelompok	85,000,000	88,000,000
2.09.03.1.01.03	Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Provinsi dalam rangka Stabilitas Pasokan dan Harga Pangan		Provinsi	Jumlah laporan pemantauan Analisis Akses Pangan dan laporan pemantauan distribusi pangan	2 Laporan	Jumlah laporan pemantauan Analisis Akses Pangan dan laporan pemantauan distribusi pangan	2 Laporan	Jumlah laporan pemantauan Analisis Akses Pangan dan laporan pemantauan distribusi pangan	2 Laporan	45,000,000	48,000,000
2.09.03.1.01.04	Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Provinsi dalam rangka Stabilitas Pasokan dan Harga Pangan		Provinsi	jumlah Dokumen Laporan pemantauan Analisis Tren Harga Pangan Pokok	1 Dokumen	jumlah Dokumen Laporan pemantauan Analisis Tren Harga Pangan Pokok	1 Dokumen	jumlah Dokumen Laporan pemantauan Analisis Tren Harga Pangan Pokok	1 Dokumen	750,000,000	750,000,000
2.09.03.1.02.05	Pengelolaan dan Keseimbangan Cadangan Pangan Provinsi		Provinsi	Jumlah Kelompok Lumbung yang mandiri	12 Kelompok	Jumlah Kelompok Lumbung yang mandiri	12 Kelompok	Jumlah Kelompok Lumbung yang mandiri	12 Kelompok	1,000,000,000	1,000,000,000
2.09.03.1.02	Pengelolaan dan Keseimbangan Cadangan Pangan Provinsi		Provinsi	Dokumen sasaran produksi	1 Dokumen	Dokumen sasaran produksi	1 Dokumen	Dokumen sasaran produksi	1 Dokumen	15,000,000	16,000,000

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/ Kegiatan	Prioritas Daerah	Lokasi	Capaian Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Sub Kegiatan		Pagu Tahun 2023	Pagu Tahun 2024
				Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target		
2.09.03.1.02.01	Pengelolaan dan Keseimbangan Cadangan Pangan Provinsi		Provinsi	Pengembangan cadangan pangan pemerintah provinsi	783 Kg	Pengembangan cadangan pangan pemerintah provinsi	783 Kg	Pengembangan cadangan pangan pemerintah provinsi	783 Kg	760,341,900	573.000.000
2.09.03.1.04	Promosi Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi melalui Media Provinsi		Provinsi	Jumlah kegiatan Ekspose dan Promosi Pembangunan Ketahanan Pangan	1 Kegiatan	Jumlah kegiatan Ekspose dan Promosi Pembangunan Ketahanan Pangan	1 Kegiatan	Jumlah kegiatan Ekspose dan Promosi Pembangunan Ketahanan Pangan	1 Kegiatan	226,500,000	434,112,500
2.09.03.1.04	Promosi Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi melalui Media Provinsi		Provinsi	Jumlah Peserta kegiatan sosialisasi diversifikasi pangan	3 Peserta	Jumlah Peserta kegiatan sosialisasi diversifikasi pangan	3 Peserta	Jumlah Peserta kegiatan sosialisasi diversifikasi pangan	3 Peserta	80,000,000	80,000,000
2.09.03.1.04	Promosi Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi melalui Media Provinsi		Provinsi	jumlah Dokumen Laporan Terlaksanaan Analisis Pola Pangan Harapan	1 Dokumen	jumlah Dokumen Laporan Terlaksanaan Analisis Pola Pangan Harapan	1 Dokumen	jumlah Dokumen Laporan Terlaksanaan Analisis Pola Pangan Harapan	1 Dokumen	125,000,000	328,000,000
			Provinsi	Persentase jumlah sampel pangan segar yang aman dengan jumlah sampel yang diambil	91%	Persentase jumlah sampel pangan segar yang aman dengan jumlah sampel yang diambil	91%	Persentase jumlah sampel pangan segar yang aman dengan jumlah sampel yang diambil	91%		
2.09.05	PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN		Provinsi	Persentase sampel pangan segar yang aman dengan jumlah sampel yang diambil (%)	91%	Persentase sampel pangan segar yang aman dengan jumlah sampel yang diambil (%)	91%	Persentase sampel pangan segar yang aman dengan jumlah sampel yang diambil (%)	91%	90,000,000	116.000.000
2.09.05.1.01	Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Distribusi Lintas Daerah Kabupaten/Kota		Provinsi	Jumlah Peserta Pelatihan Petugas Pengambil Contoh	35 Peserta	Jumlah Peserta Pelatihan Petugas Pengambil Contoh	35 Peserta	Jumlah Peserta Pelatihan Petugas Pengambil Contoh	35 Peserta	90,000,000	116.000.000
2.09.05.1.01	Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Distribusi Lintas Daerah Kabupaten/Kota		Provinsi	Jumlah sertifikasi prima keamanan pangan segar	4 Sertifikasi	Jumlah sertifikasi prima keamanan pangan segar	4 Sertifikasi	Jumlah sertifikasi prima keamanan pangan segar	4 Sertifikasi	20,000,000	20.845.000
2.09.05.1.01	Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Distribusi Lintas Daerah Kabupaten/Kota		Provinsi	jumlah registrasi pemberdayaan kelompok pangan lokal	2 Kelompok	jumlah registrasi pemberdayaan kelompok pangan lokal	2 Kelompok	jumlah registrasi pemberdayaan kelompok pangan lokal	2 Kelompok	20,000,000	20.800.000

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/ Kegiatan	Prioritas Daerah	Lokasi	Capaian Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Sub Kegiatan		Pagu Tahun 2023	Pagu Tahun 2024
				Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target		
2.09.05.1.01	Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Distribusi Lintas Daerah Kabupaten/Kota		Provinsi	Jumlah sampel mutu keamanan pangan segar dan olahan yang diteliti	25 Jumlah Sampel	Jumlah sampel mutu keamanan pangan segar dan olahan yang diteliti	25 Jumlah Sampel	Jumlah sampel mutu keamanan pangan segar dan olahan yang diteliti	25 Jumlah Sampel	20,000,000	20,800,000
2.09.05.1.01	Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Distribusi Lintas Daerah Kabupaten/Kota		Provinsi	jumlah sarana penunjang laboratorium	2 Unit	jumlah sarana penunjang laboratorium	2 Unit	jumlah sarana penunjang laboratorium	2 Unit	15,000,000	15,600,000
			Provinsi	Penanganan daerah rawan pangan (%)	2%	Penanganan daerah rawan pangan (%)	2%	Penanganan daerah rawan pangan (%)	2%		
2.09.04	PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN		Provinsi	Penanganan daerah rawan pangan (%)	2%	Penanganan daerah rawan pangan (%)	2%	Penanganan daerah rawan pangan (%)	2%	50,000,000	152,025,000
2.09.04.1.01	Penyusunan Peta Kerentanan dan Ketahanan Pangan kewenangan Provinsi		Provinsi	Jumlah laporan analisis dan peta (FSVA) dan situasi pangan dan gizi (SKPG)	2 Dokumen	Jumlah laporan analisis dan peta (FSVA) dan situasi pangan dan gizi (SKPG)	2 Dokumen	Jumlah laporan analisis dan peta (FSVA) dan situasi pangan dan gizi (SKPG)	2 Dokumen	35,500,000	116,000,000
2.09.04.1.01	Penyusunan Peta Kerentanan dan Ketahanan Pangan kewenangan Provinsi		Provinsi	Jumlah Laporan identifikasi, investigasi, dan Pemantauan daerah Rawan Pangan	1 Laporan	Jumlah Laporan identifikasi, investigasi, dan Pemantauan daerah Rawan Pangan	1 Laporan	Jumlah Laporan identifikasi, investigasi, dan Pemantauan daerah Rawan Pangan	1 Laporan	35,500,000	36,025,000
			Provinsi	Nilai SAKIP	BB Predikat	Nilai SAKIP	BB Predikat	Nilai SAKIP	BB Predikat		
			Provinsi	Nilai SAKIP	BB Predikat	Nilai SAKIP	BB Predikat	Nilai SAKIP	BB Predikat		
X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI		Provinsi	Presentase Keterlaksanaan	100%	Presentase Keterlaksanaan	100%	Presentase Keterlaksanaan	100%	8,193,648,501	8,554,081,445
X.XX.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Provinsi	Jumlah Dokumen, Perencanaan, pengendalian dan evaluasi kegiatan	12 Dokumen	Jumlah Dokumen, Perencanaan, pengendalian dan evaluasi kegiatan	12 Dokumen	Jumlah Dokumen, Perencanaan, pengendalian dan evaluasi kegiatan	12 Dokumen	173,001,101	250,000,000
X.XX.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		Provinsi	ASN penerima gaji dan tunjangan	52 Orang	ASN penerima gaji dan tunjangan	52 Orang	ASN penerima gaji dan tunjangan	52 Orang	6,837,095,900	6,607,051,445
X.XX.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		Provinsi	Jumlah laporan realisasi keuangan SKPD	1 Dokumen Laporan	Jumlah laporan realisasi keuangan SKPD	1 Dokumen Laporan	Jumlah laporan realisasi keuangan SKPD	1 Dokumen Laporan	12,910,400	22,000,000
X.XX.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		Provinsi	Jumlah laporan realisasi keuangan per semester SKPD	1 Dokumen Laporan	Jumlah laporan realisasi keuangan per semester SKPD	1 Dokumen Laporan	Jumlah laporan realisasi keuangan per semester SKPD	1 Dokumen Laporan	6,000,000	22,000,000
X.XX.01.1.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah		Provinsi	Jumlah laporan aset barang daerah	1 Dokumen Laporan	Jumlah laporan aset barang daerah	1 Dokumen Laporan	Jumlah laporan aset barang daerah	1 Dokumen Laporan	28,000,000	30,000,000

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/ Kegiatan	Prioritas Daerah	Lokasi	Capaian Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Sub Kegiatan		Pagu Tahun 2023	Pagu Tahun 2024
				Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target		
X.XX.01.1.0 5	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		Provinsi	Jumlah PNS yang mengikuti pendidikan dan pelatihan formal	2 Orang	Jumlah PNS yang mengikuti pendidikan dan pelatihan formal	2 Orang	Jumlah PNS yang mengikuti pendidikan dan pelatihan formal	2 Orang	5,000,000	15.000.000
X.XX.01.1.0 6	Administrasi Umum Perangkat Daerah		Provinsi	Persentase kinerja internal yang terlayani dengan baik	100%	Persentase kinerja internal yang terlayani dengan baik	100%	Persentase kinerja internal yang terlayani dengan baik	100%	241,471,500	442.000.000
X.XX.01.1.0 7	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		Provinsi	Jumlah pengadaan/ pemeliharaan perlengkap an kerja gedung kantor	5 Unit	Jumlah pengadaan/ pemeliharaan perlengkap an kerja gedung kantor	5 Unit	Jumlah pengadaan/ pemeliharaan perlengkap an kerja gedung kantor	5 Unit	92,120,000	352.000.000
X.XX.01.1.0 8	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Provinsi	Persentase kinerja internal yang terlayani dengan baik	100%	Persentase kinerja internal yang terlayani dengan baik	100%	Persentase kinerja internal yang terlayani dengan baik	100%	621,480,000	621,480,000
X.XX.01.1.0 9	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Provinsi	Jumlah pemeliharaan mesin Roda 4 dan Roda 2 dan mesin lainnya	48 Unit Kendaraan R2 & R4	Jumlah pemeliharaan mesin Roda 4 dan Roda 2 dan mesin lainnya	48 Unit Kendaraan R2 & R4	Jumlah pemeliharaan mesin Roda 4 dan Roda 2 dan mesin lainnya	48 Unit Kendaraan R2 & R4	195,480,000	250.000.000

BAB IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT SKPD

4.1. Program dan Kegiatan

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan mengamanatkan bahwa negara berkewajiban mewujudkan ketersediaan, keterjangkauan, dan pemenuhan konsumsi pangan yang cukup, aman, bermutu, dan bergizi seimbang, baik pada tingkat nasional maupun daerah hingga perseorangan secara merata di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia sepanjang waktu dengan memanfaatkan sumber daya, kelembagaan, dan budaya lokal. Salah satu sub agenda prioritas untuk mewujudkan agenda pembangunan yakni kemandirian ekonomi dengan menggerakkan sektor-sektor strategis ekonomi lokal, regional dan domestik. Dalam rangka meningkatkan dan memperkuat kedaulatan pangan tersebut, maka kebijakan diarahkan pada: (1) pemantapan ketahanan pangan menuju kemandirian pangan dengan peningkatan produksi pangan pokok; (2) stabilisasi harga pangan; (3) perbaikan kualitas konsumsi pangan dan gizi masyarakat; (4) mitigasi gangguan terhadap ketahanan pangan; dan (5) peningkatan kesejahteraan pelaku usaha pangan.

Dalam rangka pemantapan ketahanan pangan, Kementerian Pertanian akan fokus pada peningkatan produksi pangan pokok strategis padi, jagung, kedelai, gula (tebu) dan daging sapi-kerbau serta komoditas pertanian lainnya, untuk memenuhi kebutuhan pangan di dalam negeri. Pemantapan ketahanan pangan tersebut, harus berlandaskan kemandirian dan kedaulatan pangan yang didukung oleh subsistem ketersediaan, distribusi dan konsumsi pangan yang terintegrasi.

Pencapaian ketahanan pangan yang mantap merupakan wahana penguatan stabilitas ekonomi dan politik, dan jaminan ketersediaan pangan dengan harga yang terjangkau. Selain itu juga sebagai perwujudan komitmen bangsa untuk ikut serta mewujudkan tujuan pembangunan global (*Millennium Development Goals/MDGs*) dalam menurunkan kemiskinan dan kelaparan. Indonesia telah berhasil mencapai target *MDGs* poin 1 (satu) dengan menurunkan proporsi tingkat kelaparan dari 19,9 persen di tahun 1990-1992 hingga menjadi 8,6 persen pada tahun 2010-2012. Prestasi ini melebihi penurunan angka proporsi yang ditargetkan dalam *MDG* yaitu sebesar 9,9 persen (catatan FAO, Juni 2013). Badan Ketahanan Pangan, melalui program seperti Desa Mandiri Pangan,

Percepatan Penganekaragaman Konsumsi Pangan, Lembaga Distribusi Pangan Masyarakat, dan Lumbung Pangan Masyarakat, aktif memberdayakan masyarakat agar keluar dari lingkaran kemiskinan.

Upaya memantapkan ketahanan pangan menuju kemandirian pangan, menghadapi tantangan dan permasalahan yang berasal dari dalam negeri maupun luar negeri. Pemenuhan kebutuhan pangan pokok dari produksi dalam negeri, dihadapkan pada permasalahan antara lain: (i) konversi lahan pertanian yang terus berlanjut karena perkembangan industri dan lokasi pemukiman; (ii) perluasan lahan yang terkendala baik kualitas tanah maupun kepemilikan lahan di luar jawa; (iii) perubahan iklim dan cuaca yang mempengaruhi produksi pangan; dan (iv) agribisnis pangan yang belum optimal sangat mempengaruhi tingkat kesejahteraan petani. Sementara itu, situasi ekonomi dan perdagangan bebas di dunia internasional, berpengaruh cukup kuat terhadap ketahanan pangan di dalam negeri, terutama harga dan pasokan pangan yang begitu dinamis mempengaruhi ketersediaan pangan di dalam negeri.

Dalam menghadapi tantangan dan permasalahan ketahanan pangan tersebut, Dinas Ketahanan Pangan selaku Sekretariat Dewan Ketahanan Pangan berperan secara aktif untuk mengoordinasikan, mensinkronkan dan mendorong seluruh pemangku kepentingan baik secara horizontal maupun vertikal dalam mewujudkan ketahanan pangan sampai tingkat perseorangan dengan berlandaskan kedaulatan pangan dan kemandirian pangan secara berkesinambungan.

Renstra Dinas Ketahanan Pangan Tahun 2021-2026 disusun sebagai acuan pelaksanaan kegiatan jangka menengah, untuk mewujudkan pemantapan ketahanan pangan sampai tingkat perseorangan, yang tercermin dari menurunnya jumlah penduduk rawan pangan, stabilnya harga dan pasokan pangan pokok, dan meningkatnya keanekaragaman konsumsi pangan masyarakat. Renstra tersebut akan dijabarkan dalam rencana kegiatan tahunan dengan memperhatikan evaluasi tahunan dan perkembangan kebijakan dan kebutuhan masyarakat.

Program pelayanan dan dukungan administrasi perkantoran terdiri dari 6 program dengan jumlah kegiatan 31 kegiatan, dengan kegiatan penunjang teknis Dinas terdapat 8 Program dengan jumlah kegiatan 35 dengan kebutuhan dana tahun 2019 sebesar Rp. 8.560.029.615,-. Program dan kegiatan tersebut menunjang program PM2L, program

Kalteng Sejahtera, Pemberdayaan masyarakat, pengentasean kemiskinan (MDGs), Pencapaian SPM ketahanan pangan, pendayagunaan potensi daerah.

Untuk mencapai tujuan dan sasaran pembangunan Ketahanan Pangan yang telah ditetapkan dibutuhkan program/kegiatan, yang dialokasikan dari APBD Provinsi dan APBN tahun anggaran 2022 dan 2023 sebagaimana tabel 4.2 dan Tabel :

Tabel 4.2
Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2024
Provinsi Kalimantan Tengah

Nama Perangkat Daerah : Dinas Ketahanan Pangan

Total pagu 2024 = 11.410.109.845

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/ Kegiatan	Prioritas Daerah	Lokasi	Capaian Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Sub Kegiatan		Pagu Tahun 2023	Pagu Tahun 2024
				Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target		
	Urusan Pemerintahan Bidang Pangan		Provinsi	Kontribusi Penguatan Cadangan pangan daerah (Persentase)	70,50%	Kontribusi Penguatan Cadangan pangan daerah (Persentase)	70,50%	Kontribusi Penguatan Cadangan pangan daerah (Persentase)	70,50%	-	-
			Provinsi	Ketersediaan pangan utama (surplus beras dalam ton)	36334 Ton	Ketersediaan pangan utama (surplus beras dalam ton)	36334 Ton	Ketersediaan pangan utama (surplus beras dalam ton)	36334 Ton		
2.09.02	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA EKONOMI UNTUK KEDAULATAN DAN KEMANDIRIAN PANGAN		Provinsi	Ketersediaan pangan utama (surplus beras dalam ton)	36334 Ton	Ketersediaan pangan utama (surplus beras dalam ton)	36334 Ton	Ketersediaan pangan utama (surplus beras dalam ton)	36334 Ton	15,300,000	16,000,000
2.09.02.1.01	Penyediaan Infrastruktur dan Seluruh Pendukung Kemandirian Pangan pada berbagai Sektor sesuai Kewenangan Daerah Provinsi		Provinsi	Jumlah sasaran luas tanam, luas panen, produktivitas dan produksi tanaman pangan, hortikultura, produksi perternakan, luas areal dan produksi perkebunan dan produksi perikanan provinsi kalimantan tengah	36334 Ton	Jumlah sasaran luas tanam, luas panen, produktivitas dan produksi tanaman pangan, hortikultura, produksi perternakan, luas areal dan produksi perkebunan dan produksi perikanan provinsi kalimantan tengah	36334 Ton	Jumlah sasaran luas tanam, luas panen, produktivitas dan produksi tanaman pangan, hortikultura, produksi perternakan, luas areal dan produksi perkebunan dan produksi perikanan provinsi kalimantan tengah	36334 Ton	15,300,000	16,000,000

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/ Kegiatan	Prioritas Daerah	Lokasi	Capaian Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Sub Kegiatan		Pagu Tahun 2023	Pagu Tahun 2024
				Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target		
			Provinsi	Analisis skor PPH Provinsi Kalimantan Tengah	91%	Analisis skor PPH Provinsi Kalimantan Tengah	91%	Analisis skor PPH Provinsi Kalimantan Tengah	91%		
2.09.03	PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT		Provinsi	Kontribusi Penguatan Cadangan Pangan Daerah (%)	70,50%	Kontribusi Penguatan Cadangan Pangan Daerah (%)	70,50%	Kontribusi Penguatan Cadangan Pangan Daerah (%)	70,50%	2,921,841,900	2.594.388.500
			Provinsi	Skor Pola Pangan Harapan (PPH) Konsumsi (%)	91%	Skor Pola Pangan Harapan (PPH) Konsumsi (%)	91%	Skor Pola Pangan Harapan (PPH) Konsumsi (%)	91%	229,500,000	328.000.000
2.09.03.1.01	Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Provinsi dalam rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan		Provinsi	Jumlah laporan analisis Neraca Bahan Makanan (NBM) dan PPH ketersediaan	1 Dokumen	Jumlah laporan analisis Neraca Bahan Makanan (NBM) dan PPH ketersediaan	1 Dokumen	Jumlah laporan analisis Neraca Bahan Makanan (NBM) dan PPH ketersediaan	1 Dokumen	1,905,000,000	1.518.000.000
2.09.03.1.01.01	Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Provinsi dalam rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan		Provinsi	Jumlah Kelompok Lembaga distribusi pangan	11 Kelompok	Jumlah Kelompok Lembaga distribusi pangan	11 Kelompok	Jumlah Kelompok Lembaga distribusi pangan	11 Kelompok	25,000,000	27,000,000

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/ Kegiatan	Prioritas Daerah	Lokasi	Capaian Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Sub Kegiatan		Pagu Tahun 2023	Pagu Tahun 2024
				Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target		
2.09.03.1.01.02	Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Provinsi dalam rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan		Provinsi	Jumlah kelompok ibu menyusui dan Ibu hamil yang mengikuti kegiatan dan jumlah kelompok wanita pangan lokal	3 Kelompok	Jumlah kelompok ibu menyusui dan Ibu hamil yang mengikuti kegiatan dan jumlah kelompok wanita pangan lokal	3 Kelompok	Jumlah kelompok ibu menyusui dan Ibu hamil yang mengikuti kegiatan dan jumlah kelompok wanita pangan lokal	3 Kelompok	85,000,000	88,000,000
2.09.03.1.01.03	Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Provinsi dalam rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan		Provinsi	Jumlah laporan pemantauan Analisis Akses Pangan dan laporan pemantauan distribusi pangan	2 Laporan	Jumlah laporan pemantauan Analisis Akses Pangan dan laporan pemantauan distribusi pangan	2 Laporan	Jumlah laporan pemantauan Analisis Akses Pangan dan laporan pemantauan distribusi pangan	2 Laporan	45,000,000	48,000,000
2.09.03.1.01.04	Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Provinsi dalam rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan		Provinsi	jumlah Dokumen Laporan pemantauan Analisis Tren Harga Pangan Pokok	1 Dokumen	jumlah Dokumen Laporan pemantauan Analisis Tren Harga Pangan Pokok	1 Dokumen	jumlah Dokumen Laporan pemantauan Analisis Tren Harga Pangan Pokok	1 Dokumen	750,000,000	750,000,000
2.09.03.1.02.05	Pengelolaan dan Keseimbangan Cadangan Pangan Provinsi		Provinsi	Jumlah Kelompok Lumbung yang mandiri	12 Kelompok	Jumlah Kelompok Lumbung yang mandiri	12 Kelompok	Jumlah Kelompok Lumbung yang mandiri	12 Kelompok	1,000,000,000	1,000,000,000
2.09.03.1.02	Pengelolaan dan Keseimbangan Cadangan Pangan Provinsi		Provinsi	Dokumen sasaran produksi	1 Dokumen	Dokumen sasaran produksi	1 Dokumen	Dokumen sasaran produksi	1 Dokumen	15,000,000	16,000,000
2.09.03.1.02.01	Pengelolaan dan Keseimbangan Cadangan Pangan Provinsi		Provinsi	Pengembangan cadangan pangan pemerintah provinsi	783 Kg	Pengembangan cadangan pangan pemerintah provinsi	783 Kg	Pengembangan cadangan pangan pemerintah provinsi	783 Kg	760,341,900	573.000.000

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/ Kegiatan	Prioritas Daerah	Lokasi	Capaian Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Sub Kegiatan		Pagu Tahun 2023	Pagu Tahun 2024
				Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target		
2.09.03.1.04	Promosi Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi melalui Media Provinsi		Provinsi	Jumlah kegiatan Ekspose dan Promosi Pembangunan Ketahanan Pangan	1 Kegiatan	Jumlah kegiatan Ekspose dan Promosi Pembangunan Ketahanan Pangan	1 Kegiatan	Jumlah kegiatan Ekspose dan Promosi Pembangunan Ketahanan Pangan	1 Kegiatan	226,500,000	434,112,500
2.09.03.1.04	Promosi Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi melalui Media Provinsi		Provinsi	Jumlah Peserta kegiatan sosialisasi diversifikasi pangan	3 Peserta	Jumlah Peserta kegiatan sosialisasi diversifikasi pangan	3 Peserta	Jumlah Peserta kegiatan sosialisasi diversifikasi pangan	3 Peserta	80,000,000	80,000,000
2.09.03.1.04	Promosi Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi melalui Media Provinsi		Provinsi	jumlah Dokumen Laporan Terlaksananya Analisis Pola Pangan Harapan	1 Dokumen	jumlah Dokumen Laporan Terlaksananya Analisis Pola Pangan Harapan	1 Dokumen	jumlah Dokumen Laporan Terlaksananya Analisis Pola Pangan Harapan	1 Dokumen	125,000,000	328,000,000
			Provinsi	Persentase jumlah sampel pangan segar yang aman dengan jumlah sampel yang diambil	91%	Persentase jumlah sampel pangan segar yang aman dengan jumlah sampel yang diambil	91%	Persentase jumlah sampel pangan segar yang aman dengan jumlah sampel yang diambil	91%		
2.09.05	PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN		Provinsi	Persentase sampel pangan segar yang aman dengan jumlah sampel yang diambil (%)	91%	Persentase sampel pangan segar yang aman dengan jumlah sampel yang diambil (%)	91%	Persentase sampel pangan segar yang aman dengan jumlah sampel yang diambil (%)	91%	90,000,000	116.000.000

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/ Kegiatan	Prioritas Daerah	Lokasi	Capaian Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Sub Kegiatan		Pagu Tahun 2023	Pagu Tahun 2024
				Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target		
2.09.05.1.01	Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Distribusi Lintas Daerah Kabupaten/Kota		Provinsi	Jumlah Peserta Pelatihan Petugas Pengambil Contoh	35 Peserta	Jumlah Peserta Pelatihan Petugas Pengambil Contoh	35 Peserta	Jumlah Peserta Pelatihan Petugas Pengambil Contoh	35 Peserta	90,000,000	116.000.000
2.09.05.1.01	Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Distribusi Lintas Daerah Kabupaten/Kota		Provinsi	Jumlah sertifikasi prima keamanan pangan segar	4 Sertifikasi	Jumlah sertifikasi prima keamanan pangan segar	4 Sertifikasi	Jumlah sertifikasi prima keamanan pangan segar	4 Sertifikasi	20,000,000	20.845.000
2.09.05.1.01	Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Distribusi Lintas Daerah Kabupaten/Kota		Provinsi	jumlah registrasi pemberdayaan kelompok pangan lokal	2 Kelompok	jumlah registrasi pemberdayaan kelompok pangan lokal	2 Kelompok	jumlah registrasi pemberdayaan kelompok pangan lokal	2 Kelompok	20,000,000	20.800.000
2.09.05.1.01	Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Distribusi Lintas Daerah Kabupaten/Kota		Provinsi	Jumlah sampel mutu keamanan pangan segar dan olahan yang diteliti	25 Jumlah Sampel	Jumlah sampel mutu keamanan pangan segar dan olahan yang diteliti	25 Jumlah Sampel	Jumlah sampel mutu keamanan pangan segar dan olahan yang diteliti	25 Jumlah Sampel	20,000,000	20.800.000
2.09.05.1.01	Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Distribusi Lintas Daerah Kabupaten/Kota		Provinsi	jumlah sarana penunjang laboratorium	2 Unit	jumlah sarana penunjang laboratorium	2 Unit	jumlah sarana penunjang laboratorium	2 Unit	15,000,000	15,600,000
			Provinsi	Penanganan daerah rawan pangan (%)	2%	Penanganan daerah rawan pangan (%)	2%	Penanganan daerah rawan pangan (%)	2%		
2.09.04	PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN		Provinsi	Penanganan daerah rawan pangan (%)	2%	Penanganan daerah rawan pangan (%)	2%	Penanganan daerah rawan pangan (%)	2%	50,000,000	152.025.000
2.09.04.1.01	Penyusunan Peta Kerentanan dan Ketahanan Pangan kewenangan Provinsi		Provinsi	Jumlah laporan analisis dan peta (FSVA) dan situasi pangan dan gizi (SKPG)	2 Dokumen	Jumlah laporan analisis dan peta (FSVA) dan situasi pangan dan gizi (SKPG)	2 Dokumen	Jumlah laporan analisis dan peta (FSVA) dan situasi pangan dan gizi (SKPG)	2 Dokumen	35,500,000	116,000,000

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/ Kegiatan	Prioritas Daerah	Lokasi	Capaian Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Sub Kegiatan		Pagu Tahun 2023	Pagu Tahun 2024
				Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target		
2.09.04.1.01	Penyusunan Peta Kerentanan dan Ketahanan Pangan kewenangan Provinsi		Provinsi	Jumlah Laporan identifikasi, investigasi, dan Pemantauan daerah Rawan Pangan	1 Laporan	Jumlah Laporan identifikasi, investigasi, dan Pemantauan daerah Rawan Pangan	1 Laporan	Jumlah Laporan identifikasi, investigasi, dan Pemantauan daerah Rawan Pangan	1 Laporan	35,500,000	36,025,000
			Provinsi	Nilai SAKIP	BB Predikat	Nilai SAKIP	BB Predikat	Nilai SAKIP	BB Predikat		
			Provinsi	Nilai SAKIP	BB Predikat	Nilai SAKIP	BB Predikat	Nilai SAKIP	BB Predikat		
X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI		Provinsi	Presentase Keterlaksanaan	100%	Presentase Keterlaksanaan	100%	Presentase Keterlaksanaan	100%	8,193,648,501	8.554.081.445
X.XX.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Provinsi	Jumlah Dokumen,Perencanaan, pengendalian dan evaluasi kegiatan	12 Dokumen	Jumlah Dokumen,Perencanaan, pengendalian dan evaluasi kegiatan	12 Dokumen	Jumlah Dokumen,Perencanaan, pengendalian dan evaluasi kegiatan	12 Dokumen	173,001,101	250.000.000
X.XX.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		Provinsi	ASN penerima gaji dan tunjangan	52 Orang	ASN penerima gaji dan tunjangan	52 Orang	ASN penerima gaji dan tunjangan	52 Orang	6,837,095,900	6.607.051.445
X.XX.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		Provinsi	Jumlah laporan realisasi keuangan SKPD	1 Dokumen Laporan	Jumlah laporan realisasi keuangan SKPD	1 Dokumen Laporan	Jumlah laporan realisasi keuangan SKPD	1 Dokumen Laporan	12,910,400	22.000.000
X.XX.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		Provinsi	Jumlah laporan realisasi keuangan per semester SKPD	1 Dokumen Laporan	Jumlah laporan realisasi keuangan per semester SKPD	1 Dokumen Laporan	Jumlah laporan realisasi keuangan per semester SKPD	1 Dokumen Laporan	6,000,000	22.000.000
X.XX.01.1.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah		Provinsi	Jumlah laporan aset barang daerah	1 Dokumen Laporan	Jumlah laporan aset barang daerah	1 Dokumen Laporan	Jumlah laporan aset barang daerah	1 Dokumen Laporan	28,000,000	30.000.000
X.XX.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		Provinsi	Jumlah PNS yang mengikuti pendidikan dan pelatihan formal	2 Orang	Jumlah PNS yang mengikuti pendidikan dan pelatihan formal	2 Orang	Jumlah PNS yang mengikuti pendidikan dan pelatihan formal	2 Orang	5,000,000	15.000.000
X.XX.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah		Provinsi	Persentase kinerja internal yang terlayani dengan baik	100%	Persentase kinerja internal yang terlayani dengan baik	100%	Persentase kinerja internal yang terlayani dengan baik	100%	241,471,500	442.000.000

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/ Kegiatan	Prioritas Daerah	Lokasi	Capaian Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Sub Kegiatan		Pagu Tahun 2023	Pagu Tahun 2024
				Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target		
X.XX.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		Provinsi	Jumlah pengadaan/ pemeliharaan perlengkapan kerja gedung kantor	5 Unit	Jumlah pengadaan/ pemeliharaan perlengkapan kerja gedung kantor	5 Unit	Jumlah pengadaan/ pemeliharaan perlengkapan kerja gedung kantor	5 Unit	92,120,000	352.000.000
X.XX.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Provinsi	Persentase kinerja internal yang terlayani dengan baik	100%	Persentase kinerja internal yang terlayani dengan baik	100%	Persentase kinerja internal yang terlayani dengan baik	100%	621,480,000	621,480,000
X.XX.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Provinsi	Jumlah pemeliharaan mesin Roda 4 dan Roda 2 dan mesin lainnya	48 Unit Kendaraan R2 & R4	Jumlah pemeliharaan mesin Roda 4 dan Roda 2 dan mesin lainnya	48 Unit Kendaraan R2 & R4	Jumlah pemeliharaan mesin Roda 4 dan Roda 2 dan mesin lainnya	48 Unit Kendaraan R2 & R4	195,480,000	250.000.000

BAB VI

PENUTUP

Sistem anggaran terpadu berbasis kinerja akan membuka peluang bagi daerah untuk bekerja lebih optimal dan mencerminkan komitmen yang kuat dalam pelaksanaan sistem penganggaran berbasis kinerja. Sistem perencanaan yang baik harus dilakukan secara komprehensif dengan memperhatikan, renstra badan, aspirasi masyarakat, *stakeholder* terkait dan perkembangan pembangunan yang ada.

Perencanaan disusun dengan memacu pada peraturan-peraturan yang ada, serta sasaran yang jelas dengan besaran terukur, lokasi, waktu, kelompok sasaran dan manfaat bagi kelompok penerima sasaran.

Demikian penyusunan rancangan awal Rencana Kerja (Renja) Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Kalimantan Tengah ini dibuat, sebagai bahan acuan pelaksanaan program dan kegiatan Ketahanan Pangan.

LAMPIRAN-LAMPIRAN

LAMPIRAN III SURAT SEKRETARIS DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

Nomor : 050/136/II/Bapplitbang

Tanggal : 28 Januari 2021

Perihal : Penyusunan Rancangan Awal Renja-PD Tahun 2024

DINAS KETAHANAN PANGAN PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/ Kegiatan	Prioritas Daerah	Lokasi	Capaian Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Sub Kegiatan		Pagu Tahun 2023	Pagu Tahun 2024
				Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target		
	Urusan Pemerintahan Bidang Pangan		Provinsi	Kontribusi Penguatan Cadangan pangan daerah (Persentase)	70,50%	Kontribusi Penguatan Cadangan pangan daerah (Persentase)	70,50%	Kontribusi Penguatan Cadangan pangan daerah (Persentase)	70,50%	-	-
			Provinsi	Ketersediaan pangan utama (surplus beras dalam ton)	36334 Ton	Ketersediaan pangan utama (surplus beras dalam ton)	36334 Ton	Ketersediaan pangan utama (surplus beras dalam ton)	36334 Ton		
2.09.02	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA EKONOMI UNTUK KEDAULATAN DAN KEMANDIRIAN PANGAN		Provinsi	Ketersediaan pangan utama (surplus beras dalam ton)	36334 Ton	Ketersediaan pangan utama (surplus beras dalam ton)	36334 Ton	Ketersediaan pangan utama (surplus beras dalam ton)	36334 Ton	15,300,000	16,000,000
2.09.02.1.01	Penyediaan Infrastruktur dan Seluruh Pendukung Kemandirian Pangan pada berbagai Sektor sesuai Kewenangan Daerah Provinsi		Provinsi	Jumlah sasaran luas tanam, luas panen, produktivitas dan produksi tanaman pangan, holtikultura, produksi perternakan, luas areal dan produksi perkebunan dan produksi perikanan provinsi kalimantan tengah	36334 Ton	Jumlah sasaran luas tanam, luas panen, produktivitas dan produksi tanaman pangan, holtikultura, produksi perternakan, luas areal dan produksi perkebunan dan produksi perikanan provinsi kalimantan tengah	36334 Ton	Jumlah sasaran luas tanam, luas panen, produktivitas dan produksi tanaman pangan, holtikultura, produksi perternakan, luas areal dan produksi perkebunan dan produksi perikanan provinsi kalimantan tengah	36334 Ton	15,300,000	16,000,000

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/ Kegiatan	Prioritas Daerah	Lokasi	Capaian Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Sub Kegiatan		Pagu Tahun 2023	Pagu Tahun 2024
				Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target		
			Provinsi	Analisis skor PPH Provinsi Kalimantan Tengah	91%	Analisis skor PPH Provinsi Kalimantan Tengah	91%	Analisis skor PPH Provinsi Kalimantan Tengah	91%		
2.09.03	PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT		Provinsi	Kontribusi Penguatan Cadangan Pangan Daerah (%)	70,50%	Kontribusi Penguatan Cadangan Pangan Daerah (%)	70,50%	Kontribusi Penguatan Cadangan Pangan Daerah (%)	70,50%	2,921,841,900	2.594.388.500
			Provinsi	Skor Pola Pangan Harapan (PPH) Konsumsi (%)	91%	Skor Pola Pangan Harapan (PPH) Konsumsi (%)	91%	Skor Pola Pangan Harapan (PPH) Konsumsi (%)	91%	229,500,000	328.000.000
2.09.03.1.01	Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Provinsi dalam rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan		Provinsi	Jumlah laporan analisis Neraca Bahan Makanan (NBM) dan PPH ketersediaan	1 Dokumen	Jumlah laporan analisis Neraca Bahan Makanan (NBM) dan PPH ketersediaan	1 Dokumen	Jumlah laporan analisis Neraca Bahan Makanan (NBM) dan PPH ketersediaan	1 Dokumen	1,905,000,000	1.518.000.000
2.09.03.1.01.01	Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Provinsi dalam rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan		Provinsi	Jumlah Kelompok Lembaga distribusi pangan	11 Kelompok	Jumlah Kelompok Lembaga distribusi pangan	11 Kelompok	Jumlah Kelompok Lembaga distribusi pangan	11 Kelompok	25,000,000	27,000,000

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/ Kegiatan	Prioritas Daerah	Lokasi	Capaian Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Sub Kegiatan		Pagu Tahun 2023	Pagu Tahun 2024
				Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target		
2.09.03.1.01.02	Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Provinsi dalam rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan		Provinsi	Jumlah kelompok ibu menyusui dan Ibu hamil yang mengikuti kegiatan dan jumlah kelompok wanita pangan lokal	3 Kelompok	Jumlah kelompok ibu menyusui dan Ibu hamil yang mengikuti kegiatan dan jumlah kelompok wanita pangan lokal	3 Kelompok	Jumlah kelompok ibu menyusui dan Ibu hamil yang mengikuti kegiatan dan jumlah kelompok wanita pangan lokal	3 Kelompok	85,000,000	88,000,000
2.09.03.1.01.03	Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Provinsi dalam rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan		Provinsi	Jumlah laporan pemantauan Analisis Akses Pangan dan laporan pemantauan distribusi pangan	2 Laporan	Jumlah laporan pemantauan Analisis Akses Pangan dan laporan pemantauan distribusi pangan	2 Laporan	Jumlah laporan pemantauan Analisis Akses Pangan dan laporan pemantauan distribusi pangan	2 Laporan	45,000,000	48,000,000
2.09.03.1.01.04	Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Provinsi dalam rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan		Provinsi	jumlah Dokumen Laporan pemantauan Analisis Tren Harga Pangan Pokok	1 Dokumen	jumlah Dokumen Laporan pemantauan Analisis Tren Harga Pangan Pokok	1 Dokumen	jumlah Dokumen Laporan pemantauan Analisis Tren Harga Pangan Pokok	1 Dokumen	750,000,000	750,000,000
2.09.03.1.02.05	Pengelolaan dan Keseimbangan Cadangan Pangan Provinsi		Provinsi	Jumlah Kelompok Lumbung yang mandiri	12 Kelompok	Jumlah Kelompok Lumbung yang mandiri	12 Kelompok	Jumlah Kelompok Lumbung yang mandiri	12 Kelompok	1,000,000,000	1,000,000,000
2.09.03.1.02	Pengelolaan dan Keseimbangan Cadangan Pangan Provinsi		Provinsi	Dokumen sasaran produksi	1 Dokumen	Dokumen sasaran produksi	1 Dokumen	Dokumen sasaran produksi	1 Dokumen	15,000,000	16,000,000
2.09.03.1.02.01	Pengelolaan dan Keseimbangan Cadangan Pangan Provinsi		Provinsi	Pengembangan cadangan pangan pemerintah provinsi	783 Kg	Pengembangan cadangan pangan pemerintah provinsi	783 Kg	Pengembangan cadangan pangan pemerintah provinsi	783 Kg	760,341,900	573.000.000

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/ Kegiatan	Prioritas Daerah	Lokasi	Capaian Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Sub Kegiatan		Pagu Tahun 2023	Pagu Tahun 2024
				Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target		
2.09.03.1.04	Promosi Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi melalui Media Provinsi		Provinsi	Jumlah kegiatan Ekspose dan Promosi Pembangunan Ketahanan Pangan	1 Kegiatan	Jumlah kegiatan Ekspose dan Promosi Pembangunan Ketahanan Pangan	1 Kegiatan	Jumlah kegiatan Ekspose dan Promosi Pembangunan Ketahanan Pangan	1 Kegiatan	226,500,000	434,112,500
2.09.03.1.04	Promosi Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi melalui Media Provinsi		Provinsi	Jumlah Peserta kegiatan sosialisasi diversifikasi pangan	3 Peserta	Jumlah Peserta kegiatan sosialisasi diversifikasi pangan	3 Peserta	Jumlah Peserta kegiatan sosialisasi diversifikasi pangan	3 Peserta	80,000,000	80,000,000
2.09.03.1.04	Promosi Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi melalui Media Provinsi		Provinsi	jumlah Dokumen Laporan Terlaksananya Analisis Pola Pangan Harapan	1 Dokumen	jumlah Dokumen Laporan Terlaksananya Analisis Pola Pangan Harapan	1 Dokumen	jumlah Dokumen Laporan Terlaksananya Analisis Pola Pangan Harapan	1 Dokumen	125,000,000	328,000,000
			Provinsi	Persentase jumlah sampel pangan segar yang aman dengan jumlah sampel yang diambil	91%	Persentase jumlah sampel pangan segar yang aman dengan jumlah sampel yang diambil	91%	Persentase jumlah sampel pangan segar yang aman dengan jumlah sampel yang diambil	91%		
2.09.05	PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN		Provinsi	Persentase sampel pangan segar yang aman dengan jumlah sampel yang diambil (%)	91%	Persentase sampel pangan segar yang aman dengan jumlah sampel yang diambil (%)	91%	Persentase sampel pangan segar yang aman dengan jumlah sampel yang diambil (%)	91%	90,000,000	116.000.000

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/ Kegiatan	Prioritas Daerah	Lokasi	Capaian Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Sub Kegiatan		Pagu Tahun 2023	Pagu Tahun 2024
				Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target		
2.09.05.1.01	Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Distribusi Lintas Daerah Kabupaten/Kota		Provinsi	Jumlah Peserta Pelatihan Petugas Pengambil Contoh	35 Peserta	Jumlah Peserta Pelatihan Petugas Pengambil Contoh	35 Peserta	Jumlah Peserta Pelatihan Petugas Pengambil Contoh	35 Peserta	90,000,000	116.000.000
2.09.05.1.01	Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Distribusi Lintas Daerah Kabupaten/Kota		Provinsi	Jumlah sertifikasi prima keamanan pangan segar	4 Sertifikasi	Jumlah sertifikasi prima keamanan pangan segar	4 Sertifikasi	Jumlah sertifikasi prima keamanan pangan segar	4 Sertifikasi	20,000,000	20.845.000
2.09.05.1.01	Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Distribusi Lintas Daerah Kabupaten/Kota		Provinsi	jumlah registrasi pemberdayaan kelompok pangan lokal	2 Kelompok	jumlah registrasi pemberdayaan kelompok pangan lokal	2 Kelompok	jumlah registrasi pemberdayaan kelompok pangan lokal	2 Kelompok	20,000,000	20.800.000
2.09.05.1.01	Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Distribusi Lintas Daerah Kabupaten/Kota		Provinsi	Jumlah sampel mutu keamanan pangan segar dan olahan yang diteliti	25 Jumlah Sampel	Jumlah sampel mutu keamanan pangan segar dan olahan yang diteliti	25 Jumlah Sampel	Jumlah sampel mutu keamanan pangan segar dan olahan yang diteliti	25 Jumlah Sampel	20,000,000	20.800.000
2.09.05.1.01	Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Distribusi Lintas Daerah Kabupaten/Kota		Provinsi	jumlah sarana penunjang laboratorium	2 Unit	jumlah sarana penunjang laboratorium	2 Unit	jumlah sarana penunjang laboratorium	2 Unit	15,000,000	15,600,000
			Provinsi	Penanganan daerah rawan pangan (%)	2%	Penanganan daerah rawan pangan (%)	2%	Penanganan daerah rawan pangan (%)	2%		
2.09.04	PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN		Provinsi	Penanganan daerah rawan pangan (%)	2%	Penanganan daerah rawan pangan (%)	2%	Penanganan daerah rawan pangan (%)	2%	50,000,000	152.025.000
2.09.04.1.01	Penyusunan Peta Kerentanan dan Ketahanan Pangan kewenangan Provinsi		Provinsi	Jumlah laporan analisis dan peta (FSVA) dan situasi pangan dan gizi (SKPG)	2 Dokumen	Jumlah laporan analisis dan peta (FSVA) dan situasi pangan dan gizi (SKPG)	2 Dokumen	Jumlah laporan analisis dan peta (FSVA) dan situasi pangan dan gizi (SKPG)	2 Dokumen	35,500,000	116,000,000

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/ Kegiatan	Prioritas Daerah	Lokasi	Capaian Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Sub Kegiatan		Pagu Tahun 2023	Pagu Tahun 2024
				Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target		
2.09.04.1.01	Penyusunan Peta Kerentanan dan Ketahanan Pangan kewenangan Provinsi		Provinsi	Jumlah Laporan identifikasi, investigasi, dan Pemantauan daerah Rawan Pangan	1 Laporan	Jumlah Laporan identifikasi, investigasi, dan Pemantauan daerah Rawan Pangan	1 Laporan	Jumlah Laporan identifikasi, investigasi, dan Pemantauan daerah Rawan Pangan	1 Laporan	35,500,000	36,025,000
			Provinsi	Nilai SAKIP	BB Predikat	Nilai SAKIP	BB Predikat	Nilai SAKIP	BB Predikat		
			Provinsi	Nilai SAKIP	BB Predikat	Nilai SAKIP	BB Predikat	Nilai SAKIP	BB Predikat		
X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI		Provinsi	Presentase Keterlaksanaan	100%	Presentase Keterlaksanaan	100%	Presentase Keterlaksanaan	100%	8,193,648,501	8.554.081.445
X.XX.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Provinsi	Jumlah Dokumen,Perencanaan, pengendalian dan evaluasi kegiatan	12 Dokumen	Jumlah Dokumen,Perencanaan, pengendalian dan evaluasi kegiatan	12 Dokumen	Jumlah Dokumen,Perencanaan, pengendalian dan evaluasi kegiatan	12 Dokumen	173,001,101	250.000.000
X.XX.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		Provinsi	ASN penerima gaji dan tunjangan	52 Orang	ASN penerima gaji dan tunjangan	52 Orang	ASN penerima gaji dan tunjangan	52 Orang	6,837,095,900	6.607.051.445
X.XX.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		Provinsi	Jumlah laporan realisasi keuangan SKPD	1 Dokumen Laporan	Jumlah laporan realisasi keuangan SKPD	1 Dokumen Laporan	Jumlah laporan realisasi keuangan SKPD	1 Dokumen Laporan	12,910,400	22.000.000
X.XX.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		Provinsi	Jumlah laporan realisasi keuangan per semester SKPD	1 Dokumen Laporan	Jumlah laporan realisasi keuangan per semester SKPD	1 Dokumen Laporan	Jumlah laporan realisasi keuangan per semester SKPD	1 Dokumen Laporan	6,000,000	22.000.000
X.XX.01.1.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah		Provinsi	Jumlah laporan aset barang daerah	1 Dokumen Laporan	Jumlah laporan aset barang daerah	1 Dokumen Laporan	Jumlah laporan aset barang daerah	1 Dokumen Laporan	28,000,000	30.000.000
X.XX.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		Provinsi	Jumlah PNS yang mengikuti pendidikan dan pelatihan formal	2 Orang	Jumlah PNS yang mengikuti pendidikan dan pelatihan formal	2 Orang	Jumlah PNS yang mengikuti pendidikan dan pelatihan formal	2 Orang	5,000,000	15.000.000
X.XX.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah		Provinsi	Persentase kinerja internal yang terlayani dengan baik	100%	Persentase kinerja internal yang terlayani dengan baik	100%	Persentase kinerja internal yang terlayani dengan baik	100%	241,471,500	442.000.000

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/ Kegiatan	Prioritas Daerah	Lokasi	Capaian Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Sub Kegiatan		Pagu Tahun 2023	Pagu Tahun 2024
				Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target		
X.XX.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		Provinsi	Jumlah pengadaan/ pemeliharaan perlengkapan kerja gedung kantor	5 Unit	Jumlah pengadaan/ pemeliharaan perlengkapan kerja gedung kantor	5 Unit	Jumlah pengadaan/ pemeliharaan perlengkapan kerja gedung kantor	5 Unit	92,120,000	352.000.000
X.XX.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Provinsi	Persentase kinerja internal yang terlayani dengan baik	100%	Persentase kinerja internal yang terlayani dengan baik	100%	Persentase kinerja internal yang terlayani dengan baik	100%	621,480,000	621,480,000
X.XX.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Provinsi	Jumlah pemeliharaan mesin Roda 4 dan Roda 2 dan mesin lainnya	48 Unit Kendaraan R2 & R4	Jumlah pemeliharaan mesin Roda 4 dan Roda 2 dan mesin lainnya	48 Unit Kendaraan R2 & R4	Jumlah pemeliharaan mesin Roda 4 dan Roda 2 dan mesin lainnya	48 Unit Kendaraan R2 & R4	195,480,000	250.000.000

**RENCANA KERJA (RENJA) PERUBAHAN ORGANISASI PERANGKAT DAERAH (RENJA-P OPD)
DINAS KETAHANAN PANGAN PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
TAHUN ANGGARAN 2024**

No	Kode	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	PAGU Sebelum	PAGU Sesudah	Bertambah / Berkurang	Keterangan
1.	2.	Urusan Pemerintah Wajib Yang Tidak Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar	15.424.077.260,00	17.733.142.664,00	2.309.065.404,00	
	2.09	Urusan Pemerintahan Bidang Pangan	15.424.077.260	17.733.142.664	2.309.065.404	
	2 09 01.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	9.732.442.260	12.041.507.664	2.309.065.404	
	2.09.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	238.799.155	238.799.155	-	
	2 09 01 1.01 0001.	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	193.799.155	193.799.155	-	
	2 09 01 1.01 0002.	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	5.000.000	5.000.000	-	
	2 09 01 1.01 0003.	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	10.000.000	10.000.000	-	
	2 09 01 1.01 0004.	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	10.000.000	10.000.000	-	
	2 09 01 1.01 0005.	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	10.000.000	10.000.000	-	
	2 09 01 1.01 0006.	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	10.000.000	10.000.000	-	
	2 09 01 1.02.	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	7.611.495.244	7.952.595.244	341.100.000	
	2 09 01 1.02 0001.	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	7.418.935.244	7.760.035.244	341.100.000	
	2 09 01 1.02 0002.	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	176.760.000	176.760.000	-	
	2 09 01 1.02 0005.	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	10.000.000	10.000.000	-	
	2 09 01 1.02 0007.	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	5.800.000	5.800.000	-	

No	Kode	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	PAGU Sebelum	PAGU Sesudah	Bertambah / Berkurang	Keterangan
	2 09 01 1.03.	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	30.590.000	30.590.000	-	
	2 09 01 1.03 0006.	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	30.590.000	30.590.000	-	
	2 09 01 1.05.	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	25.000.000	25.000.000	-	
	2 09 01 1.05 0009.	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	25.000.000	25.000.000	-	
	2 09 01 1.06.	Administrasi Umum Perangkat Daerah	508.743.046	508.743.046	-	
	2 09 01 1.06 0001.	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor	15.000.000	15.000.000	-	
	2 09 01 1.06 0002.	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	131.743.046	131.743.046	-	
	2 09 01 1.06 0005.	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	10.000.000	10.000.000	-	
	2 09 01 1.06 0006.	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	50.000.000	50.000.000	-	
	2 09 01 1.06 0009.	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	302.000.000	302.000.000	-	
	2 09 01 1.07.	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	252.800.000	1.150.000.000	897.200.000	
	<i>2 09 01 1.07 0001.</i>	<i>Pengadaan Kendaraan Pereorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan</i>	-	<i>1.000.000.000</i>	<i>1.000.000.000</i>	<i>Penambahan Sub Kegiatan</i>
	2 09 01 1.07 0011.	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	252.800.000	150.000.000	(102.800.000)	
	2 09 01 1.08.	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	765.320.000	886.085.404	120.765.404	
	2 09 01 1.08 0001.	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	6.000.000	6.000.000	-	
	2 09 01 1.08 0002.	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	250.000.000	267.965.404	17.965.404	
	2 09 01 1.08 0003.	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	30.000.000	30.000.000	-	
	2 09 01 1.08 0004.	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor				

No	Kode	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	PAGU Sebelum	PAGU Sesudah	Bertambah / Berkurang	Keterangan
			479.320.000	582.120.000	102.800.000	
	2 09 01 1.09.	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	299.694.815	1.249.694.815	950.000.000	
	2 09 01 1.09 0001.	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	120.000.000	120.000.000	-	
	2 09 01 1.09 0002.	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	70.000.000	70.000.000	-	
	2 09 01 1.09 0006.	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	10.000.000	10.000.000	-	
	2 09 01 1.09 0010.	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	99.694.815	1.049.694.815	950.000.000	
	2 09 02.	Program Pengelolaan Sumber Daya Ekonomi Untuk Kedaulatan dan Kemandirian Pangan	266.535.000	266.535.000	-	
	2 09 02.1.01.	Penyediaan Infrastruktur dan Seluruh Pendukung Kemandirian Pangan padaberbagai Sektor sesuai Kewenangan Daerah Provinsi	266.535.000	266.535.000	-	
	2 09 02 1.01 0003.	Penyediaan Infrastruktur Pendukung Kemandirian Pangan Lainnya	13.320.000	13.320.000	-	
	2 09 02 1.01 0006.	Penyediaan Infrastruktur Cadangan Pangan Pemerintah Provinsi	253.215.000	253.215.000	-	
	2 09 03.	Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat	4.585.415.000	4.585.415.000	-	
	2 09 03.1.01.	Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Provinsi dalam rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan	1.266.304.000	1.266.304.000	-	

No	Kode	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	PAGU Sebelum	PAGU Sesudah	Bertambah / Berkurang	Keterangan
	2 09 03 1.01 0002.	Penyediaan Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	84.900.000	84.900.000	-	
	2 09 03 1.01 0003.	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Distribusi Pangan Pokok dan Pangan Lainnya	46.033.000	46.033.000	-	
	2 09 03 1.01 0008.	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan Stok, Pasokan dan Harga Pangan Pokok Strategis	421.436.500	421.436.500	-	
	2 09 03 1.01 0011.	Pengembangan Kelembagaan Distribusi Pangan Provinsi	628.823.000	628.823.000	-	
	2 09 03 1.01 0012.	Penyediaan Informasi Harga Pangan Tingkat Produsen dan Konsumen Wilayah Provinsi	85.111.500	85.111.500	-	
	2 09 03.1.02.	Pengelolaan dan Keseimbangan Cadangan Pangan Provinsi	717.860.000	717.860.000	-	
	2 09 03 1.02 0002.	Penyusunan Rencana Kebutuhan Pangan Lokal	16.518.000	16.518.000	-	
	2 09 03 1.02 0005.	Pengelolaan Cadangan Pangan Pemerintah Provinsi	300.000.000	300.000.000	-	
	2 09 03 1.02 0008.	Koordinasi Penyelenggaran Cadangan Pangan Pemerintah Provinsi	401.342.000	401.342.000	-	
	2 09 03.1.04.	Promosi Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi Melalui Media Provinsi	2.601.251.000	2.601.251.000	-	
	2 09 03 1.04 0001.	Promosi Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	596.100.000	596.100.000	-	
	2 09 03 1.04 0002.	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Advokasi, Edukasi, dan Sosialisasi Konsumsi Pangan Beragam, Bergizi, Seimbang dan Aman (B2SA)	1.958.162.000	1.958.162.000	-	
	2 09 03 1.04 0003.	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan dan Evaluasi Konsumsi per Kapita per Tahun	46.989.000	46.989.000	-	
	2 09 04.	Program Penanganan Kerawanan Pangan	479.043.000	479.043.000	-	

No	Kode	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	PAGU Sebelum	PAGU Sesudah	Bertambah / Berkurang	Keterangan
	2 09 04.1.01.	Penyusunan Peta Kerentanan dan Ketahanan Pangan kewenangan Provinsi	114.484.000	114.484.000	-	
	2 09 04 1.01 0001.	Penyusunan, Pemutakhiran dan Analisis Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan Provinsi dan Kabupaten/ 3Kota	114.484.000	114.484.000	-	
	2 09 04.1.02.	Penanganan Kerawanan Pangan Kewenangan Provinsi	364.559.000	364.559.000	-	
	2 09 04 1.02	Pelaksanaan Pengadaan, Pengelolaan, dan Penyaluran Cadangan Pangan pada Kerawanan Pangan yang Mencakup lebih dari 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	198.559.000	198.559.000	-	
	2 09 04 1.02 0004.	Koordinasi dan Sinkronisasi Penanganan Kerawanan Pangan dan Gizi Provinsi	166.000.000	166.000.000	-	
	2 09 05.	Program Pengawasan Keamanan Pangan	360.642.000	360.642.000	-	
	2 09 05.1.01.	Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Distribusi Lintas Daerah Kabupaten/Kota	360.642.000	360.642.000	-	
	2 09 05 1.01 0006.	Sertifikasi Keamanan dan Mutu Pangan Segar Asal Tumbuhan	18.063.000	18.063.000	-	
	2 09 05 1.01 0007.	Rekomendasi Perizinan keamanan pangan segar asal tumbuhan	18.634.000	18.634.000	-	
	2 09 05 1.01 0008.	Rekomendasi Keamanan dan Mutu Pangan Segar Asal Tumbuhan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	15.000.000	15.000.000	-	
	2 09 05 1.01 0009.	Penguatan kelembagaan pengawas keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan	108.345.000	108.345.000	-	
	2 09 05 1.01 0010.	Penyediaan sarana dan prasarana pengujian keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan	200.600.000	200.600.000	-	